

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir di Indonesia sering diposisikan sebagai ruang strategis pembangunan karena kekayaan sumber daya alamnya. Namun, dalam praktik sosial di tingkat lokal, potensi tersebut tidak selalu hadir sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup dan bergantung padanya. Di desa pesisir Mallasoro, misalnya, kehidupan masyarakat pesisir berlangsung dalam situasi keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang tidak merata, serta peluang ekonomi yang bersifat selektif. Kondisi ini tidak semata-mata mencerminkan persoalan struktural pembangunan, tetapi juga terbentuk melalui pengalaman, penafsiran, dan strategi bertahan hidup masyarakat pesisir dalam keseharian mereka, sebagaimana dikemukakan oleh Satria (2020).

Sektor perikanan tradisional yang selama ini menjadi tumpuan utama ekonomi masyarakat pesisir menghadapi tekanan yang semakin kompleks dan bersifat struktural. Fenomena seperti *overfishing*, degradasi lingkungan pesisir dan laut, serta dampak perubahan iklim telah berkontribusi terhadap menurunnya hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Kondisi ini memperlihatkan kerentanan ekonomi nelayan tradisional yang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh lemahnya tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Padahal, wilayah pesisir dan lautan Indonesia merupakan kawasan yang sangat produktif dan strategis, dengan kekayaan sumber daya alam serta jasa lingkungan yang besar. Terabaikannya pembangunan sektor kelautan dan perikanan mencerminkan ketimpangan orientasi pembangunan nasional, di mana potensi ekonomi pesisir belum diposisikan sebagai sumber pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir (Kusnadi, 2003).

Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Yulianto dkk. (2023), wilayah pesisir Indonesia ditopang oleh keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan ekosistem pesisir yang produktif, sehingga berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi tersebut tercermin dalam peran wilayah pesisir sebagai penyedia komoditas perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan industri dan perhubungan. Namun demikian, kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional masih relatif terbatas dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian pula sektor pariwisata bahari, yang meskipun belum menunjukkan kontribusi kesejahteraan yang optimal, tetap memiliki peluang strategis untuk dikembangkan sebagai bagian dari pendekatan pembangunan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.

Wilayah pesisir Indonesia dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya berkelindan dengan

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup dan bergantung pada wilayah tersebut. Berbagai kajian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati laut yang tinggi serta ekosistem pesisir yang relatif produktif, yang secara teoritis dapat menjadi basis penting bagi pembangunan ekonomi nasional (Yulianto et al., 2023). Dalam kerangka pembangunan, wilayah pesisir berpotensi berkontribusi melalui sektor perikanan sebagai penyedia komoditas hasil laut, sekaligus sebagai ruang strategis bagi pengembangan pariwisata bahari, kawasan industri, dan perhubungan laut.

Namun demikian, realitas empiris memperlihatkan bahwa kontribusi sektor kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif terbatas dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi serupa juga terlihat pada sektor pariwisata, di mana pengembangannya belum secara optimal menghadirkan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pariwisata bahari lebih sering diposisikan sebagai potensi pembangunan daripada sebagai praktik ekonomi yang benar-benar dialami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi wilayah pesisir dan realitas sosial-ekonomi yang dialami masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana masyarakat pesisir memaknai, mengakses, dan merespons berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya pesisir dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, pengembangan pariwisata bahari di banyak wilayah pesisir Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *top-down* yang menempatkan negara dan aktor ekonomi skala besar sebagai pengambil keputusan utama. Pola ini cenderung memosisikan masyarakat pesisir sebatas sebagai penerima manfaat pasif, tenaga kerja, atau bahkan sekadar objek legitimasi program pembangunan. Akibatnya, perencanaan dan implementasi pariwisata bahari sering kali tidak berangkat dari kebutuhan, pengetahuan lokal, serta pengalaman hidup masyarakat pesisir, melainkan dari kepentingan pertumbuhan ekonomi dan logika pasar.

Pendekatan *top-down* tersebut tidak jarang melahirkan ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan ruang pesisir, di mana akses masyarakat lokal terhadap sumber daya pesisir semakin terbatas. Dalam konteks ini, pariwisata bahari berpotensi mereproduksi pola marginalisasi baru, baik melalui alih fungsi ruang, komersialisasi budaya, maupun ketergantungan ekonomi masyarakat pada aktor eksternal. Realitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata bahari tidak dapat diukur semata-mata dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan atau pertumbuhan ekonomi regional, tetapi perlu dipahami dari sejauh mana masyarakat pesisir memiliki kontrol, suara, dan posisi tawar dalam proses pengembangannya.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari pembangunan pariwisata bahari yang bersifat *top-down* menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Pengembangan pariwisata bahari perlu dimaknai sebagai proses sosial yang melibatkan negosiasi kepentingan, relasi kuasa, serta praktik keseharian masyarakat pesisir. Dengan demikian, model pengembangan ekonomi alternatif yang dirumuskan diharapkan mampu menantang

dominasi aktor eksternal, sekaligus membuka ruang bagi penguatan agensi, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan sosial masyarakat pesisir.

Pariwisata bahari diposisikan sebagai salah satu sektor strategis yang memiliki prospek signifikan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023) menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 4,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2022, dengan potensi peningkatan yang terus terbuka pada masa mendatang. Capaian tersebut menegaskan bahwa pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata bahari, tidak semata dipahami sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja dalam kerangka pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang integratif yang mempertemukan kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan pesisir, serta keberlanjutan budaya lokal.

Dalam perspektif pembangunan pesisir, pengembangan pariwisata bahari idealnya diarahkan untuk memperkuat posisi masyarakat pesisir sebagai subjek pembangunan. Harapan pemerintah terhadap peningkatan kontribusi sektor pariwisata di masa depan perlu ditopang oleh strategi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal dan keberlanjutan sosial-ekologis. Salah satu strategi yang relevan adalah mendorong model pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis pariwisata bahari, yang bertumpu pada pemanfaatan potensi lokal, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Sebagai negara bahari, Indonesia dianugerahi kelimpahan sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar di hampir seluruh kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan perairan laut, dari wilayah barat hingga timur Nusantara. Kekayaan tersebut tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi, tetapi juga membentuk lanskap sosial dan budaya masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai ruang hidup. Kondisi ini dapat dijumpai di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di kawasan Indonesia bagian timur dan dikenal memiliki karakteristik kepulauan serta pesisir yang kaya akan sumber daya laut.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki garis pantai sepanjang $\pm 1.979,97$ km dengan luas perairan laut diperkirakan mencapai 48.000 km², yang meliputi kawasan Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone, serta gugusan pulau-pulau kecil seperti Kepulauan Spermonde dan Kepulauan Takabonerate (DKP, 2007; Anonim, 2008). Wilayah ini menyimpan beragam sumber daya, baik hayati seperti ikan, krustasea, moluska, terumbu karang, lamun, rumput laut, dan mangrove maupun non-hayati, antara lain pasir putih, mineral, dan sumber daya tambang lainnya (Haeruman, 2000). Keberagaman sumber daya tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata bahari, sekaligus menghadirkan tantangan dalam pengelolaan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Dalam konteks penelitian kualitatif, kondisi tersebut menjadi penting untuk dipahami tidak hanya melalui data makro dan kebijakan pembangunan, tetapi juga melalui pengalaman, persepsi, serta praktik sosial masyarakat pesisir dalam memaknai dan mengelola potensi pariwisata bahari di wilayahnya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menangkap dinamika relasi antara negara, pasar,

dan masyarakat lokal, serta mengungkap bagaimana pariwisata bahari beroperasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.

Sulawesi Selatan merupakan kawasan yang memiliki konfigurasi geografis pesisir dan kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang besar serta peluang pengembangan wisata bahari yang signifikan. Secara konseptual, keberlimpahan sumber daya laut tersebut dapat menjadi basis penguatan ekonomi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, realitas sosial di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wilayah dan kondisi kehidupan masyarakat pesisir. Meskipun secara makro Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan aktivitas ekonomi kelautan relatif stabil di beberapa wilayah, kemiskinan masih menjadi persoalan yang nyata di sejumlah kabupaten pesisir, termasuk Kabupaten Jeneponto, khususnya pada komunitas masyarakat pesisir Desa Mallaosoro berdasarkan data tahun 2023–2024.

Potensi besar yang dimiliki Sulawesi Selatan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan dan distribusi manfaat sumber daya pesisir, yang menyebabkan masyarakat lokal belum memperoleh posisi yang setara dalam proses pembangunan. Dengan demikian, wilayah pesisir yang seharusnya menjadi ruang produksi dan kesejahteraan justru masih mereproduksi kerentanan sosial-ekonomi bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.

Potret kehidupan masyarakat pesisir di wilayah Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Kabupaten Kepulauan Selayar memperlihatkan pola kehidupan yang relatif seragam, di mana sebagian besar masyarakat masih berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di wilayah pedalaman maupun perkotaan. Kondisi ini tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari yang ditandai oleh keterbatasan penghasilan, kualitas hunian yang rendah, serta tingginya risiko kerentanan terhadap ancaman alam pesisir. Banyak rumah tangga nelayan masih menempati hunian tidak permanen atau semi permanen dengan konstruksi sederhana, bahkan berlantaikan tanah. Sebagian buruh nelayan juga belum memiliki tempat tinggal menetap, karena tidak mempunyai akses terhadap lahan atau tanah, sehingga pola hidup berpindah-pindah masih menjadi bagian dari realitas sosial mereka.

Secara administratif, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 24 kabupaten/kota, dengan 19 di antaranya secara geografis bersentuhan langsung dengan wilayah pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Namun demikian, berbagai sumber informasi dan data statistik masih memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan cenderung terkonsentrasi pada masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, terutama pada komunitas nelayan tradisional yang tingkat pendapatannya berada di bawah rata-rata masyarakat perkotaan. Data BPS Sulawesi Selatan tahun 2022–2023 menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di

wilayah pesisir belum berlangsung secara signifikan, salah satunya tercermin pada wilayah Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah pesisir dengan garis pantai yang cukup panjang serta memiliki kekayaan sumber daya alam, modal sosial, dan budaya pesisir yang khas. Masyarakatnya secara historis dan kultural memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sumber daya laut sebagai basis penghidupan. Namun, ditengah kekayaan alam dan karakteristik sosial-budaya tersebut, masyarakat pesisir Jeneponto masih berada pada kondisi kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang bermukim jauh dari wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan pesisir, di mana kekayaan sumber daya alam tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara historis, wilayah Kabupaten Jeneponto sejak abad ke-15 telah memainkan peran penting dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian regional di Sulawesi Selatan. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan kapal kecil serta tempat pelelangan ikan menjadi bukti bahwa kawasan ini pernah menjadi simpul aktivitas ekonomi pesisir. Namun dalam perkembangan kontemporer, struktur ekonomi masyarakat pesisir Jeneponto masih didominasi oleh nelayan tradisional dengan pola produksi yang bergantung pada hasil tangkapan laut dan teknologi sederhana. Ketergantungan ini, ditengah keterbatasan akses terhadap modal, pasar, dan kebijakan yang berpihak, menyebabkan masyarakat pesisir tetap berada dalam posisi rentan secara ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2022 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto mencapai 52,35 ribu jiwa, menjadikannya salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kondisi ini menjadi semakin paradoksal mengingat Jeneponto memiliki salah satu garis pantai terpanjang dan potensi sumber daya bahari yang besar setelah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oleh karena itu, keberlanjutan kemiskinan di wilayah pesisir Jeneponto bukan sekadar persoalan kekurangan sumber daya, melainkan persoalan yang patut dipertanyakan secara kritis terkait pola pembangunan, pengelolaan sumber daya pesisir, serta posisi masyarakat nelayan dalam struktur ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2023 (*terlampir*), yang menyajikan data jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019–2021, terlihat bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi realitas sosial yang persisten dan tersebar di hampir seluruh wilayah. Secara agregat, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 767,82 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 784,98 ribu jiwa pada tahun 2021. Angka ini tidak hanya merefleksikan dampak dinamika ekonomi makro dan situasi krisis, tetapi juga mengindikasikan keterbatasan daya jangkau kebijakan pembangunan dalam menyentuh kelompok masyarakat rentan di tingkat lokal.

Menarik untuk dicermati bahwa sejumlah kabupaten yang memiliki karakter wilayah pesisir dan kekayaan sumber daya bahari justru masih menunjukkan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Kabupaten Pangkep, misalnya, mengalami

peningkatan jumlah penduduk miskin dari 47,07 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 48,4 ribu jiwa pada tahun 2021. Kondisi serupa juga tampak di wilayah pesisir lainnya seperti Bone, Luwu, dan Luwu Utara, yang secara konsisten mencatat jumlah penduduk miskin dalam skala besar. Fakta ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan pesisir, yakni ketimpangan antara potensi sumber daya alam yang melimpah dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang hidup dan bergantung pada sumber daya tersebut.

Dalam perspektif penelitian kualitatif, data statistik ini tidak diposisikan semata-mata sebagai angka, melainkan sebagai penanda awal (*entry point*) untuk memahami realitas sosial yang lebih dalam. Angka-angka kemiskinan tersebut merepresentasikan pengalaman hidup masyarakat pesisir yang diwarnai oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, lemahnya posisi tawar dalam rantai produksi dan distribusi hasil perikanan, serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan pembangunan pesisir. Dengan demikian, kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pendapatan, tetapi sebagai kondisi struktural yang berhubungan erat dengan relasi kuasa, kebijakan pembangunan, dan praktik pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila kemiskinan di wilayah yang kaya akan potensi Bahari setelah Kabupaten Pangkep menjadi fenomena yang patut dipertanyakan secara kritis. Pertanyaan kuncinya bukan sekadar mengapa kemiskinan masih bertahan, melainkan bagaimana masyarakat pesisir memaknai kondisi tersebut, bagaimana strategi bertahan hidup dikembangkan, serta bagaimana relasi antara negara, pasar, dan komunitas lokal membentuk realitas keseharian mereka. Pendekatan ini membuka ruang bagi penelitian kualitatif untuk menggali pengalaman subjektif, praktik sosial, dan dinamika struktural yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka statistik kemiskinan.

Melihat data kemiskinan masyarakat tersebut, kondisi ini merefleksikan keterbatasan capaian ekonomi yang dialami oleh masyarakat pesisir. Di Kabupaten Jeneponto, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2023, tingkat kemiskinan memang menunjukkan kecenderungan menurun dari waktu ke waktu. Namun demikian, capaian tersebut belum menempatkan Kabupaten Jeneponto pada posisi yang relatif lebih baik dibandingkan daerah pesisir lain yang memiliki garis pantai panjang dan potensi sumber daya alam yang sama-sama menunjang pengembangan perekonomian masyarakat. Situasi ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir Jeneponto, yang masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses manfaat pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Fenomena kemiskinan yang dialami oleh komunitas nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Jeneponto merupakan persoalan sosial yang bersifat serius dan multidimensional. Kondisi ini tampak jelas di wilayah pesisir desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, di mana masyarakat nelayan berhadapan dengan beragam persoalan ekonomi, politik, dan sosial yang saling terkait. Kemiskinan tidak hanya hadir sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai pengalaman hidup yang dialami secara terus-menerus oleh keluarga nelayan akibat ketidakpastian

penghasilan, kesenjangan sosial, serta tekanan ekonomi yang muncul seiring dengan perubahan kondisi lingkungan pesisir.

Lebih lanjut, dinamika perubahan iklim, degradasi sumber daya laut, serta penurunan kualitas lingkungan pesisir turut mempersempit ruang penghidupan masyarakat nelayan, sehingga memperkuat kerentanan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, kemiskinan nelayan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai bagian dari persoalan struktural yang membentuk dan membatasi pilihan-pilihan ekonomi masyarakat pesisir.

Sejalan dengan temuan Arifin (2022) mengenai paradoks maritim di Indonesia, kemiskinan nelayan mencerminkan kompleksitas relasi struktural dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Meskipun wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, masyarakat nelayan tetap berada dalam kondisi rentan akibat keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, serta ketimpangan relasi kuasa dalam rantai nilai perikanan. Kondisi ini diperkuat oleh keberadaan sistem patron-klien yang masih mengakar, di mana nelayan kecil (sawi) berada dalam posisi subordinat terhadap pemilik modal (pinggawa) yang menguasai akses terhadap alat tangkap, pasar, dan sumber pembiayaan. Relasi ketergantungan ini secara tidak langsung mereproduksi kemiskinan dan membatasi peluang nelayan untuk keluar dari kondisi kerentanan ekonomi (Arifin, 2015).

Masyarakat pesisir di wilayah desa Mallasoro dalam penelitian ini dipahami sebagai masyarakat nelayan, yakni suatu kesatuan sosial kolektif yang bermukim di kawasan pesisir dengan sistem mata pencaharian utama yang beragam, meliputi aktivitas penangkapan ikan di laut, budidaya rumput laut, serta usaha tambak. Pola kehidupan sosial mereka masih kuat bertumpu pada sistem nilai dan norma budaya kenelayanan yang membentuk orientasi perilaku, cara pandang terhadap alam, serta relasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks sosial-budaya, masyarakat pesisir desa Mallasoro menunjukkan kecenderungan memiliki identitas kolektif yang relatif kuat, yang terbangun dalam batas-batas kesatuan sosial dan struktur sosial yang terbentuk melalui proses sejarah yang kurang lebih serupa dengan masyarakat pesisir lainnya di Sulawesi Selatan. Identitas tersebut tidak hanya merefleksikan kesamaan mata pencaharian, tetapi juga pengalaman historis, pola adaptasi terhadap lingkungan pesisir, serta sistem pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat pesisir desa Mallasoro memiliki sistem sosial dan budaya yang khas, yang membedakannya dari masyarakat yang bermukim di wilayah pegunungan, lembah, dataran rendah, maupun kawasan perkotaan. Kekhasan ini tercermin dalam pola relasi sosial, pembagian kerja, praktik ekonomi, serta cara masyarakat memaknai ruang pesisir sebagai ruang hidup sekaligus ruang produksi.

Di sisi lain, desa Mallasoro sesungguhnya dianugerahi berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai basis penguatan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut mencakup sumber daya pesisir dan bahari yang secara teoretis mampu menjadi penopang utama peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, sejauh mana potensi bahari tersebut dapat diakses, dimanfaatkan, dan

dimaknai oleh masyarakat pesisir desa Mallasoro menjadi persoalan empiris yang memerlukan penelusuran lebih mendalam melalui pendekatan penelitian kualitatif.

Dalam kerangka pengembangan pariwisata bahari, Nurdin, dkk. (2022) menegaskan bahwa wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya kelautan dapat dikembangkan melalui berbagai usaha alternatif, antara lain ekowisata mangrove, wisata kuliner berbasis hasil laut, kerajinan dengan bahan baku laut, budidaya rumput laut, serta jasa pemandu wisata lokal. Berbagai bentuk usaha tersebut dipandang tidak hanya berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka ruang partisipasi ekonomi bagi komunitas pesisir secara lebih luas. Pandangan ini sejalan dengan Arifin (2020) yang menyatakan bahwa pariwisata bahari yang dikelola secara baik dan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai insentif ekonomi sekaligus instrumen perlindungan ekosistem laut, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, ketika sumber daya tersebut dimanfaatkan sebagai basis aktivitas pariwisata.

Namun demikian, dalam perspektif penelitian kualitatif, potensi ekonomi pariwisata bahari tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peluang teknis, melainkan perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik sosial-budaya masyarakat lokal dan kondisi ekologi wilayah pesisir setempat. Setiap kawasan pesisir memiliki dinamika sosial, nilai budaya, serta relasi masyarakat dengan lingkungannya yang khas. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata bahari di kawasan pesisir, khususnya di desa Mallasoro, menuntut pemahaman kontekstual terhadap pengalaman, praktik, dan pengetahuan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir.

Strategi pengembangan ekonomi berbasis pariwisata bahari dengan demikian perlu, bahkan harus, mempertimbangkan secara menyeluruh keterkaitan antara aspek ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *blue economy* yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk wisata bahari, menjadi langkah krusial dalam pengembangan usaha-usaha alternatif berbasis pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dahuri, 2003). Oleh karena itu, identifikasi dan pengembangan usaha alternatif yang produktif dipandang penting sebagai upaya diversifikasi sumber pendapatan masyarakat pesisir, khususnya bagi masyarakat desa Mallasoro, agar tidak semata bergantung pada sektor ekonomi tunggal yang rentan terhadap perubahan ekologis dan ekonomi.

Dalam konteks pengembangan usaha-usaha alternatif berbasis pariwisata bahari, keterlibatan aktif masyarakat pesisir khususnya nelayan menjadi prasyarat penting sejak tahap perencanaan hingga implementasi program. Keterlibatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai partisipasi formal, melainkan sebagai proses dimana masyarakat pesisir memiliki ruang untuk menyuarakan pengalaman, kebutuhan, serta pengetahuan lokal yang mereka miliki dalam mengelola sumber daya pesisir. Sejalan dengan itu, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat kapasitas nelayan agar mampu mengelola usaha pariwisata bahari secara mandiri, adaptif, dan berkelanjutan (Nikijuluw, 2002).

Strategi pengembangan ekonomi daerah pesisir berbasis pariwisata bahari dipahami sebagai salah satu pendekatan strategis dalam mengaktualisasikan potensi ekonomi dan keindahan alam pesisir agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat desa. Pariwisata bahari yang mencakup berbagai aktivitas berbasis laut dan pesisir seperti wisata pantai, snorkeling, diving, surfing, aktivitas penangkapan ikan berbasis wisata, hingga usaha kuliner hasil laut tidak semata diposisikan sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai arena sosial yang mempertemukan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya masyarakat setempat.

Dalam praktiknya, pengembangan pariwisata bahari di wilayah pesisir berpotensi membuka peluang peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat desa pesisir. Namun demikian, temuan-temuan kualitatif menunjukkan bahwa keberhasilan strategi atau model pengembangan ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola, keberlanjutan lingkungan pesisir, serta sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata bahari perlu dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, yang menuntut pendekatan inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap konteks lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh komunitas pesisir secara keseluruhan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masyarakat nelayan kerap diposisikan sebagai kelompok yang tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan dalam arus pembangunan yang dimaknai secara luas. Dalam berbagai kajian ekonomi sumber daya, kemiskinan yang dialami masyarakat pesisir khususnya nelayan seringkali dipahami sebagai konsekuensi dari faktor-faktor sosial ekonomi yang berkaitan dengan karakteristik sumber daya alam, pola produksi, serta keterbatasan teknologi yang digunakan. Kondisi tersebut, sebagaimana dikemukakan Kusnadi (2002), membentuk situasi yang membuat nelayan terus bertahan dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Di sisi lain, realitas pembangunan pesisir di Indonesia memperlihatkan sebuah paradoks yang mencolok, di mana wilayah pesisir yang kaya akan potensi ekonomi kelautan justru berkembang menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 4,19 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang berada pada angka 4 persen. Dari total jumlah penduduk miskin nasional yang mencapai sekitar 10,86 juta jiwa, sekitar 1,3 juta jiwa atau 12,5 persen di antaranya bermukim di wilayah pesisir (Kompas.id, 2023). Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan masyarakat pesisir pada sektor perikanan tangkap yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi alam serta fluktuasi harga pasar, sehingga penghidupan masyarakat nelayan cenderung tidak menentu dan berada dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam kajian Manggabarani (2016) mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah pesisir pantai. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan masih berada pada kondisi yang rendah, yang tercermin dari pendapatan kepala rumah tangga, kontribusi pendapatan istri, serta

pendapatan anggota rumah tangga lainnya yang secara keseluruhan masih jauh berada di bawah standar hidup layak. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa kemiskinan nelayan tidak hanya bersifat temporer, melainkan telah menjadi kondisi struktural yang mengakar dalam kehidupan rumah tangga nelayan.

Lebih lanjut, Humaedi (2013) memandang kemiskinan nelayan dari perspektif faktor-faktor eksternal yang secara sistemik mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Ketergantungan pada sumber daya alam yang kian menipis, keterbatasan akses terhadap modal produktif, serta sistem pemasaran hasil perikanan yang tidak menguntungkan nelayan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat pesisir semakin terjebak dalam siklus kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan di wilayah pesisir tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari faktor individual, melainkan sebagai persoalan struktural yang menuntut adanya intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berpihak pada penguatan posisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat pesisir secara umum kerap diposisikan sebagai kelompok dengan tingkat perekonomian yang relatif paling rendah dibandingkan dengan masyarakat yang bermukim di wilayah perkotaan maupun di kawasan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural dalam distribusi hasil-hasil pembangunan antarwilayah. Ironisnya, di tengah kekayaan sumber daya kelautan yang dimiliki, masyarakat pesisir justru masih berada pada posisi marjinal dalam arus utama pembangunan ekonomi nasional.

Situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan ekonomi yang selama ini lebih didominasi oleh pengembangan sektor pertambangan, pertanian, dan perkebunan. Orientasi kebijakan semacam ini secara tidak langsung menempatkan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir pada posisi sekunder, sehingga memperlihatkan adanya ketertinggalan pembangunan pesisir secara nasional. Dalam konteks ini, sektor kelautan cenderung dipandang sebelah mata dan belum ditempatkan sebagai sektor strategis, meskipun secara substantif merupakan sumber daya prima yang memiliki potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, orientasi pembangunan yang bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan kerap tidak berjalan secara simultan. Ketidaksinambungan tersebut melahirkan dinamika pembangunan yang bersifat eksklusif, di mana akumulasi sumber daya ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Konsekuensinya, kesenjangan sosial semakin menguat, ditandai oleh fenomena “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin”, termasuk yang dialami oleh masyarakat pesisir.

Dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, berbagai penelitian sebelumnya telah berupaya merumuskan model-model alternatif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu di antaranya adalah penelitian Batilmurik (2016) tentang pengembangan model ekonomi kreatif bagi masyarakat di kawasan objek wisata bahari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut menekankan bahwa potensi wisata bahari

yang ada belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir setempat.

Penelitian lain dilakukan oleh Ridwan (2017) yang mengkaji model *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan pariwisata di Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad. Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat pesisir, sebagai dasar perumusan model pengembangan ekonomi yang berbasis ekowisata. Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menggeser orientasi pembangunan dari pendekatan top-down menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis potensi lokal masyarakat pesisir.

Namun demikian, berbagai penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat pesisir tidak semata-mata persoalan ketersediaan potensi, melainkan terkait erat dengan struktur kebijakan, relasi kuasa, serta bagaimana masyarakat pesisir memaknai dan mengakses peluang-peluang ekonomi dalam konteks sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini memandang penting untuk menggali secara mendalam pengalaman, perspektif, dan praktik hidup masyarakat pesisir dalam menghadapi dinamika pembangunan ekonomi, guna memahami secara lebih utuh realitas sosial yang melingkupi kehidupan mereka.

Dalam kajian pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, model ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT) telah banyak digunakan sebagai pendekatan utama. Namun, penelitian ini berupaya mengambil posisi yang berbeda dengan mengkonseptualisasikan model pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi usaha alternatif berbasis wisata bahari. Pendekatan ini diarahkan tidak untuk menggantikan mata pencaharian utama masyarakat, melainkan sebagai bentuk diversifikasi ekonomi yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi eksisting, sehingga berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pesisir.

Pengembangan usaha alternatif berbasis wisata bahari dalam penelitian ini dipahami sebagai proses sosial yang tidak terlepas dari dinamika interaksi dan relasi sosial masyarakat pesisir. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada kekuatan modal sosial yang telah ada, maupun modal sosial yang perlu dibangun dan diperkuat dalam kehidupan sosial masyarakat pesisir. Modal sosial dipandang sebagai prasyarat penting yang memungkinkan masyarakat mengakses peluang-peluang ekonomi baru secara kolektif dan berkelanjutan. Secara teoritik, penelitian ini menggunakan pendekatan teori modal sosial Pierre Bourdieu (1986), yang memandang modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang melekat pada jaringan relasi sosial, kepercayaan, serta norma yang terinstitusionalisasi. Dalam konteks masyarakat pesisir desa Mallasoro, modal sosial tersebut berperan dalam membuka akses terhadap usaha-usaha alternatif yang lebih produktif, meningkatkan penerimaan sosial terhadap inovasi ekonomi, serta memperluas peluang penambahan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya, konsep modal sosial tersebut dibingkai dalam kerangka *Sustainable Livelihoods Framework* yang dikembangkan oleh Chambers dan Conway

(1992). Melalui kerangka ini, modal sosial diposisikan sebagai salah satu aset penghidupan yang saling berinteraksi dengan aset lainnya dalam menopang keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama pembangunan dengan menekankan pemanfaatan aset sosial yang telah mereka miliki, sekaligus mengidentifikasi ruang-ruang penguatan kapasitas sosial yang relevan dengan konteks lokal.

Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Pariwisata Bahari. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengidentifikasi dan menggali secara mendalam berbagai informasi terkait sumber daya lokal, praktik sosial, serta potensi usaha-usaha alternatif yang berkembang di masyarakat pesisir. Proses analisis dilakukan secara induktif untuk menemukan pola-pola relasi sosial, strategi penghidupan, dan mekanisme pemanfaatan modal sosial yang berpotensi membentuk suatu model pengembangan ekonomi yang kontekstual dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Desa Mallasoro.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menempati posisi strategis dalam pengembangan disertasi ini karena menjadi landasan teoretis dan empiris yang memberikan justifikasi akademik terhadap topik penelitian yang dikaji. Melalui telaah kritis atas berbagai hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi celah kajian (research gap), menelusuri arah dan dinamika perkembangan keilmuan pada bidang kajian yang relevan, serta menempatkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam lanskap keilmuan yang lebih luas. Selain itu, penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai rujukan metodologis yang membantu peneliti dalam merumuskan kerangka teoretis, menentukan pendekatan dan strategi penelitian yang sesuai, serta mengantisipasi keterbatasan metodologis yang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya. Analisis komparatif terhadap temuan penelitian terdahulu juga memungkinkan dilakukan penguatan validitas hasil penelitian, pendalaman analisis, serta pengembangan konsep atau model yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak hanya berperan sebagai sumber referensi, tetapi juga sebagai pijakan konseptual yang memungkinkan disertasi ini memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal, bermakna, dan relevan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, disertasi ini merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan dan analisis hasil penelitian, antara lain:

1.2.1 Review penelitian relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Rullyana Puspitaningrum Mamengko (2021) yang mengkaji *Pengelolaan Pariwisata Bahari berbasis Community-Based Tourism (CBT) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir* di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sebagai strategi peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir. Fokus kajian diarahkan pada implementasi konsep *Community-Based Tourism* sebagai pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan

masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam pengelolaan potensi pariwisata bahari di wilayahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep CBT berperan signifikan dalam mendorong pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan, terutama melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pariwisata. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap sumber daya pariwisata yang ada. Dalam konteks ini, masyarakat pesisir diposisikan tidak sekadar sebagai objek pembangunan pariwisata, melainkan sebagai subjek yang memiliki kontrol dan kewenangan dalam menentukan arah pengembangan destinasi wisata bahari. Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mempertegas relevansi pendekatan CBT sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun demikian, kajian tersebut masih berfokus pada dimensi ekonomi pariwisata, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji aspek sosial, kelembagaan, dan dinamika kekuasaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata bahari secara lebih komprehensif.

Implementasi *Community-Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan pariwisata bahari menunjukkan kontribusi yang bermakna terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan aktivitas pariwisata, masyarakat pesisir memperoleh akses terhadap beragam peluang ekonomi baru, antara lain pada sektor jasa transportasi laut, penyediaan akomodasi berbasis lokal, layanan pemandu wisata, pemasaran produk-produk lokal, serta berbagai bentuk layanan pendukung pariwisata lainnya. Diversifikasi mata pencaharian ini berperan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan tradisional yang cenderung rentan terhadap perubahan musim dan dinamika lingkungan. Lebih lanjut, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam penelitian tersebut memperlihatkan kecenderungan terbentuknya model pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Model ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung implementasi CBT, terutama melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, serta perumusan kebijakan yang berpihak pada penguatan peran komunitas lokal. Meskipun demikian, keberlanjutan pengelolaan pariwisata bahari berbasis masyarakat mensyaratkan adanya kerja sama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sinergi antaraktor ini dipandang krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian sumber daya pesisir, sehingga pengembangan pariwisata bahari dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2021) dengan judul *Sinergi Pembangunan Wisata Bahari Berkelanjutan dalam Perspektif Pemerintahan*. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan wisata bahari yang berkelanjutan mensyaratkan adanya sinergi yang kuat dan berkesinambungan antarberbagai tingkatan pemerintahan serta para pemangku kepentingan terkait. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengembangan wisata bahari tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, melainkan membutuhkan koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal sebagai aktor utama di tingkat tapak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas pembangunan wisata bahari, yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, menuntut penerapan pendekatan *governance* yang holistik dan berorientasi pada keberlanjutan. Ketidakhadiran sinergi dan koordinasi yang efektif antarpemangku kepentingan berpotensi memunculkan tumpang tindih kebijakan, konflik kepentingan, serta degradasi sumber daya lingkungan pesisir yang pada akhirnya menghambat keberlanjutan pembangunan wisata bahari dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan guna memastikan bahwa pengembangan wisata bahari tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Dalam konteks pembangunan wisata bahari berkelanjutan, pemerintah menempati posisi strategis sebagai aktor kunci dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan para pemangku kepentingan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan sektor swasta, masyarakat lokal, kalangan akademisi, serta organisasi non-pemerintah dalam satu kerangka visi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Peran koordinatif ini mencakup proses harmonisasi regulasi, pengalokasian sumber daya secara adil dan proporsional, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan di tingkat operasional.

Efektivitas peran koordinasi pemerintah menjadi determinan penting dalam mewujudkan ekosistem wisata bahari yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung prinsip tanggung jawab lingkungan dan keadilan sosial. Dengan koordinasi yang kuat dan inklusif, pembangunan wisata bahari berpotensi menciptakan keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem pesisir, dan pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan wisata bahari berkelanjutan dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan institusional yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, tumpang tindih dan konflik regulasi antarlevel pemerintahan, serta adanya resistensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam pengelolaan wilayah pesisir. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pelaksanaan program wisata bahari yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat lokal terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta keterbatasan kapasitas teknis dan administratif aparatur pemerintah, turut memperlemah efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan potensi wisata bahari, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berjangka panjang, guna memastikan bahwa pengembangan wisata bahari dapat dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan dimensi keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Model *governance* yang diusulkan dalam pembangunan wisata bahari berkelanjutan mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* sebagai fondasi utama dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Model ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, partisipasi aktif masyarakat, serta responsivitas terhadap dinamika lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat pesisir. Penerapan model *governance* tersebut mensyaratkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan guna memastikan bahwa arah pembangunan wisata bahari tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Selain itu, pendekatan ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen adaptif yang memungkinkan penyesuaian kebijakan dan strategi pembangunan berdasarkan perubahan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terjadi di tingkat lokal. Dengan demikian, model *governance* tidak bersifat statis, melainkan mampu merespons dinamika dan kompleksitas pengelolaan wilayah pesisir secara kontekstual.

Sejalan dengan hal tersebut, strategi penguatan sinergi antaraktor dalam pembangunan wisata bahari diarahkan pada pengembangan kelembagaan yang kuat dan inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem informasi yang terintegrasi. Strategi ini juga mencakup perumusan indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai instrumen untuk menilai efektivitas sinergi dan tingkat keberlanjutan pembangunan wisata bahari. Penguatan kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dipandang sebagai elemen kunci dalam membangun ekosistem wisata bahari yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan.

Implementasi strategi penguatan sinergi tersebut menuntut adanya komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, disertai dengan alokasi sumber daya yang memadai, guna menjamin kesinambungan dan konsistensi program pembangunan wisata bahari berkelanjutan.

Penelitian terdahulu keenam dilakukan oleh Nurdin, N. dan Wahyuni, S. dengan judul *Marine Ecotourism and Coastal Livelihood: A Sustainable Pathway for Small Island Communities*. Studi ini mengkaji peran ekowisata bahari sebagai alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, khususnya komunitas pulau-pulau kecil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata bahari berbasis konservasi dan kearifan lokal berkontribusi terhadap

penguatan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung upaya pelestarian sumber daya laut.

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Barrang Caddi, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara langsung dan wawancara mendalam dengan masyarakat lokal, tokoh adat, serta perwakilan pemerintah daerah, yang diperkaya melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi sumber daya laut sebagai basis pengembangan wisata bahari. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menelaah keterkaitan antara pengembangan ekowisata bahari dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat masih didominasi oleh aktivitas nelayan tradisional dengan tingkat pendapatan yang relatif mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang kuat, yang kemudian diposisikan sebagai daya tarik wisata. Kondisi ini mencerminkan adanya sinergi positif antara pelestarian budaya lokal dan pengembangan potensi ekonomi berbasis pariwisata.

Daya tarik utama kawasan ini terletak pada kekayaan sumber daya laut yang masih terjaga, terutama ekosistem terumbu karang dan hamparan pasir putih yang alami. Keindahan alam tersebut menjadi modal utama dalam pengembangan wisata bahari. Citra lingkungan alam yang lestari, yang dipadukan dengan kekhasan budaya lokal, memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menarik kunjungan wisatawan serta memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi wisata sekaligus kawasan konservasi.

Berdasarkan temuan empiris, komunitas pulau kecil mampu meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi wisata bahari yang dikelola secara berbasis komunitas. Pengelolaan yang mengintegrasikan kekayaan budaya, keindahan alam, dan sinergi antar nelayan terbukti menyediakan alternatif sumber pendapatan yang relatif berkelanjutan. Dalam konteks ini, pelestarian ekosistem laut tidak dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai penggerak utama dalam mendukung ekonomi lokal.

Penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan pariwisata bahari dijadikan sebagai model pembangunan sosial-ekonomi masyarakat pulau kecil yang berorientasi pada keberlanjutan. Implementasi model tersebut memerlukan pengelolaan yang partisipatif, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi masyarakat, serta dukungan berkelanjutan terhadap pelestarian budaya dan ekosistem laut. Dengan strategi tersebut, wisata bahari diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan konservasi lingkungan dalam jangka panjang.

1.2.2 Posisi Penelitian (*Novelty*)

Tabel 1.1 Penelitian Terkait Sebelumnya

No	Pene- liti	Loka- si	Teori & Konsep	Fokus Obyek Kajian	Temuan Utama	Keterbatasa- n Penelitian	Posisi Disertasi
1	Rullyana Puspitaningrum Mamengko (2021)	Pantai Utara Jawa Tengah	<i>Community- Based Tourism</i> (CBT)	Pengelolaan pariwisata bahari berbasis masyarakat	CBT meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir melalui partisipasi dan diversifikasi pendapatan	Fokus dominan pada aspek ekonomi; belum mengkaji dinamika kelembagaan dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan CBT	Disertasi mengkaji CBT dengan menekankan dimensi kelembagaan, governance, dan relasi aktor dalam konteks sosial-budaya lokal
2	Wahyu Eko Pujianto	Kabupaten Sidoarjo	Ekowisata Bahari	Pemulihan ekonomi masyarakat pesisir pasca Covid-19	Kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan ekowisata bahari	Pendekatan bersifat kebijakan-top down; partisipasi dan perspektif masyarakat lokal belum dieksplorasi secara mendalam	Disertasi menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan pariwisata bahari
3	Trenggono, S. W.	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Ekonomi Biru dan Desa Wisata Bahari	Pengembangan desa wisata bahari berbasis konservasi	Wisata bahari berpotensi menjadi pilihan utama ekonomi masyarakat pesisir	Relasi antara konservasi, ekonomi, dan praktik sosial masyarakat belum dianalisis secara mendalam	Disertasi mengelaborasi integrasi ekonomi, konservasi, dan praktik sosial melalui pendekatan kualitatif kontekstual
4	Suantri, P.	Thailand	CBT dan Modal Sosial	Pariwisata berbasis komunitas	Kepercayaan dan partisipasi memperkuat keberlanjutan	Konteks lokal Indonesia tidak menjadi fokus; aspek kelembagaan formal kurang dibahas	Disertasi mengadaptasi konsep modal sosial CBT ke dalam konteks sosial-budaya dan

					utan CBT		kelembagaan lokal Indonesia
5	Herma wan (2021)	Indon esia	<i>Governance</i> Wisata Bahari Berkela njukan	Sinergi antarle vel pemer intahan dan stakeh older	Sinergi lintas sektor menentu kan keberlanj utan wisata bahari	Kurang mengeksplor asi dinamika aktor di tingkat komunitas pesisir	Disertasi memperdalam analisis governance pada level komunitas dan interaksi antaraktor lokal
6	Nurdin , N. & Wahy uni, S.	Pula u Barr ang Cad di, Sula wesi Sela tan	Ekowis ata Bahari dan Mata Penca harian Pesisir	Ekowis ata berbasi s konser vasi dan kearifan lokal	Ekowis ata meningk atkan pendapa tan dan menjaga ekosiste m laut	Analisis belum mengaitkan secara eksplisit model governance dan keberlanjutan kelembagaan	Disertasi mengintegrasik an ekowisata, CBT, dan governance dalam satu kerangka analisis berkelanjutan

Sumber : Olah Data Peneliti 2025

Berdasarkan tabel ringkasan penelitian terdahulu di atas dapat dipahami bahwa pengembangan pariwisata bahari dan ekowisata pesisir secara konsisten diposisikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian Mamengko (2021) dan Suansri (2003) menekankan pendekatan *Community-Based Tourism* sebagai fondasi utama pemberdayaan masyarakat, di mana partisipasi, kepercayaan, dan kontrol komunitas lokal menjadi elemen kunci keberhasilan pengelolaan pariwisata.

Sementara itu, penelitian Pujiyanto menyoroti peran ekowisata bahari dalam konteks pemulihan ekonomi pasca krisis, dengan penekanan pada pentingnya intervensi kebijakan pemerintah sebagai faktor pendukung utama. Di sisi lain, Trenggono mengintegrasikan perspektif ekonomi biru yang menghubungkan secara langsung antara pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan upaya konservasi lingkungan laut melalui pengembangan desa wisata bahari.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan fokus pada aspek ekonomi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, sebagian besar kajian masih menempatkan pendekatan CBT, ekowisata, dan ekonomi biru secara terpisah, serta belum secara mendalam mengelaborasi dinamika *governance*, relasi kekuasaan, dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam konteks sosial-budaya lokal. Celah inilah yang kemudian menjadi pijakan konseptual bagi disertasi ini untuk mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Pemetaan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian pariwisata bahari dan ekowisata pesisir umumnya menekankan aspek peningkatan ekonomi masyarakat, partisipasi komunitas, dan konservasi lingkungan. Meskipun demikian,

sebagian besar penelitian tersebut masih membahas dimensi-dimensi tersebut secara parsial dan belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek *governance*, kelembagaan lokal, serta relasi kekuasaan antaraktor dalam pengelolaan wisata bahari. Selain itu, keterlibatan masyarakat pesisir sering kali diposisikan sebagai objek kebijakan atau penerima manfaat, bukan sebagai aktor sosial yang memiliki kapasitas, kepentingan, dan strategi dalam membentuk arah pembangunan wisata bahari. Oleh karena itu, disertasi ini mengambil posisi untuk mengisi celah kajian tersebut dengan mengembangkan analisis kualitatif yang menekankan integrasi antara *community-based tourism*, ekowisata bahari, dan *governance* berkelanjutan dalam konteks sosial-budaya lokal masyarakat pesisir.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian disertasi ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara mendalam realitas ekonomi masyarakat pesisir dalam konteks pengembangan usaha alternatif berbasis pariwisata bahari. Studi ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji model pengembangan ekonomi masyarakat pesisir di desa Mallasoro, Kabupaten Jeneponto, dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayahnya.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada sejumlah persoalan mendasar yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro dalam konteks kehidupan sosial dan mata pencaharian sehari-hari?
- b. Bagaimana potensi usaha-usaha alternatif berbasis pariwisata bahari dipersepsikan, dimanfaatkan, dan dikembangkan oleh masyarakat pesisir desa Mallasoro?
- c. Bagaimana model pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui usaha alternatif berbasis pariwisata bahari yang dapat dirumuskan dengan bertumpu pada kekuatan modal sosial masyarakat setempat?

Rumusan masalah tersebut diharapkan mampu mengungkap dinamika ekonomi lokal, relasi sosial, serta praktik-praktik ekonomi masyarakat pesisir secara kontekstual dan holistik.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis pariwisata bahari di desa Mallasoro, Kabupaten Jeneponto. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro dalam kaitannya dengan struktur mata pencaharian, tingkat pendapatan, serta strategi bertahan hidup masyarakat.
- b. Mengidentifikasi dan menggali potensi usaha-usaha alternatif berbasis pariwisata bahari yang dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
- c. Merumuskan model atau skema pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui usaha alternatif berbasis pariwisata bahari dengan pendekatan modal

sosial, sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir desa Mallasoro.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan pembangunan pesisir yang berorientasi pada penguatan modal sosial masyarakat lokal, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.
- 2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan kajian pendidikan dan ilmu sosial, khususnya terkait inovasi dan strategi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengelolaan usaha-usaha alternatif berbasis pariwisata bahari.
- 3) Menjadi rujukan akademik dan pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis pariwisata bahari, serta memperkaya khazanah kajian ilmiah di bidang pembangunan masyarakat pesisir.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana penyelesaian studi program doktoral sekaligus memperkaya wawasan dan pengalaman empiris mengenai kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat pesisir dalam kerangka penguatan modal sosial dan penciptaan usaha-usaha ekonomi baru.
- 2) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperluas diskursus mengenai model pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi dan usaha alternatif berbasis pariwisata bahari, khususnya dalam konteks masyarakat pesisir desa Mallasoro, Kabupaten Jeneponto.
- 3) Bagi pemerintah pusat dan daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan relasi antara kondisi struktural wilayah pesisir, praktik sosial masyarakat, dan peluang pengembangan ekonomi alternatif berbasis pariwisata bahari dalam konteks kehidupan masyarakat pesisir desa Mallasoro, Kabupaten Jeneponto. Pada lapisan paling luar, wilayah pesisir dipahami sebagai ruang sosial yang dibentuk oleh kekayaan sumber daya alam bahari, ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan tradisional, tekanan

ekologis akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim, serta ketimpangan orientasi kebijakan pembangunan yang cenderung bersifat top-down.

Kondisi struktural tersebut membentuk realitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang ditandai oleh kemiskinan multidimensional, ketidakpastian pendapatan nelayan, keterbatasan akses terhadap modal dan pasar, serta relasi ketergantungan dalam sistem patron–klien. Realitas ini tidak hanya hadir sebagai persoalan ekonomi, tetapi dialami sebagai pengalaman hidup sehari-hari yang mempengaruhi cara masyarakat memaknai penghidupan, risiko, dan peluang ekonomi yang tersedia.

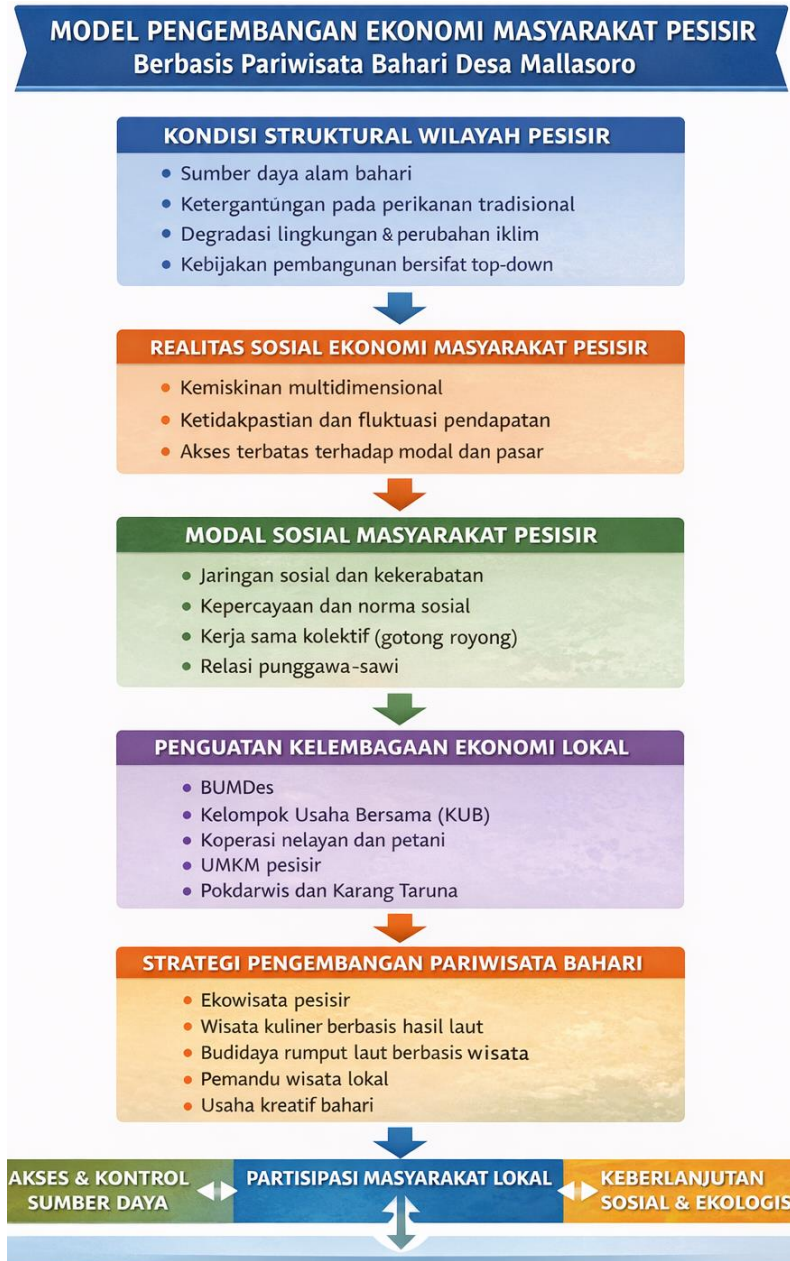
Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat pesisir mengembangkan berbagai praktik sosial dan strategi penghidupan yang bersifat adaptif, baik melalui aktivitas penangkapan ikan, budidaya rumput laut, maupun usaha ekonomi lain yang berbasis pada pengetahuan lokal dan nilai budaya kenelayanan. Praktik-praktik ini tidak bersifat statis, melainkan terbentuk melalui interaksi dinamis antara tekanan struktural dan agensi masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan hidup rumah tangga.

Pada inti kerangka konseptual ini terletak modal sosial masyarakat pesisir, yang dipahami sebagai sumber daya aktual dan potensial yang melekat pada jaringan relasi sosial, kepercayaan, norma, dan praktik kerja sama yang terinstitusionalisasi. Modal sosial berfungsi sebagai penghubung antara keterbatasan struktural dan peluang ekonomi baru, sekaligus sebagai prasyarat bagi munculnya inisiatif kolektif dalam pemanfaatan potensi sumber daya pesisir secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Modal sosial tersebut memediasi pemanfaatan potensi usaha-usaha alternatif berbasis pariwisata bahari, seperti ekowisata pesisir dan mangrove, wisata kuliner berbasis hasil laut, budidaya rumput laut berbasis wisata, jasa pemandu wisata lokal, serta berbagai bentuk usaha kreatif berbasis sumber daya bahari. Pemanfaatan potensi ini tidak dipahami sebagai proses teknokratis semata, melainkan sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan ruang dan sumber daya pesisir. Relasi kuasa tersebut menentukan sejauh mana masyarakat pesisir memiliki akses, kontrol, dan posisi tawar dalam pengembangan pariwisata bahari. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan ekonomi berbasis pariwisata bahari tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana masyarakat lokal diposisikan sebagai subjek pembangunan dan terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Keseluruhan relasi tersebut bermuara pada perumusan Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Pariwisata Bahari yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berkeadilan. Model ini menekankan diversifikasi sumber penghidupan tanpa menegasikan mata pencaharian utama masyarakat, memperkuat kapasitas dan kemandirian ekonomi lokal, serta menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis wilayah pesisir. Kerangka konseptual ini menjadi dasar analisis kualitatif untuk memahami dinamika ekonomi, relasi sosial, dan praktik kehidupan masyarakat pesisir desa Mallasoro secara holistik.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

BAB II

KONDISI EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DESA MALLASORO

2.1 Abstrak

Kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro dicirikan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut sebagai basis utama penghidupan. Sebagian besar rumah tangga menggantungkan pendapatan pada sektor perikanan tangkap tradisional, budidaya rumput laut, dan usaha tambak ikan serta udang yang bersifat musiman, fluktuatif, dan rentan terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan pesisir. Struktur ekonomi tersebut membentuk pola kerentanan ekonomi yang ditandai oleh pendapatan rendah dan tidak stabil, keterbatasan akses terhadap modal dan pasar, serta lemahnya posisi tawar masyarakat dalam rantai nilai ekonomi kelautan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan antar pelaku usaha, terutama antara pemilik modal dan pelaku usaha skala kecil serta buruh nelayan dan buruh tambak. Untuk merespons kondisi tersebut, masyarakat mengembangkan strategi adaptif melalui diversifikasi mata pencaharian dan usaha sampingan yang berfungsi sebagai penyangga ekonomi rumah tangga, terutama pada musim paceklik. Namun, kontribusi strategi ini masih terbatas dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa modal sosial dan kearifan lokal memiliki potensi signifikan dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal akibat lemahnya kelembagaan ekonomi lokal dan rendahnya sinergi antar aktor. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan berbasis modal sosial dan diversifikasi penghidupan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro.

Kata Kunci: *Masyarakat Pesisir, Kondisi Ekonomi, Modal Sosial, Diversifikasi Penghidupan, Ketahanan Ekonomi, Desa Mallasoro.*

2.2 Pendahuluan

Masyarakat pesisir desa Mallasoro merupakan bagian dari komunitas sosial yang kehidupan ekonominya sangat bergantung pada dinamika sumber daya pesisir dan laut. Karakteristik wilayah pesisir yang bersifat terbuka, rentan terhadap perubahan lingkungan, serta dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan, membentuk pola mata pencaharian dan strategi bertahan hidup masyarakat secara khas. Dalam konteks ini, laut tidak hanya dipandang sebagai ruang produksi ekonomi, bagi mereka tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya yang membentuk identitas serta relasi sosial masyarakat pesisir.

Kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro secara umum ditandai oleh dominasi sektor perikanan tangkap tradisional sebagai sumber mata pencaharian utama. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor musim, kondisi cuaca, ketersediaan sumber daya laut, serta akses terhadap sarana dan prasarana produksi. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor perikanan tradisional menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung fluktuatif dan rentan terhadap berbagai bentuk ketidakpastian, baik yang bersifat alamiah maupun struktural.

Di sisi lain, masyarakat pesisir desa Mallasoro juga memperlihatkan adanya upaya adaptasi ekonomi melalui diversifikasi mata pencaharian, baik dalam sektor kelautan maupun non-kelautan. Sebagian masyarakat mulai mengembangkan usaha-usaha alternatif seperti pengolahan hasil laut, perdagangan skala kecil, jasa berbasis pesisir, serta keterlibatan dalam aktivitas ekonomi berbasis pariwisata bahari. Namun demikian, proses diversifikasi tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan modal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dan kebijakan. Pendahuluan bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro sebagai konteks sosial dari penelitian ini. Pemahaman terhadap struktur ekonomi, pola mata pencaharian, serta strategi ekonomi masyarakat menjadi penting untuk menjelaskan dinamika sosial yang berkembang di tingkat lokal. Dengan memahami kondisi ekonomi masyarakat pesisir secara komprehensif, bab ini menjadi landasan analitis bagi pembahasan selanjutnya mengenai potensi, tantangan, dan peluang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

2.3 Landasan Teori

Dalam menganalisis kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro ini akan melibatkan pemahaman dan penerapan berbagai kajian literature serta konsep teori yang terkait. Olehnya itu kerangka teori berikut menjadi panduan peneliti dalam memahami hubungan antara kondisi ekonomi, strategi diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir di desa Mallasoro, sekaligus menjadi dasar analisis untuk merekomendasi pengembangan ilmiah dan kontekstual.

2.3.1 Ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam kajian pembangunan sosial dan ekonomi, masyarakat pesisir dipahami sebagai kelompok sosial yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya laut dan wilayah pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketergantungan ini membentuk karakter ekonomi yang khas, ditandai oleh pola mata pencaharian berbasis sumber daya alam, tingkat ketidakpastian pendapatan yang tinggi, serta kerentanan terhadap perubahan lingkungan dan struktur pasar (Satria, 2015). Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat pesisir tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial, sistem kelembagaan lokal, serta struktur kekuasaan yang mengatur akses terhadap sumber daya dan distribusi manfaat ekonomi.

Menurut Kusnadi (2003), ekonomi masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional ditandai oleh **pendapatan yang fluktuatif, bersifat musiman, dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam**, seperti cuaca, musim angin, dan ketersediaan sumber daya ikan. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga nelayan, sehingga mereka cenderung mengembangkan strategi bertahan hidup (survival strategies) seperti diversifikasi pekerjaan, utang kepada punggawa atau tengkulak, serta pemanfaatan jaringan sosial sebagai penyangga ekonomi. Kusnadi menegaskan bahwa kemiskinan nelayan bukan semata-mata

akibat rendahnya etos kerja, melainkan merupakan **kemiskinan struktural** yang terbentuk dari ketimpangan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.

Satria (2015) dalam kajiannya mengenai politik kelautan dan perikanan menekankan bahwa struktur ekonomi pesisir bersifat **relasional**, di mana nelayan kecil berada dalam posisi subordinat terhadap aktor-aktor ekonomi yang menguasai modal dan jaringan pemasaran. Relasi punggawa–sawi, pedagang perantara, dan lembaga keuangan informal membentuk sistem ekonomi yang ambivalen: di satu sisi memberikan akses terhadap modal dan jaminan sosial, namun di sisi lain menciptakan ketergantungan jangka panjang yang menghambat mobilitas ekonomi nelayan. Dalam konteks ini, ekonomi pesisir tidak dapat dipahami hanya melalui indikator pendapatan, tetapi juga melalui relasi kuasa dan mekanisme distribusi sumber daya.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, Nikijulw (2002) menjelaskan bahwa rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir berkaitan erat dengan lemahnya kelembagaan ekonomi lokal. Ketiadaan atau lemahnya koperasi nelayan, akses terbatas terhadap lembaga keuangan formal, serta belum optimalnya peran kelembagaan desa menyebabkan masyarakat pesisir bergantung pada sistem informal yang sering kali tidak berpihak pada nelayan kecil. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal baik formal maupun informal menjadi kunci dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Chambers (1987) dalam kerangka *poverty and vulnerability* menjelaskan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multidimensional, tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan aset produktif, kerentanan terhadap guncangan eksternal, serta minimnya kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks masyarakat pesisir, kerentanan tersebut diperparah oleh degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta tekanan pasar global yang semakin kompetitif. Kerangka ini relevan untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro yang menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan dan keterbatasan alternatif mata pencaharian.

Dalam pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*), ekonomi masyarakat pesisir dipandang sebagai sistem yang dapat diperkuat melalui pemanfaatan potensi lokal, penguatan modal sosial, dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi komunitas (Friedmann, 1992; Ife & Tesoriero, 2008 – terjemahan Indonesia). Modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma gotong royong merupakan aset penting yang memungkinkan masyarakat pesisir bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam banyak komunitas pesisir, termasuk desa Mallasoro, modal sosial tersebut terwujud dalam bentuk kerja kolektif, sistem bagi hasil, dan solidaritas komunitas.

Selain itu, konsep **diversifikasi ekonomi pesisir** menjadi salah satu kerangka penting dalam analisis kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Satria (2009) menyatakan bahwa ketergantungan pada satu jenis mata pencaharian utama, seperti penangkapan ikan, meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga nelayan. Oleh karena itu, diversifikasi melalui budidaya laut, pengolahan hasil perikanan, usaha mikro berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata bahari berbasis masyarakat

dipandang sebagai strategi adaptif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi pesisir. Diversifikasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kondisi ekonomi masyarakat pesisir harus dipahami secara integratif dengan dimensi sosial, budaya, dan ekologis. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan kearifan lokal dan daya dukung lingkungan berpotensi memperparah kerentanan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi pesisir yang berkelanjutan menuntut keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan, pelestarian ekosistem laut, dan penguatan kelembagaan lokal (Nikijuluw, 2002; Satria, 2015).

2.3.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir: Kerentanan Struktural dan Ketergantungan Sumber Daya Alam

Secara teoritik, kondisi ekonomi masyarakat pesisir kerap dipahami sebagai bentuk **ekonomi subsisten dan semi-komersial** yang sangat bergantung pada sumber daya alam laut dan pesisir. Ketergantungan ini menjadikan struktur ekonomi masyarakat pesisir rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan musim, cuaca ekstrem, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan ekologis (Dahuri, 2003). Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi nelayan dan pembudidaya tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka, melainkan dipengaruhi oleh dinamika alam dan pasar yang tidak selalu berpihak pada pelaku usaha kecil. Hal tersebut menjelaskan mengapa pendapatan masyarakat pesisir cenderung bersifat tidak stabil dan musiman. Dahuri (2003) menegaskan bahwa *“sebagian besar masyarakat pesisir hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, teknologi, dan modal usaha”*. Kerentanan struktural ini tidak hanya bersumber dari faktor alam, tetapi juga dari ketimpangan relasi ekonomi antara nelayan kecil dengan pemodal, tengkulak, dan pelaku pasar skala besar.

2.3.3 Ekonomi Pesisir dan Fenomena Kemiskinan Struktural.

Dalam kajian sosiologi pembangunan, kemiskinan masyarakat pesisir sering dipahami sebagai **kemiskinan struktural**, bukan semata-mata akibat rendahnya etos kerja atau keterbatasan keterampilan individu (Kusnadi, 2009). Kemiskinan ini lahir dari struktur sosial-ekonomi yang membatasi akses nelayan terhadap modal, teknologi, dan pasar. Nelayan kecil dan pembudidaya skala rumah tangga berada pada posisi tawar yang lemah dalam rantai produksi dan distribusi hasil perikanan. Kusnadi (2009) menyatakan bahwa *“kemiskinan nelayan tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang timpang, di mana nelayan kecil berada pada posisi subordinat dalam hubungan produksi dan pemasaran”*. Kondisi ini menyebabkan surplus ekonomi yang dihasilkan dari sektor pesisir lebih banyak dinikmati oleh aktor-aktor di luar komunitas nelayan itu sendiri.

2.3.4 Akses Modal dan Kelembagaan Ekonomi Lokal.

Teori pembangunan berbasis kelembagaan menekankan bahwa keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal merupakan salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (Uphoff, 1992). Nelayan dan petani pesisir umumnya tidak memiliki agunan, pendapatan tetap, maupun administrasi keuangan yang disyaratkan oleh perbankan formal. Akibatnya,

mereka cenderung bergantung pada sumber modal informal yang seringkali bersifat eksploitatif. Dalam konteks ini, keberadaan kelembagaan ekonomi lokal seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), koperasi nelayan, dan kelompok tani menjadi sangat strategis. Kelembagaan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kolektif untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) dan memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir. Uphoff (1992) menegaskan bahwa *kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat dengan struktur pembangunan formal*.

2.3.5 Strategi Nafkah Ganda (Livelihood Diversification).

Teori *livelihood diversification* menjelaskan bahwa rumah tangga pesisir umumnya mengembangkan strategi nafkah ganda sebagai respon terhadap ketidakpastian ekonomi (Ellis, 2000). Nelayan tidak hanya bergantung pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan lain seperti budidaya rumput laut, pertanian lahan pesisir, pengolahan hasil perikanan, hingga usaha kecil non-perikanan. Ellis (2000) menyebutkan bahwa *“diversifikasi mata pencaharian merupakan strategi rasional rumah tangga miskin untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan ekonomi”*. Dalam konteks Desa Mallasoro, praktik diversifikasi ekonomi ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi sosial-ekonomi masyarakat pesisir dalam menghadapi ketidakpastian musim dan fluktuasi pendapatan.

2.3.6 Pemberdayaan Ekonomi dan Pendekatan Partisipatif.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek program (Friedmann, 1992). Pemberdayaan ekonomi bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan ekonomi, serta membangun kemandirian melalui kelembagaan lokal yang partisipatif. Friedmann (1992) menekankan bahwa *“pemberdayaan ekonomi hanya dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kontrol terhadap sumber daya produktif dan institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka”*. Oleh karena itu, penguatan kelompok usaha tani dan nelayan di Desa Mallasoro dapat dipahami sebagai strategi struktural untuk meningkatkan daya tawar ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperluas akses terhadap program pembangunan.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini bertolak dari pemahaman bahwa kondisi ekonomi masyarakat pesisir tidak dapat dilepaskan dari karakteristik struktural wilayah pesisir yang ditandai oleh ketergantungan tinggi pada sumber daya laut, ketidakpastian musim, keterbatasan akses modal, serta fluktuasi pasar hasil perikanan. Dalam konteks desa Mallasoro, kondisi tersebut membentuk pola kehidupan masyarakat yang bersifat rentan namun adaptif, dengan strategi ekonomi yang berkembang berdasarkan pengalaman, pengetahuan lokal, dan relasi sosial yang terbangun secara turun-temurun. Masyarakat pesisir desa Mallasoro berperan sebagai aktor ekonomi utama yang terdiri atas nelayan, petani rumput laut, pengelola tambak, pelaku UMKM, perempuan pesisir, dan generasi muda. Aktor-aktor ini

mengembangkan berbagai strategi penghidupan yang tidak hanya bertumpu pada satu sumber pendapatan, tetapi juga melalui diversifikasi usaha dan pemanfaatan kerja keluarga sebagai bentuk adaptasi terhadap risiko ekonomi pesisir.

Dalam proses tersebut, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional menjadi modal sosial yang penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Pengetahuan tentang navigasi laut, musim penangkapan, teknik budidaya, serta nilai-nilai gotong royong dan kepercayaan sosial berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sekaligus pengaman sosial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Modal sosial ini memperkuat kohesi sosial dan membentuk pola relasi ekonomi yang khas, seperti sistem punggawa–sawi dan praktik kerja kolektif.

Keberadaan kelembagaan ekonomi lokal, baik formal maupun informal, seperti BUMDes, kelompok usaha tani dan nelayan, koperasi formal dan informal, organisasi UMKM, Pokdarwis, serta Karang Taruna, menjadi faktor mediasi yang menentukan efektivitas strategi penghidupan masyarakat pesisir. Kelembagaan ini berperan dalam mengatur akses terhadap sumber daya, permodalan, pasar, serta peluang usaha alternatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi lokal.

Interaksi antara konteks pesisir, aktor ekonomi, modal sosial, dan kelembagaan lokal tersebut pada akhirnya membentuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro, yang tercermin dalam tingkat pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, ketahanan ekonomi, ketimpangan gender, serta keberlanjutan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan lokal membentuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Gambar 2.1 Integrasi Pemikiran



Sumber: Disusun
Oleh Penulis 2025

2.5 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia umumnya dicirikan oleh ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam, pendapatan yang fluktuatif, serta akses terbatas terhadap modal dan pasar. Studi Kusnadi (2003) tentang kehidupan sosial-ekonomi nelayan di wilayah pesisir Jawa Timur menemukan bahwa ketidakstabilan pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh musim penangkapan, cuaca, dan struktur pemasaran hasil tangkapan yang dikuasai oleh tengkulak. Penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan nelayan bersifat struktural dan berkaitan erat dengan lemahnya posisi tawar nelayan kecil dalam sistem ekonomi perikanan.

Kusnadi (2003) menyimpulkan bahwa “kemiskinan nelayan bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya produktivitas, melainkan oleh relasi sosial-ekonomi yang tidak seimbang antara nelayan dan pelaku pasar”. Temuan ini relevan untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro yang juga bergantung pada sektor perikanan dan budidaya berbasis musim.

Penelitian lain dilakukan oleh Satria (2009) yang mengkaji strategi adaptasi ekonomi nelayan kecil di wilayah pesisir Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nelayan mengembangkan strategi nafkah ganda seperti bekerja sebagai buruh tani, pembudidaya rumput laut, atau usaha kecil non-perikanan untuk mengatasi ketidakpastian pendapatan. Studi ini menekankan pentingnya diversifikasi mata pencaharian sebagai mekanisme bertahan hidup masyarakat pesisir.

Menurut Satria (2009), “strategi adaptasi ekonomi nelayan merupakan respons rasional terhadap ketidakpastian struktural yang melekat dalam usaha perikanan tangkap”. Pola adaptasi serupa juga dapat ditemukan pada masyarakat pesisir Desa Mallasoro yang tidak hanya mengandalkan satu jenis usaha ekonomi.

Penelitian oleh Dahuri dkk. (2004) mengenai pembangunan wilayah pesisir dan laut di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir tidak terlepas dari lemahnya kelembagaan ekonomi lokal. Studi ini menekankan bahwa kelompok nelayan dan koperasi pesisir memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses modal, teknologi, dan pasar bagi nelayan kecil. Namun, efektivitas kelembagaan tersebut sangat bergantung pada tingkat partisipasi anggota dan dukungan pemerintah lokal.

Dahuri dkk. (2004) menyatakan bahwa “penguatan kelembagaan ekonomi lokal merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan”. Temuan ini sejalan dengan kondisi Desa Mallasoro yang membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Selanjutnya, penelitian Raharjo (2011) tentang akses permodalan nelayan kecil di pesisir Sulawesi Selatan menemukan bahwa sebagian besar nelayan tidak mampu mengakses lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan dan pendapatan yang tidak tetap. Akibatnya, nelayan bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi. Penelitian ini menekankan pentingnya peran koperasi dan lembaga keuangan berbasis komunitas sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil.

Raharjo (2011) mengungkapkan bahwa “lembaga keuangan berbasis komunitas mampu menjadi solusi antara bagi nelayan kecil yang terpinggirkan dari sistem perbankan formal”. Temuan ini sangat relevan dengan upaya Desa Mallasoro dalam mengembangkan KUB yang berfungsi menyerupai koperasi nelayan.

Penelitian terbaru oleh Kurniawan dan Salim (2018) mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berbasis kelompok menunjukkan bahwa kelompok usaha tani dan nelayan yang dikelola secara partisipatif mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi anggota. Studi kualitatif ini menegaskan bahwa keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh kepercayaan sosial, kepemimpinan lokal, dan konsistensi pendampingan.

Kurniawan dan Salim (2018) menyatakan bahwa “pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada bantuan modal, tetapi juga pada penguatan relasi sosial dan kapasitas kelembagaan lokal”. Hal ini memberikan kerangka analitis untuk membaca dinamika ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro secara lebih mendalam.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro berada dalam pola umum masyarakat pesisir Indonesia, yaitu ditandai oleh ketergantungan terhadap sumber daya alam, kerentanan ekonomi, keterbatasan akses modal, serta pentingnya kelembagaan ekonomi lokal. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan dengan menempatkan Kelompok Usaha Tani dan Nelayan sebagai arena sosial-ekonomi yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sebagai ruang partisipasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tabel 2.1 Relevansi penelitian terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Desa Mallasoro
1	Kusnadi (2003)	<i>Akar Kemiskinan Nelayan</i>	Pesisir Jawa Timur	Kualitatif (studi kasus)	Kemiskinan nelayan bersifat struktural, dipengaruhi relasi tidak seimbang antara nelayan kecil dan tengkulak serta ketergantungan pada musim	Memberi kerangka analitis untuk memahami kerentanan ekonomi nelayan Mallasoro yang bergantung pada sumber daya laut dan sistem pemasaran lokal

2	Satria (2009)	<i>Ekologi Politik Nelayan</i>	Jawa Tengah	Kualitatif (wawancara mendalam & observasi)	Nelayan mengembangkan strategi nafkah ganda sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi dan tekanan struktural	Relevan dengan praktik diversifikasi usaha di Mallasoro (nelayan, rumput laut, UMKM, kerja informal)
3	Dahuri et al. (2004)	<i>Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu</i>	Indonesia (nasional)	Studi kebijakan & analisis deskriptif	Lemahnya kelembagaan ekonomi lokal menjadi faktor rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir	Menjadi dasar teoritik untuk menganalisis peran KUB, koperasi informal, dan UMKM di Desa Mallasoro
4	Raharjo (2011)	Akses Permodalan dan Kesejahteraan Nelayan Kecil	Sulawesi Selatan	Kualitatif	Nelayan kecil sulit mengakses lembaga keuangan formal dan bergantung pada pinjaman informal	Sangat relevan dengan keberadaan koperasi informal dan punggawa sebagai lembaga keuangan lokal di Mallasoro
5	Satria (2015)	<i>Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir</i>	Indonesia	Studi konseptual & empiris	Kearifan lokal dan modal sosial menjadi fondasi penting keberlanjutan ekonomi	Menguatkan analisis peran kearifan lokal dan relasi sosial ekonomi dalam menopang ekonomi Mallasoro

					masyarakat pesisir	
6	Kurniawan & Salim (2018)	Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Kelompok	Pesisir Indonesia	Kualitatif partisipatif	Kelompok usaha bersama meningkatkan pendapatan dan daya tawar jika dikelola partisipatif	Relevan dengan fungsi organisasi UMKM dan KUB sebagai arena pemberdayaan ekonomi di Mallasoro
7	Nurhayati (2020)	Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Nelayan	Pesisir Sulawesi	Kualitatif (studi fenomenologi)	Rumah tangga nelayan mengandalkan jaringan sosial dan kerja keluarga untuk bertahan secara ekonomi	Membantu membaca peran keluarga dan jaringan sosial dalam ekonomi rumah tangga masyarakat Mallasoro

Sumber: Olah Data Peneliti 2025

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi beberapa celah penelitian yang menjadi dasar penting bagi studi ini. **Pertama**, sebagian besar penelitian tentang ekonomi masyarakat pesisir masih berfokus pada nelayan sebagai aktor tunggal, sehingga belum sepenuhnya menangkap kompleksitas struktur ekonomi pesisir yang melibatkan berbagai aktor dan sektor usaha dalam satu komunitas desa. **Kedua**, kajian yang mengintegrasikan peran berbagai kelembagaan ekonomi lokal seperti kelompok usaha tani dan nelayan, koperasi informal, organisasi UMKM, serta lembaga sosial berbasis komunitas dalam satu kerangka analisis yang utuh masih relatif terbatas.

Ketiga, penelitian terdahulu umumnya menempatkan koperasi dalam kerangka formal, sementara praktik kelembagaan ekonomi informal yang hidup dan berfungsi nyata di masyarakat pesisir, seperti koperasi milik pribadi, punggawa, dan jaringan permodalan berbasis relasi sosial, belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif kualitatif. Padahal, lembaga-lembaga informal tersebut memiliki peran signifikan dalam menopang keberlangsungan ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir.

Keempat, kajian yang secara spesifik menggali dinamika ekonomi masyarakat pesisir di desa Mallasoro dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya lokalnya belum ditemukan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian

ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro melalui pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pengalaman subjektif pelaku ekonomi, praktik kelembagaan lokal, serta relasi sosial-ekonomi yang membentuk strategi penghidupan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

2.6 Metodologi

2.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro sebagai fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan sarat makna sosial, budaya, serta relasi kuasa antaraktor.

Dalam perspektif sosiologi, kondisi ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya dipahami sebagai persoalan pendapatan atau mata pencaharian semata, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara struktur ekonomi, kelembagaan lokal, modal sosial, kebijakan, serta strategi ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan realitas sosial sebagai sesuatu yang dibangun, dialami, dan dimaknai oleh subjek penelitian, bukan sekadar diukur secara kuantitatif. Secara epistemologis, penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivis-interpretatif, yang memandang pengetahuan sosial sebagai hasil dialog antara peneliti dan informan dalam konteks sosial tertentu (Lincoln & Guba, 1985; Creswell, 2016).

2.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai aktor utama yang terlibat secara langsung dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro. Keterlibatan tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir sebagai realitas yang hidup, dialami, dan dimaknai oleh para aktor lokal.

Data primer ini diperoleh secara langsung dari informan melalui:

a. Wawancara mendalam (in-depth interview),

Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan berbagai aktor ekonomi pesisir, antara lain nelayan tangkap, petani rumput laut dan tambak, perempuan pesisir, pemuda, pelaku UMKM, serta pengelola kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDes, KUB (kelompok tani/nelayan), dan koperasi sebagai Lembaga informal. Wawancara dilaksanakan secara fleksibel, baik di rumah informan, di lokasi aktivitas ekonomi (dipantai, tambak, rumah produksi), maupun di ruang-ruang sosial komunitas. Dalam praktiknya, peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara semi-terstruktur, tetapi juga membuka ruang dialog agar informan dapat menceritakan pengalaman hidup, strategi bertahan, serta persepsi mereka terhadap peran pemerintah dan kelembagaan sosial.

b. Observasi partisipatif,

Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti hadir dan terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro. Peneliti mengamati secara langsung berbagai aktivitas nelayan, petani rumput laut dan petani tambak guna memperoleh deskripsi mendalam mengenai dinamika, ekonomi, sosial dan budaya.

c. Diskusi informal dengan aktor ekonomi pesisir.

Diskusi informal dilakukan di berbagai ruang sosial tempat aktivitas ekonomi dan interaksi sosial berlangsung, seperti di peisisir dermaga saat nelayan mempersiapkan diri untuk melaut, di area tambak dan lokasi penjemuran rumput laut dan di rumah-rumah warga. Situasi non-formal ini memberi ruang bagi aktor ekonomi pesisir untuk menyampaikan pandangan, keluhan, dan strategi ekonomi mereka tanpa tekanan struktur wawancara yang kaku.

Melalui diskusi informal, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara masyarakat pesisir memaknai kondisi ekonomi yang mereka hadapi, termasuk ketidakpastian pendapatan akibat faktor musim, ketergantungan pada tengkulak atau punggawa, keterbatasan akses modal, serta dinamika relasi kuasa dalam kelembagaan ekonomi lokal. Dalam percakapan tersebut, aktor ekonomi pesisir seringkali mengaitkan pengalaman ekonomi mereka dengan nilai-nilai kearifan lokal, norma sosial, dan praktik gotong royong yang masih bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi informal ini juga membuka ruang bagi peneliti untuk menangkap dinamika internal kelompok, seperti perbedaan posisi antara nelayan pemilik alat tangkap dan nelayan buruh, antara petani rumput laut skala kecil dan pengelola tambak yang lebih mapan, serta antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga pesisir.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap realitas ekonomi pesisir sebagaimana dialami dan diceritakan oleh para pelaku utama, sekaligus memahami bagaimana mereka merumuskan strategi penghidupan dalam keterbatasan struktural dan peluang lokal yang tersedia.

2.6.3 Kriteria Pemilihan Informan.

Informan utama dalam penelitian ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, pengetahuan mendalam, serta pengalaman empiris para aktor dalam aktivitas ekonomi pesisir di desa Mallasoro. Pemilihan informan didasarkan pada prinsip *information-rich cases*, yaitu individu atau kelompok yang dianggap mampu memberikan informasi relevan, mendalam, dan kontekstual terkait kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Kelompok informan utama mencakup nelayan tangkap yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas penangkapan ikan di laut, baik nelayan pemilik alat tangkap maupun nelayan buruh (*sawi*). Nelayan dipilih karena mereka merupakan aktor sentral dalam struktur ekonomi pesisir dan paling terdampak oleh ketidakpastian musim, fluktuasi hasil tangkapan, serta dinamika pasar dan relasi dengan punggawa atau pedagang perantara. Selain nelayan tangkap, informan juga berasal dari petani rumput laut dan pengelola tambak, yang merupakan bagian penting dari diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro.

Perempuan pesisir, khususnya istri nelayan dan pelaku ekonomi rumah tangga, menjadi informan kunci untuk menggali peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga, baik melalui aktivitas produktif seperti pengolahan hasil laut, usaha kecil rumah tangga, maupun peran reproduktif dan pengelolaan keuangan keluarga.

Pemuda pesisir dipilih sebagai informan untuk memahami perspektif generasi muda terhadap peluang dan tantangan ekonomi pesisir, termasuk sikap mereka terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir, kecenderungan migrasi, serta keterlibatan dalam usaha kreatif, UMKM, dan keterlibatan dalam pengelolaan kelembagaan sosial. Kelompok ini dianggap penting dalam integrasi ekonomi di desa Mallasoro.

Informan selanjutnya mencakup pengelola kelembagaan ekonomi lokal, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Usaha Bersama (KUB) tani dan nelayan, koperasi formal maupun informal, serta pelaku dan pengurus UMKM. Mereka dipilih karena memiliki peran strategis dalam mengorganisasi aktivitas ekonomi, mengelola akses permodalan, memfasilitasi produksi dan pemasaran, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan program-program pemerintah dan lembaga eksternal. Selain aktor ekonomi, peneliti juga melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan sebagai informan pendukung. Tokoh masyarakat dipilih karena memiliki otoritas sosial, pengetahuan historis, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan informal di tingkat komunitas. Sementara itu, aparat desa dipilih untuk memperoleh informasi terkait kebijakan desa, program pembangunan, serta peran pemerintah desa dalam penguatan ekonomi pesisir dan pengelolaan kelembagaan lokal.

Olehnya itu kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini meliputi: (1) masyarakat desa yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi pesisir; (2) memiliki pengalaman yang cukup dan pengetahuan praktis terkait mata pencaharian utama maupun alternatif; (3) bersedia meluangkan waktu dan berpartisipasi secara aktif dalam proses penelitian; (4) memiliki kemampuan reflektif untuk menceritakan pengalaman dan pandangannya secara naratif; serta (5) mewakili keragaman posisi sosial, gender, usia, dan peran kelembagaan agar diperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang komprehensif dan berimbang.

Tabel 2.2 Informan Penelitian dan Kriteria Pemilihan Informan

No	Kategori Informan	Posisi/Peran Sosial	Kriteria Pemilihan Informan	Fokus Informasi yang Digali
1	Nelayan Tangkap	Nelayan pemilik alat tangkap dan nelayan buruh (ABK)	Berdomisili di Desa Mallasoro - Aktif sebagai nelayan minimal 5 tahun - Terlibat langsung dalam aktivitas penangkapan ikan - Bersedia diwawancarai secara mendalam	Pola mata pencaharian, strategi penghidupan, ketergantungan pada laut, dampak musim, relasi punggawa-sawi, akses pasar dan permodalan

2	Petani Rumput Laut	Pembudidaya rumput laut dan pengelola tambak	Memiliki atau mengelola lahan budidaya - Aktif berproduksi - Mengalami fluktuasi hasil dan harga - Berdomisili di wilayah pesisir desa	Diversifikasi ekonomi, pola produksi, risiko usaha, akses sarana produksi dan modal, keberlanjutan usaha
3	Perempuan Pesisir	Istri nelayan, pelaku usaha rumah tangga, pengolah hasil laut	Perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi rumah tangga - Memiliki peran ganda domestik- produktif - Aktif dalam UMKM atau usaha informal	Kontribusi ekonomi perempuan, pengelolaan keuangan keluarga, ketahanan ekonomi rumah tangga, ketimpangan ekonomi berbasis gender
4	Pemuda Pesisir	Pemuda nelayan, pelaku UMKM, atau tenaga kerja informal	Berusia 18–35 tahun - Tinggal di Desa Mallasoro - Terlibat atau tertarik pada aktivitas ekonomi pesisir	Persepsi terhadap pekerjaan pesisir, aspirasi ekonomi, kecenderungan migrasi, inovasi usaha, keberlanjutan generasi
5	Pengelola BUMDes	Direktur dan pengurus BUMDes	Terlibat aktif dalam pengelolaan BUMDes - Mengetahui program dan kebijakan ekonomi desa	Peran BUMDes, penguatan ekonomi lokal, dukungan usaha masyarakat, hambatan kelembagaan
6	Pengurus KUB Tani & Nelayan	Ketua, sekretaris, atau anggota aktif KUB	Terdaftar sebagai pengurus atau anggota aktif - Terlibat dalam kegiatan kelompok	Fungsi KUB, kerja sama ekonomi, akses bantuan, penguatan kapasitas anggota
7	Pengelola Koperasi	Pemilik/pengelola koperasi pribadi	Mengelola layanan permodalan masyarakat - Memiliki	Akses modal, mekanisme pinjaman, sistem

	Formal & Informal	dan koperasi desa	pengalaman dalam pembiayaan usaha pesisir	bagi hasil, relasi ekonomi informal
8	Pelaku & Pengurus UMKM	Pelaku usaha pengolahan hasil laut dan ekonomi kreatif	Memiliki usaha aktif - Tergabung dalam organisasi UMKM desa	Pengembangan usaha, pemasaran, inovasi produk, dukungan kelembagaan
9	Tokoh Masyarakat	Tokoh adat, tokoh agama, tokoh informal desa	Memiliki pengaruh sosial - Mengetahui dinamika sosial-ekonomi desa	Nilai lokal, norma sosial, perubahan ekonomi, legitimasi kelembagaan
10	Aparat Desa	Kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa	Terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa	Kebijakan desa, program pemberdayaan, sinergi kelembagaan ekonomi

Sumber: Disusun Oleh Peneliti 2025

2.6.4 Justifikasi Metodologis Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip **purposive sampling**, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan teoretis dan empiris yang relevan dengan fokus penelitian. Strategi ini dipandang paling tepat dalam penelitian kualitatif karena tujuan utama penelitian bukanlah generalisasi statistik, melainkan pendalaman makna, pemahaman konteks, serta pengungkapan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara komprehensif. Kategori informan yang dipilih mencerminkan keragaman aktor ekonomi pesisir yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan dan keberlanjutan kondisi ekonomi masyarakat desa Mallasoro. Nelayan tangkap, petani rumput laut, dan pengelola tambak diposisikan sebagai aktor ekonomi utama yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya pesisir dan laut. Kelompok ini menjadi sumber utama data mengenai pola mata pencaharian, ketergantungan terhadap musim, risiko ekonomi, serta strategi adaptasi yang dikembangkan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Perempuan pesisir dan pemuda pesisir dipilih sebagai informan kunci untuk menangkap dimensi gender dan generasi dalam ekonomi pesisir. Perempuan pesisir memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi rumah tangga melalui aktivitas ekonomi produktif dan reproduktif yang sering kali tidak tercatat secara formal, sementara pemuda pesisir merepresentasikan dinamika keberlanjutan ekonomi desa, pilihan kerja, serta kecenderungan migrasi dan diversifikasi usaha di tengah perubahan struktur ekonomi pesisir.

Pengelola BUMDes, KUB tani dan nelayan, koperasi formal dan informal, serta organisasi UMKM dipilih sebagai informan kelembagaan untuk memahami fungsi, peran, dan efektivitas kelembagaan ekonomi lokal dalam memperkuat akses permodalan, jaringan pasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelembagaan ini menjadi simpul penting yang menghubungkan aktor ekonomi pesisir dengan kebijakan pemerintah, program pembangunan, dan sumber daya eksternal, sehingga data dari kelompok ini diperlukan untuk mengkaji relasi antara struktur kelembagaan dan praktik ekonomi masyarakat.

Tokoh masyarakat dan aparat desa dilibatkan sebagai informan kontekstual untuk memperoleh perspektif normatif, historis, dan kebijakan terkait perubahan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Tokoh masyarakat memberikan pemahaman mengenai nilai, norma, dan kearifan lokal yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, sementara aparat desa berperan penting dalam menjelaskan arah kebijakan, prioritas pembangunan desa, serta bentuk intervensi pemerintah terhadap ekonomi pesisir.

Penentuan jumlah informan tidak ditetapkan secara kaku, melainkan mengikuti prinsip *theoretical saturation*, yakni pengumpulan data dilakukan hingga informasi yang diperoleh telah mencapai kejenuhan dan tidak lagi menghasilkan variasi temuan yang signifikan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan deskripsi mendalam, kontekstual, dan reflektif mengenai kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro, sekaligus menangkap relasi antara aktor, struktur kelembagaan, dan strategi penghidupan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2) Data sekunder

Selain data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi informal, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi pendukung untuk memperkuat analisis dan meningkatkan validitas temuan penelitian. Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks struktural, historis, dan kebijakan yang melatarbelakangi dinamika ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro, sekaligus sebagai bahan triangulasi terhadap data empiris di lapangan. Data sekunder pertama, bersumber dari dokumen resmi desa, meliputi profil desa Mallasoro, data kependudukan, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memahami karakteristik demografis masyarakat pesisir, struktur mata pencaharian, tingkat pendidikan, serta arah dan prioritas pembangunan desa yang berkaitan dengan sektor ekonomi pesisir. RPJMDes secara khusus menjadi rujukan penting untuk menelusuri bagaimana isu ekonomi pesisir diposisikan dalam kebijakan pembangunan desa, termasuk program pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan UMKM, dan penguatan kelembagaan lokal.

Sumber data sekunder kedua berasal dari laporan program pemerintah yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Laporan ini mencakup program pemberdayaan nelayan, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, pengelolaan wilayah pesisir, serta program pengentasan kemiskinan dan

perlindungan sosial bagi masyarakat pesisir. Data dari laporan program pemerintah digunakan untuk melihat keterkaitan antara kebijakan dan realitas ekonomi masyarakat pesisir di tingkat desa, termasuk kesesuaian, keberlanjutan, dan dampak implementasi program terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Data sekunder ketiga diperoleh dari dokumen kelembagaan lokal, seperti dokumen BUMDes, kelompok usaha bersama (KUB) tani dan nelayan, koperasi formal dan informal, organisasi UMKM, Pokdarwis, serta Karang Taruna. Arsip ini meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan kegiatan, laporan keuangan sederhana, serta notulen musyawarah dan rapat kelembagaan. Data tersebut digunakan untuk menelusuri dinamika kelembagaan ekonomi lokal, pola pengambilan keputusan, tingkat partisipasi anggota, serta peran kelembagaan dalam mendukung strategi penghidupan masyarakat pesisir.

Sumber data sekunder terakhir berasal dari literatur ilmiah, yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan kajian ekonomi masyarakat pesisir, pembangunan berbasis komunitas, modal sosial, dan kelembagaan lokal. Literatur ini digunakan sebagai landasan teoretis dan kerangka analitis untuk menafsirkan temuan lapangan, membangun sintesis konseptual, serta mengidentifikasi posisi dan kontribusi penelitian ini dalam khazanah keilmuan sosiologi dan studi pembangunan pesisir. Literatur berbahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Indonesia diprioritaskan untuk menjaga relevansi konteks lokal, meskipun sumber internasional yang relevan tetap digunakan sebagai pelengkap. Secara metodologis, penggunaan data sekunder dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer, tetapi juga sebagai instrumen triangulasi sumber untuk meningkatkan kredibilitas dan kedalaman analisis. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro, baik dari perspektif aktor lokal maupun struktur kebijakan dan kelembagaan yang melingkupinya.

Pengaitan Data Sekunder dengan Triangulasi dan Validitas Penelitian Pemanfaatan data sekunder memiliki peran strategis dalam menjamin validitas dan kredibilitas temuan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, data sekunder tidak diposisikan sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai instrumen triangulasi yang digunakan untuk mengonfirmasi, memperdalam, dan mengontekstualisasi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi informal dengan aktor ekonomi pesisir di desa Mallasoro.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dengan dokumen resmi desa, seperti profil desa, data kependudukan, RPJMDes, dan RKPDes. Langkah ini memungkinkan peneliti menilai konsistensi antara narasi pengalaman ekonomi masyarakat pesisir dengan arah kebijakan pembangunan desa serta kondisi struktural yang terdokumentasi secara formal. Sebagai contoh, pernyataan nelayan mengenai keterbatasan akses modal dan ketergantungan pada sistem informal dapat diverifikasi melalui arsip kelembagaan lokal, laporan unit simpan pinjam, dan dokumen perencanaan desa yang mencerminkan prioritas atau keterbatasan intervensi ekonomi formal. Selain itu,

triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara dan observasi lapangan dengan laporan program pemerintah dan data statistik daerah. Data BPS Kabupaten dan laporan program pemberdayaan pesisir berfungsi sebagai konteks makro yang memperkaya pemahaman terhadap dinamika ekonomi masyarakat pesisir di tingkat mikro. Perbandingan ini membantu peneliti menghindari bias subjektivitas informan serta memperkuat interpretasi temuan lapangan dalam kerangka struktural yang lebih luas.

Validitas penelitian juga diperkuat melalui triangulasi teori, yakni dengan mengaitkan temuan empiris dengan literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Buku, jurnal, dan laporan penelitian digunakan untuk menguji konsistensi temuan penelitian ini dengan konsep-konsep seperti strategi penghidupan, ekonomi rumah tangga pesisir, modal sosial, dan kelembagaan lokal. Dengan cara ini, analisis tidak berhenti pada deskripsi kontekstual, tetapi berkembang menjadi interpretasi teoretis. Dalam kerangka penelitian kualitatif, upaya validasi data dilakukan melalui prinsip *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Lincoln & Guba). Data sekunder berfungsi memperkuat *credibility* melalui pengecekan silang antar sumber, meningkatkan *dependability* dengan menyediakan jejak audit (audit trail) yang terdokumentasi, serta mendukung *confirmability* melalui keterlacakan antara data, analisis, dan kesimpulan penelitian. Dengan demikian, integrasi data sekunder dan data primer dalam penelitian ini secara metodologis memperkuat keabsahan temuan serta memastikan bahwa analisis kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro disusun secara sistematis, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tabel 2.3 Sumber Data Sekunder dan Fungsi Analisis Penelitian

No	Sumber Data Sekunder	Jenis Dokumen	Fungsi dalam Analisis Penelitian
1	Dokumen Desa	Profil Desa Mallasoro, data kependudukan, monografi desa	Memberikan gambaran umum kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, struktur demografi, mata pencaharian utama, dan karakteristik wilayah penelitian
2	Dokumen Perencanaan Desa	RPJMDes dan RKPDes Desa Mallasoro	Menganalisis arah kebijakan pembangunan desa, prioritas program ekonomi pesisir, serta komitmen desa terhadap pemberdayaan nelayan dan pengembangan UMKM
3	Laporan Program Pemerintah	Laporan program pemberdayaan nelayan, perikanan tangkap, budidaya rumput	Mengkaji keterkaitan antara kebijakan pemerintah dan realitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk efektivitas dan keberlanjutan program

		laut, dan pengembangan pesisir	
4	Arsip Kelembagaan Lokal	AD/ART, laporan kegiatan, notulen rapat BUMDes, KUB, koperasi, UMKM, Pokdarwis, Karang Taruna	Menelusuri peran, fungsi, dan dinamika kelembagaan ekonomi lokal dalam mendukung strategi penghidupan masyarakat pesisir
5	Laporan Keuangan Sederhana Kelembagaan	Catatan simpan pinjam, laporan unit usaha, catatan kas	Mengidentifikasi pola pengelolaan ekonomi kolektif, akses permodalan, serta distribusi manfaat ekonomi di tingkat komunitas
6	Data Statistik Daerah	Data BPS Kabupaten (perikanan, kemiskinan, tenaga kerja)	Memberikan konteks makro ekonomi pesisir sebagai pembanding dengan temuan lapangan di tingkat desa
7	Literatur Ilmiah	Buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu	Menyusun kerangka teoretis, membangun analisis konseptual, serta memosisikan temuan penelitian dalam diskursus akademik
8	Dokumen Kebijakan	Undang-undang, peraturan desa, peraturan kementerian terkait pesisir dan koperasi	Menjadi dasar normatif untuk menganalisis legitimasi kelembagaan dan kebijakan ekonomi masyarakat pesisir

Sumber: Disusun oleh peneliti 2025

2.6.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen penelitian dipahami sebagai alat teknis pengumpulan data, melainkan sebagai perangkat konseptual dan reflektif yang memungkinkan peneliti menangkap makna sosial, relasi antaraktor, serta dinamika ekonomi masyarakat pesisir secara kontekstual. Sejalan dengan karakter penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara instrumen pendukung digunakan untuk membantu proses eksplorasi, pencatatan, dan pendalaman data lapangan.

a. Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur

Pedoman wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta praktik ekonomi aktor-aktor pesisir secara mendalam. Pedoman ini disusun berdasarkan fokus dan indikator penelitian, namun bersifat

fleksibel sehingga memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan alur cerita dan konteks informan.

Wawancara diarahkan untuk:

- 1) Memahami struktur dan kondisi ekonomi rumah tangga pesisir,
- 2) Menelusuri relasi sosial-ekonomi antaraktor (nelayan, pinggawa, pedagang, dan aktor kelembagaan),
- 3) Mengungkap peran modal sosial, kearifan lokal, dan kelembagaan ekonomi,
- 4) Menangkap strategi penghidupan dan mekanisme adaptasi terhadap ketidakpastian ekonomi dan ekologi.

Pendekatan semi-terstruktur memungkinkan peneliti menjaga keseimbangan antara konsistensi fokus analisis dan kedalaman makna, sehingga data yang diperoleh tetap terarah namun kaya secara naratif.

b. Panduan Observasi

Panduan observasi digunakan untuk merekam praktik sosial dan ekonomi masyarakat pesisir secara langsung dalam konteks alamiahnya. Observasi dilakukan baik secara partisipatif maupun non-partisipatif, tergantung pada situasi lapangan dan tingkat keterlibatan peneliti.

Observasi difokuskan pada:

- 1) Aktivitas ekonomi harian masyarakat pesisir,
- 2) Pola interaksi sosial antaraktor ekonomi,
- 3) Praktik gotong royong dan kerja kolektif,
- 4) Dinamika kelembagaan lokal dalam kegiatan ekonomi,
- 5) Respons masyarakat terhadap perubahan musim dan kondisi lingkungan pesisir.

Melalui observasi, peneliti memperoleh data kontekstual yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, serta dapat memverifikasi kesesuaian antara narasi informan dan praktik aktual di lapangan.

a. Catatan Lapangan (*Field Notes*)

Catatan lapangan merupakan instrumen penting untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian lapangan secara sistematis dan reflektif. Catatan ini mencakup:

- 1) Deskripsi situasi sosial dan lingkungan penelitian,
- 2) Interaksi informal dengan informan,
- 3) Ekspresi non-verbal dan dinamika emosional,
- 4) Refleksi awal peneliti terhadap temuan sementara,
- 5) Perubahan fokus atau strategi pengumpulan data.

Field notes tidak hanya berfungsi sebagai arsip data mentah, tetapi juga sebagai ruang refleksi metodologis yang membantu peneliti memahami posisi, asumsi, dan keterlibatan dirinya dalam proses penelitian.

b. Alat Perekam Suara dan Dokumentasi Visual

Alat perekam suara digunakan untuk merekam proses wawancara secara utuh guna menjaga keakuratan data dan memudahkan proses transkripsi serta analisis mendalam. Penggunaan alat ini dilakukan dengan persetujuan informan dan memperhatikan prinsip etika penelitian.

Dokumentasi visual, berupa foto dan video, digunakan untuk:

- 1) memperkuat deskripsi konteks sosial dan ekonomi,
- 2) merekam aktivitas ekonomi dan kondisi lingkungan pesisir,
- 3) mendukung proses analisis dan penyajian temuan.

Dokumentasi visual tidak diposisikan sebagai data utama, melainkan sebagai data pendukung yang membantu memperkaya interpretasi dan memperkuat validitas temuan penelitian. Instrumen yang digunakan bersifat fleksibel dan berkembang selama proses penelitian, mengikuti dinamika data lapangan.

2.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berulang dengan mengombinasikan berbagai teknik kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh, mendalam, dan kontekstual mengenai kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro. Penggunaan berbagai teknik ini dimaksudkan untuk menangkap tidak hanya fakta empiris, tetapi juga makna, pengalaman hidup, serta dinamika relasi sosial-ekonomi yang melingkupi kehidupan masyarakat pesisir.

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman subjektif, persepsi, serta strategi ekonomi yang dijalankan oleh para informan. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memahami bagaimana aktor-aktor pesisir memaknai kondisi ekonomi yang mereka hadapi, merespons ketidakpastian penghidupan, serta menyusun strategi bertahan dan beradaptasi dalam konteks pesisir yang dinamis.

Wawancara dilakukan secara tatap muka di lingkungan keseharian informan seperti di rumah, di perahu, di lokasi tambak, atau di ruang kelembagaan desa agar informan merasa nyaman dan dapat menyampaikan pengalamannya secara naratif. Proses wawancara bersifat dialogis dan fleksibel, memungkinkan peneliti menggali isu-isu yang muncul secara spontan, termasuk relasi pinggawa–sawi, peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga, serta pengalaman berinteraksi dengan program pemerintah dan lembaga ekonomi lokal.

Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami praktik ekonomi sehari-hari masyarakat pesisir serta relasi sosial yang terbentuk di ruang pesisir. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat menangkap dinamika yang sering kali tidak terungkap dalam wawancara, seperti pola kerja keluarga, pembagian peran berbasis gender, mekanisme informal distribusi hasil, serta praktik solidaritas sosial dalam menghadapi risiko ekonomi dan ekologis. Observasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks sosial ekonomi yang membentuk tindakan dan keputusan ekonomi masyarakat pesisir.

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk menelusuri kerangka kebijakan, arah intervensi pembangunan, serta perubahan kondisi ekonomi masyarakat pesisir dari waktu ke waktu. Studi dokumentasi juga berfungsi sebagai sumber data pembandingan yang membantu meningkatkan ketepatan interpretasi dan memperkuat validitas temuan penelitian.

Diskusi reflektif, baik formal maupun informal, dilakukan sebagai bagian dari proses interpretasi data. Diskusi formal dilaksanakan melalui pertemuan kelompok

atau forum terbatas dengan aktor ekonomi dan kelembagaan lokal, sementara diskusi informal berlangsung secara spontan dalam interaksi sehari-hari, seperti saat nelayan tidak melaut. Diskusi reflektif ini memungkinkan terjadinya proses klarifikasi, pendalaman makna, serta konfirmasi awal terhadap temuan penelitian. Selain itu, diskusi tersebut membuka ruang dialog antara peneliti dan masyarakat, sehingga pengetahuan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat ekstraktif, tetapi juga reflektif dan partisipatif.

2.6.7 Teknik analisis data dan keabsahan data

a. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dan berulang sejak tahap awal pengumpulan data hingga proses penulisan hasil penelitian. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat induktif interpretatif, dengan tujuan membangun pemahaman konseptual mengenai kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro berdasarkan data empiris lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan makna (interpretasi).

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi reflektif, dan studi dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menelaah seluruh transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti struktur ekonomi masyarakat pesisir, peran aktor ekonomi, dinamika kelembagaan lokal, serta strategi penghidupan masyarakat. Data yang bersifat berulang, kurang relevan, atau di luar konteks penelitian disaring, sementara data yang mengandung makna penting diberi penanda awal (coding terbuka). Reduksi data tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kompleksitas realitas sosial, melainkan untuk memfokuskan analisis pada aspek-aspek kunci yang berkontribusi pada pemahaman kondisi ekonomi masyarakat pesisir secara mendalam dan kontekstual.

a. Kategorisasi Data

Tahap kategorisasi dilakukan dengan mengelompokkan potongan-potongan data yang telah direduksi ke dalam kategori dan tema-tema analitis. Proses ini dilakukan melalui pengkodean aksial dengan mengaitkan berbagai kategori berdasarkan kesamaan makna, relasi sosial, dan pola tindakan ekonomi yang muncul di lapangan. Kategori utama yang dikembangkan dalam penelitian ini mencakup, antara lain: pola mata pencaharian dan sumber pendapatan, pembagian kerja berbasis gender, relasi produksi dan distribusi, peran modal sosial dan kearifan lokal, fungsi kelembagaan ekonomi lokal, serta strategi adaptasi dan diversifikasi penghidupan. Kategorisasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antar aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam membentuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro.

b. Penarikan Makna dan Interpretasi

Penarikan makna dilakukan dengan menafsirkan kategori dan tema yang telah terbentuk untuk memahami logika sosial, nilai, dan rasionalitas ekonomi yang melandasi tindakan masyarakat pesisir. Pada tahap ini, peneliti mengaitkan temuan

empiris dengan kerangka konseptual dan landasan teori yang digunakan, tanpa memaksakan hubungan kausal linier. Interpretasi dilakukan secara reflektif dengan mempertimbangkan konteks lokal, sejarah sosial, serta posisi dan pengalaman aktor ekonomi pesisir. Hasil interpretasi ini kemudian dirumuskan dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro sebagai suatu konfigurasi sosial yang dinamis, adaptif, dan dipengaruhi oleh relasi antara masyarakat, pasar, dan pemerintah

1) Strategi Pengabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan kepercayaan terhadap temuan penelitian, digunakan strategi pengabsahan data yang mengacu pada kriteria penelitian kualitatif, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1) Credibility (Kredibilitas)

Kredibilitas data dijaga melalui keterlibatan peneliti secara intensif dan berkelanjutan di lapangan, sehingga peneliti memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, dilakukan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan data dari berbagai informan (nelayan, petani rumput laut, perempuan pesisir, pemuda, dan pengelola kelembagaan), serta dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2) Transferability (Keteralihan)

Transferability dicapai dengan menyajikan deskripsi tebal (*thick description*) mengenai konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat pesisir Desa Mallasoro. Dengan penyajian konteks secara rinci, pembaca dapat menilai kemungkinan keteralihan temuan penelitian ke wilayah pesisir lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang relatif serupa.

2.7 Hasil dan Pembahasan

2.7.1 Gambaran Umum Desa Mallasoro

Profil desa Mallasoro. Desa Mallasoro merupakan bagian dari lanskap historis Kabupaten Jeneponto yang terbentuk melalui proses sosial dan politik yang panjang sejak masa kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan. Secara historis, wilayah ini berakar pada perkembangan pemerintahan lokal pada abad ke-15, ketika unit-unit kekuasaan yang berpusat di Sungai Topa dan Allu berintegrasi membentuk Kerajaan Bangkala. Kerajaan ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam sejarah Kerajaan Binamu dan Bangkala di Jeneponto, yang selanjutnya melahirkan struktur pemerintahan wilayah Kecamatan Bangkala, tempat desa Mallasoro berada hingga saat ini. Dalam konteks sejarah regional, Kerajaan Bangkala berkembang sebagai salah satu kerajaan kecil yang memiliki relasi politik dan kultural dengan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Relasi tersebut tidak hanya menandai dinamika kekuasaan pada masa itu, tetapi juga memperlihatkan peran kelompok etnis Suku Makassar sebagai aktor utama dalam pembentukan dan pengelolaan wilayah. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut membentuk pola sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang hingga kini masih memengaruhi kehidupan komunitas pesisir desa Mallasoro.

Secara geografis, posisi wilayah pesisir desa Mallasoro yang strategis menjadikannya bagian penting dari jaringan perdagangan maritim sejak masa kerajaan. Aktivitas pelayaran dan pertukaran komoditas melalui jalur laut tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan budaya antar komunitas pesisir. Kondisi ini memberikan fondasi historis bagi tumbuh dan berkembangnya desa Mallasoro sebagai komunitas pesisir yang memiliki keterikatan kuat dengan laut, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai bagian dari identitas sosial masyarakatnya. Pembentukan struktur administratif modern di wilayah desa Mallasoro tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang pada masa kolonial Belanda. Perubahan tersebut berlangsung melalui proses sejarah yang sarat dengan ketegangan kekuasaan, khususnya pada peristiwa pemisahan wilayah Bangkala dan Binamu dengan Laikang pada November 1863. Peristiwa ini menandai pergeseran penting dari sistem pemerintahan tradisional berbasis kerajaan menuju pola administrasi kolonial yang lebih terstruktur dan terpusat.

Dalam perspektif sosial-historis, peristiwa pemisahan wilayah tersebut tidak semata-mata mencerminkan reorganisasi administratif, tetapi juga menjadi simbol perlawanan masyarakat lokal terhadap dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Semangat patriotisme masyarakat Turatea pada masa itu terartikulasikan melalui berbagai bentuk resistensi yang gigih, baik secara terbuka maupun terselubung, dalam mempertahankan kedaulatan dan identitas wilayahnya. Dinamika perlawanan ini membentuk pengalaman kolektif masyarakat yang kemudian terinternalisasi dalam memori sosial komunitas pesisir, termasuk masyarakat desa Mallasoro. Transformasi pemerintahan yang berlangsung pada masa kolonial tersebut secara bertahap meletakkan dasar-dasar organisasi kewilayahan yang kemudian berkembang menjadi struktur administratif desa sebagaimana dikenal saat ini. Dalam konteks ini, wilayah pesisir desa Mallasoro terbentuk sebagai bagian dari proses historis yang panjang, di mana perubahan politik, administratif, dan sosial saling berkelindan dan membentuk konfigurasi ruang sosial masyarakat pesisir hingga masa kini.

Seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan Indonesia modern pasca-kemerdekaan, wilayah Mallasoro secara bertahap mengalami proses formalisasi sebagai satuan pemerintahan desa. Penetapan Kabupaten Jeneponto sebagai Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan pada 1 Mei 1959 menjadi momentum penting dalam penataan ulang struktur administrasi wilayah, termasuk wilayah pesisir yang kemudian dikenal sebagai "Desa Mallasoro". Proses pembentukan desa Mallasoro sebagai bagian dari Kecamatan Bangkala berlangsung dalam kerangka kebijakan administratif nasional yang berupaya menyesuaikan pembagian wilayah dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Dalam konteks lokal, pembentukan desa Mallasoro tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut. Karakter pesisir yang kuat, dengan ketergantungan masyarakat pada sumber daya kelautan, serta potensi pariwisata bahari yang mulai dikenali, menjadi faktor penting dalam penetapan wilayah ini sebagai entitas desa tersendiri. Dengan demikian,

proses formalisasi desa Mallasoro mencerminkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat pesisir ke dalam kerangka pemerintahan formal, yang hingga kini terus mempengaruhi arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut.

Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah, desa Mallasoro mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah karena dinilai memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Karakteristik wilayah pesisir dengan kondisi alam yang mendukung aktivitas wisata bahari menjadikan desa Mallasoro dipandang strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis olahraga air. Salah satu bentuk pemanfaatan potensi tersebut adalah pengembangan olahraga *kitesurfing*, yakni olahraga selancar dengan menggunakan parasut, yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh seorang warga negara Prancis bernama Elis, pemilik Batikite Resort yang berlokasi di Pantai Bungung Pandang, desa Mallasoro. Kehadiran aktivitas wisata olahraga air ini tidak hanya memperkenalkan desa Mallasoro ke dalam jaringan pariwisata internasional, tetapi juga menjadi pemicu awal bagi transformasi sosial-ekonomi masyarakat pesisir setempat. Praktik pariwisata yang berkembang secara bertahap ini kemudian mendorong pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan desa Mallasoro sebagai salah satu desa Wisata. Penetapan tersebut secara resmi dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 100.3.3.2/284/2024 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Jeneponto, yang menempatkan desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, sebagai bagian dari kebijakan pengembangan pariwisata daerah.

Dalam perspektif penelitian kualitatif, penetapan desa Mallasoro sebagai Desa Wisata merefleksikan perubahan orientasi pembangunan wilayah pesisir, dari yang sebelumnya bertumpu pada sektor perikanan tradisional menuju pengembangan ekonomi berbasis pariwisata bahari. Transformasi ini membuka ruang bagi dinamika baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir, yang menjadi konteks penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian disertasi saya ini. Dalam perkembangan terkini, desa Mallasoro menunjukkan proses transformasi yang signifikan sebagai destinasi wisata pesisir dengan memanfaatkan secara optimal potensi alam yang dimilikinya. Wilayah pesisir desa Mallasoro berkembang menjadi salah satu ikon baru pariwisata pantai di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang rekreasi dan relaksasi yang berbasis keindahan alam. Kondisi pantai yang terbuka, bentang alam pesisir yang khas, serta karakter angin yang mendukung aktivitas olahraga air menjadi modal utama dalam pengembangan kawasan wisata pesisir Tanjung Mallasoro.

Salah satu daya tarik utama yang membedakan desa Mallasoro dengan destinasi pantai lainnya adalah aktivitas *kitesurfing*, yang dikategorikan sebagai olahraga ekstrem dan menjadi identitas wisata unggulan desa. Aktivitas ini berkembang di kawasan yang dikenal sebagai Tanjung Mallasoro dan kemudian membentuk citra desa Wisata Tanjung Mallasoro sebagai destinasi wisata bahari yang unik. Keberadaan *kitesurfing* tidak hanya memperkaya ragam atraksi wisata, tetapi juga memperkuat posisi desa Mallasoro dalam peta wisata pesisir daerah, baik

pada skala regional maupun nasional. Selain wisata olahraga air, desa Wisata Tanjung Mallasoro juga menawarkan berbagai aktivitas pendukung, seperti wisata pantai, kuliner lokal berbasis hasil laut, serta produk souvenir yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Diversifikasi aktivitas wisata ini menandai babak baru dalam perkembangan desa Mallasoro, dari komunitas pesisir yang sebelumnya berorientasi pada mata pencaharian tradisional menuju desa wisata yang mengadopsi pola pembangunan modern. Meski demikian, proses transformasi tersebut tetap berlangsung dengan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan identitas sosial masyarakat pesisir sebagai bagian integral dari daya tarik wisata yang ditawarkan.

Keunggulan geografis Pantai Bungung Pandang sebagai salah satu dusun potensial di desa Mallasoro terletak pada karakteristik alam pesisirnya yang khas, terutama kejernihan air laut serta pola hembusan angin yang stabil dan kuat. Kondisi ekologis ini menciptakan ruang yang sangat ideal bagi pengembangan olahraga selancar berbasis angin (*kite surfing*), sehingga menarik perhatian investor asing, khususnya dari Perancis. Salah seorang pengelola Batikkite Resort, Hadi, menegaskan bahwa kualitas alam Pantai Bungung Pandang memiliki daya saing internasional. Dalam wawancara, ia menyatakan:

“Kalau dilihat dari karakter anginnya, kejernihan air, dan bentang pantainya, Mallasoro ini sangat potensial. Bahkan, menurut saya, tidak kalah dengan spot kite surfing yang ada di Brazil dan di Bali” (Hadi, wawancara, 29 Maret 2025).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan desa Mallasoro tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari kebijakan administratif atau penataan wilayah, melainkan juga merupakan hasil dari pengakuan terhadap potensi sumber daya alam pesisir yang telah ada dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sejarah pembentukan dan perkembangan desa Mallasoro dapat dipahami sebagai proses sosial yang telah lama menyatu antara faktor alam, aktor lokal dan global, serta dinamika kebijakan pembangunan, yang pada akhirnya membentuk identitas desa pesisir dengan karakter unik dalam lanskap pariwisata bahari Indonesia.

Asal-usul penamaan “Mallasoro” tidak hanya dipahami sebagai penanda geografis, tetapi juga memuat makna simbolik yang merepresentasikan identitas dan karakter masyarakat setempat. Berdasarkan penuturan tokoh utama desa Mallasoro, Muh. Rusdi selaku Kepala Desa, nama “Mallasoro” berasal dari dua suku kata dalam bahasa Makassar, yakni *malla* dan *soro*. Ia menjelaskan bahwa *malla* bermakna “takut”, sementara *soro* dimaknai sebagai “mendorong” atau “menyolok”, yang memiliki akar makna serupa dengan kata *sorong*. Dalam wawancara, ia mengungkapkan:

“Malla itu artinya takut, tapi soro itu artinya mendorong atau menyolok, sama seperti sorong. Jadi Mallasoro itu dimaknai sebagai orang yang punya rasa takut, tapi tetap berani untuk maju” (Andi Rusdi, wawancara, 29 Maret 2025).

Selain dimaknai secara filosofis, penamaan Mallasoro juga dipahami melalui perspektif geografis. Beberapa informan menyebutkan bahwa istilah Mallasoro merujuk pada kondisi bentang alam wilayah tersebut, yakni daratan yang menjorok ke arah laut. Penafsiran ini dinilai selaras dengan kondisi geografis desa Mallasoro

yang berada pada kawasan pesisir dengan bentuk tanjung yang menjorok keluar. Keselarasan antara makna linguistik, simbolik, dan geografis ini menunjukkan bahwa penamaan Mallasoro merefleksikan relasi erat antara pengalaman sosial masyarakat, keberanian dalam menghadapi ruang pesisir, serta realitas alam yang membentuk kehidupan mereka secara turun-temurun.

Desa Mallasoro secara administratif berada di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dan secara historis tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembentukan wilayah Jeneponto secara keseluruhan. Pada fase awal sejarahnya, wilayah ini berkembang dalam konteks kerajaan-kerajaan kecil yang berpusat di lembah-lembah sungai, yang pada mulanya berdiri secara otonom. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian berintegrasi dan membentuk Kerajaan Binamu dan Kerajaan Bangkala sebagai entitas politik yang lebih besar. Perkembangan penting terjadi pada November 1863, ketika Kerajaan Bangkala dan Kerajaan Binamu secara resmi memisahkan diri dari Kerajaan Laikang, sebuah peristiwa yang menandai perubahan signifikan dalam konfigurasi kekuasaan dan pemerintahan tradisional di wilayah ini. Sejak saat itu, kawasan yang kini menjadi desa Mallasoro berkembang sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan tradisional masyarakat Makassar yang ditopang oleh struktur kerajaan yang relatif kuat dan berpengaruh.

Dalam lintasan sejarah lokalnya, desa Mallasoro juga dibentuk dan dipengaruhi oleh peran sejumlah tokoh penting yang memiliki legitimasi sosial dan kultural di tengah masyarakat. Tokoh-tokoh awal yang tercatat dalam sejarah desa umumnya berasal dari kalangan pemimpin adat dan tokoh agama, yang memainkan peran strategis dalam mengarahkan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai figur sentral dalam penyelesaian konflik sosial, penjaga nilai-nilai kolektif, serta pengambil keputusan dalam berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Peran ganda yang dijalankan para tokoh tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan dan perkembangan desa Mallasoro berlangsung melalui interaksi yang erat antara struktur kekuasaan tradisional, nilai-nilai keagamaan, dan praktik sosial masyarakat pesisir.

Pada fase awal pembentukan Desa Mallasoro, muncul sejumlah tokoh lokal yang berperan aktif dalam dinamika perjuangan kemerdekaan sekaligus dalam proses pembangunan desa. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari beragam latar belakang, antara lain aparatur desa, pendidik, serta aktivis sosial yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan masyarakat. Peran mereka tercermin dalam upaya mendorong akses pendidikan, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan sosial secara bertahap. Selain itu, para tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya lokal, dengan terus mengupayakan pelestarian tradisi di tengah arus perubahan sosial yang semakin cepat.

Memasuki era modern, konfigurasi tokoh-tokoh strategis di desa Mallasoro semakin beragam, mencakup pemimpin desa, pengusaha lokal, serta tokoh pendidikan yang berkontribusi secara langsung dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka tidak hanya berfokus pada pengembangan potensi ekonomi

desa, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan identitas kultural masyarakat. Peran tersebut menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan modernisasi dengan upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Mallasoro. Sejumlah peristiwa historis turut memberikan pengaruh signifikan terhadap arah perkembangan desa Mallasoro. Masa penjajahan Belanda, misalnya, menjadi periode yang memicu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan tradisional yang sebelumnya berbasis kerajaan dan adat, menuju struktur administrasi kolonial. Penerapan kebijakan tanam paksa serta berbagai regulasi kolonial lainnya memaksa masyarakat desa untuk menyesuaikan pola produksi pertanian dan tatanan kehidupan sosial mereka. Perubahan ini meninggalkan jejak struktural yang masih dapat dirasakan dalam memori kolektif masyarakat hingga saat ini.

Transformasi sosial desa juga berlanjut pada masa pembangunan di era Orde Baru, yang ditandai dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah seperti transmigrasi, pembangunan infrastruktur dasar termasuk jalan dan jaringan irigasi serta masuknya teknologi pertanian modern. Program-program tersebut secara perlahan mengubah wajah desa Mallasoro, baik dari sisi fisik wilayah maupun dari pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, era reformasi pasca-1998 menghadirkan dinamika baru melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang dan kewenangan lebih besar bagi pemerintah desa dalam mengelola pembangunan. Dalam konteks ini, desa Mallasoro memiliki peluang yang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi lokalnya, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis budaya lokal, sebagai upaya mengembangkan usaha-usaha alternatif yang produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Letak geografis dan administratif desa Mallasoro. Secara geografis, desa Mallasoro merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto sendiri merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota kabupaten terletak di Bontosunggu. Wilayah ini memiliki luas sekitar 749,79 km² dan pada tahun 2017 tercatat memiliki jumlah penduduk sekitar 359.787 jiwa. Posisi geografis desa Mallasoro yang berada di pesisir menjadikannya memiliki karakter ekologis dan sosial yang khas, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas kelautan, perikanan, dan potensi wisata bahari. Secara administrative dan historis, wilayah Jeneponto termasuk desa Mallasoro tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan perlawanan masyarakat lokal terhadap kekuasaan Belanda. Pada tahun 1863, terjadi peristiwa penting berupa pemisahan wilayah Bangkala, Binamu, dan Laikang. Peristiwa ini mencerminkan kuatnya semangat masyarakat Turatea yang menolak dominasi dan berupaya mempertahankan kedaulatan pemerintahan lokal. Dalam konteks tersebut, struktur pemerintahan tradisional berbasis kerajaan dan adat masih memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan penguatan lembaga adat sebagai representasi masyarakat. Pada tanggal 29 Mei 1929, Raja Binamu diangkat sebagai pemimpin adat melalui lembaga yang dikenal dengan istilah *Todo*, yang berfungsi

sebagai wadah legitimasi sosial dan politik masyarakat Turatea. Lembaga ini menjadi keberlanjutan sistem pemerintahan lokal yang berakar pada nilai-nilai adat dan tradisi, sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap intervensi. Momentum penting lainnya terjadi pada tanggal 1 Mei 1959, ketika pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, yang sekaligus menandai pemisahan Kabupaten Takalar dari Kabupaten Jeneponto. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam proses formalisasi struktur pemerintahan modern di wilayah Jeneponto, termasuk penguatan posisi desa-desa sebagai unit administrasi pemerintahan yang otonom.

Dalam lintasan sejarah yang, tanggal 1 Mei 1863 juga dikenang sebagai periode yang sangat penting bagi masyarakat Jeneponto, ditandai dengan dilantiknya Karaeng Binamu yang dipilih secara demokratis oleh lembaga adat *Toddo Appaka* sebagai representasi masyarakat Turatea. Pengunduran diri Karaeng Binamu dari tahta merupakan bentuk nyata perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh berbagai dinamika politik hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan pengangkatan kembali Raja Binamu setelah berakhirnya. Tahun 1863 juga dicatat sebagai tahun bersejarah dengan terbentuknya Afdeling Negeri-negeri Turatea oleh pemerintah Belanda, sekaligus keluarnya Laikang dari konfederasi Binamu. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 1946, Raja Binamu Mattewakkang Daeng Raja meletakkan jabatannya sebagai perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, sebuah tindakan yang hingga kini dikenang sebagai manifestasi keberanian dan nasionalisme masyarakat Jeneponto.

Berbagai peristiwa historis tersebut kemudian menjadi dasar dalam penetapan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto. Melalui seminar yang melibatkan pakar sejarah, peneliti, sesepuh, dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, disepakati penetapan Hari Jadi Jeneponto sebagai keputusan yang memiliki legitimasi historis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun sosial. Dalam kerangka inilah desa Mallasoro dipahami bukan sekadar sebagai unit, melainkan sebagai bagian dari ruang sosial-historis yang dibentuk oleh dinamika perlawanan, adat, dan transformasi pemerintahan dari masa ke masa. Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah sekitar 749,79 km² yang secara terbagi ke dalam 11 kecamatan. Secara geografis, wilayah ini terletak pada posisi 5°16'13"-5°39'34" Lintang Selatan dan 119°40'19"-120°07'31" Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar di sebelah utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Takalar di sebelah barat, serta Laut Flores di sebelah selatan. Letak geografis tersebut menjadikan Jeneponto sebagai wilayah yang memiliki karakter transisi antara pegunungan dan pesisir, dengan dinamika sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi alamnya.

Dari aspek hidrologi, Kabupaten Jeneponto dialiri oleh sejumlah sungai utama, antara lain Sungai Kelara, Sungai Tino, dan Sungai Poko Bulu. Beberapa sungai tersebut telah dimanfaatkan sebagai bendungan dan sistem irigasi yang berfungsi untuk mengairi sebagian lahan pertanian, khususnya persawahan. Di bagian selatan, wilayah Jeneponto berbatasan langsung dengan perairan Laut Flores

dengan garis pantai mencapai sekitar 114 kilometer. Kondisi ini memberikan potensi kelautan dan pesisir yang signifikan, baik untuk sektor perikanan maupun pengembangan wisata bahari, termasuk di wilayah Kecamatan Bangkala tempat desa Mallasoro berada. Secara topografis, Kabupaten Jeneponto memiliki variasi bentang alam yang cukup kontras. Wilayah bagian utara didominasi oleh dataran tinggi dengan ketinggian antara 500 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan wilayah peralihan dengan ketinggian sekitar 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian selatan, yang mencakup 52 km pesisir, merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 150 meter di atas permukaan laut. Bagian barat dan utara umumnya berupa pegunungan dengan tingkat kemiringan lahan rata-rata mencapai 40 derajat, serta memiliki curah hujan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, wilayah selatan didominasi oleh dataran rendah yang relatif datar dan terbuka, sehingga lebih intensif dimanfaatkan untuk aktivitas pesisir dan kelautan.

Kabupaten Jeneponto berjarak sekitar 91 kilometer dari Kota Makassar dan secara terdiri atas 114 desa dan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Kelara, Binamu, Tamalatea, Bontoramba, Rumbia, Turatea, Tarawang, dan Arungkeke. Kecamatan Bangkala merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 152,96 km² atau setara dengan 20,4 persen dari total luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Beberapa kecamatan, seperti Binamu, Bangkala, Bontoramba, Rumbia, Turatea, dan Tamalatea, tercatat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten. Namun demikian, secara khusus Kecamatan Bangkala menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih lambat dibandingkan kecamatan lainnya, dengan kontribusi ekonomi tercatat sekitar 2,52 persen, berada di bawah rata-rata kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengembangan ekonomi wilayah, sekaligus membuka ruang bagi penguatan sektor-sektor potensial berbasis sumber daya lokal, terutama di pesisir seperti desa Mallasoro. Dengan demikian, karakter geografis dan Kabupaten Jeneponto menjadi konteks penting dalam memahami dinamika ekonomi masyarakat pesisir dan relevansi pengembangan wisata bahari sebagai strategi alternatif pembangunan lokal.

Demografi dan Kependudukan. Secara administratif, desa Mallasoro merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bangkala dan terbagi ke dalam sembilan dusun. Pembagian wilayah dusun ini mencerminkan struktur pemukiman masyarakat yang tersebar dan beragam, sekaligus menggambarkan kepadatan penduduk serta distribusi rumah tangga di setiap wilayah. Keberadaan dusun-dusun tersebut menjadi unit sosial penting dalam kehidupan masyarakat desa Mallasoro, baik dalam aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya. Kesembilan dusun yang terdapat di desa Mallasoro meliputi Dusun Mallasoro I yang dihuni oleh sekitar 225 unit rumah dengan jumlah 265 kepala keluarga, serta Dusun Mallasoro II dengan 261 unit rumah dan 223 kepala keluarga. Dusun Baranaka I memiliki 145 unit rumah yang dihuni oleh 188 kepala keluarga, sedangkan Dusun Baranaka II tercatat memiliki 211 unit rumah dengan jumlah 257 kepala keluarga. Dusun Kampung Beru dihuni oleh sekitar 131 unit rumah dengan 135 kepala keluarga. Sementara itu, Dusun

Bungung Pandang memiliki 170 unit rumah dengan 205 kepala keluarga dan dikenal sebagai salah satu wilayah pesisir yang strategis dalam pengembangan wisata bahari.

Adapun Dusun Batu Le'leng terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Batu Le'leng Timur dengan 206 unit rumah dan 286 kepala keluarga, Batu Le'leng Tengah dengan 195 unit rumah dan 264 kepala keluarga, serta Batu Le'leng Barat yang memiliki 116 unit rumah dengan jumlah 212 kepala keluarga. Pembagian wilayah Batu Le'leng ini menunjukkan konsentrasi penduduk yang cukup tinggi dan menjadi salah satu pusat aktivitas sosial-ekonomi masyarakat desa. Distribusi jumlah rumah dan kepala keluarga pada masing-masing dusun memperlihatkan variasi kepadatan penduduk dan karakter sosial yang berbeda-beda. Kondisi ini berimplikasi pada pola mata pencaharian, tingkat akses terhadap sumber daya, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat di setiap dusun. Dalam beberapa tahun terakhir, desa Mallasoro menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tergolong moderat, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 1,2 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang relatif stabil serta meningkatnya jumlah keluarga muda. Peningkatan jumlah penduduk tersebut, khususnya di wilayah pesisir desa, berimplikasi langsung terhadap bertambahnya beban ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan mata pencaharian pada sektor-sektor yang bersifat musiman dan rentan, seperti buruh nelayan dan buruh petani rumput laut, yang penghasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan risiko degradasi lingkungan pesisir.

Menyadari dinamika tersebut, pemerintah desa Mallasoro mulai merancang berbagai langkah antisipatif, salah satunya melalui program keluarga berencana yang difokuskan pada masyarakat pesisir. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas ekonomi rumah tangga, sekaligus mengurangi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam laut. Selain itu, pemerintah desa juga merencanakan pengembangan infrastruktur dasar serta perluasan kawasan permukiman guna mengakomodasi pertumbuhan penduduk di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan alam sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir (RPJMD 2025-2029). Di sisi lain, desa Mallasoro juga mengalami transformasi signifikan dalam arah pembangunan wilayah. Pada tahun 2024, desa ini secara resmi ditetapkan sebagai desa Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2033. Penetapan tersebut menegaskan pengakuan pemerintah terhadap potensi pariwisata yang dimiliki Desa Mallasoro, terutama keindahan pantai, kekayaan sumber daya laut, serta kehidupan sosial-budaya masyarakat pesisir yang khas.

Melalui Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 100.3.3.2/284/2024 tentang Penetapan Desa Mallasoro sebagai desa Wisata Berkembang, muncul harapan baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menjadikan Desa Mallasoro sebagai desa wisata unggulan sekaligus ikon pariwisata bahari

Kabupaten Jeneponto. Pariwisata diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai basis penguatan ekonomi masyarakat pesisir yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun lingkungan. Karakteristik demografis masyarakat pesisir desa Mallasoro merupakan aspek penting dalam memahami dinamika sosial-ekonomi yang berkembang di wilayah ini. Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan memberikan gambaran awal mengenai potensi sumber daya manusia yang tersedia serta kapasitas masyarakat dalam menggerakkan aktivitas ekonomi pesisir. Analisis demografis menjadi pintu masuk untuk menelaah bagaimana masyarakat merespons perubahan ekonomi, khususnya dalam konteks peralihan dan diversifikasi mata pencaharian menuju sektor-sektor alternatif berbasis wisata bahari.

Struktur usia penduduk desa Mallasoro yang relatif didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) menunjukkan adanya potensi bonus demografi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dominasi kelompok usia ini berimplikasi pada intensitas aktivitas ekonomi, terutama di sektor perikanan dan usaha-usaha penunjang lainnya. Namun demikian, potensi tersebut tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kesejahteraan apabila tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang memadai, keterampilan kerja, serta akses terhadap modal dan peluang usaha. Dalam konteks masyarakat pesisir, kondisi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, sebagaimana dikemukakan oleh Satria (2015), bahwa karakter demografis masyarakat pesisir sangat menentukan kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan struktur ekonomi dan lingkungan.

Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin turut mempengaruhi pembagian peran dalam aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Peran laki-laki umumnya lebih dominan pada sektor perikanan tangkap dan aktivitas yang berkaitan langsung dengan laut, sementara perempuan cenderung terlibat dalam kegiatan ekonomi pendukung, seperti pengolahan hasil laut, usaha kuliner, serta jasa-jasa skala rumah tangga. Pembagian peran ini menunjukkan adanya potensi penguatan ekonomi keluarga apabila dikelola secara inklusif, terutama melalui pengembangan usaha alternatif yang terintegrasi dengan sektor wisata bahari. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir desa Mallasoro menjadi indikator kunci dalam menilai kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pendidikan mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam mengakses informasi, mengembangkan keterampilan, serta memanfaatkan peluang ekonomi baru di luar sektor perikanan tradisional. Dalam konteks pengembangan desa wisata, tingkat pendidikan berperan penting dalam mendorong diversifikasi mata pencaharian, pengelolaan usaha berbasis jasa, serta peningkatan kualitas pelayanan wisata. Oleh karena itu, pemetaan karakteristik demografis masyarakat pesisir menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh, komposisi penduduk desa Mallasoro memperlihatkan struktur demografis yang khas masyarakat pesisir, dengan dominasi kelompok usia produktif. Sekitar 55,26 persen dari total penduduk berada pada rentang usia produktif (15-60 tahun), yang menunjukkan bahwa sebagian besar

masyarakat berada pada fase kehidupan yang secara potensial aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, kelompok usia muda (6-14 tahun) tercatat sebesar 23,82 persen, yang mencerminkan keberlanjutan regenerasi penduduk sekaligus menjadi indikator kebutuhan investasi jangka panjang di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, kelompok usia lanjut pada rentang 60–70 tahun mencapai sekitar 9,36 persen. Meskipun secara demografis dikategorikan sebagai lansia, sebagian dari kelompok usia ini masih terlibat dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam skala rumah tangga atau pekerjaan yang bersifat informal dan berbasis pengalaman. Keterlibatan kelompok usia tua dalam aktivitas produktif mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang memiliki etos kerja kuat serta ketergantungan yang tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya lokal.

Komposisi usia tersebut mengindikasikan bahwa desa Mallasoro memiliki potensi sumber daya manusia yang relatif besar untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, khususnya yang berbasis wisata bahari. Dominasi kelompok usia produktif, yang didukung oleh kelompok usia muda dan lansia yang masih aktif secara ekonomi, memberikan peluang bagi pengembangan sektor-sektor usaha alternatif. Potensi ini, apabila didukung oleh peningkatan kapasitas, pendidikan, dan akses terhadap peluang ekonomi, dapat menjadi modal sosial penting dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat pesisir menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Salah satu karakteristik menonjol dari struktur usia produktif masyarakat desa Mallasoro adalah tingginya partisipasi ekonomi lintas generasi, terutama pada sektor-sektor ekonomi tradisional pesisir seperti kenelayanan, budidaya rumput laut, pengelolaan tambak, serta aktivitas perkebunan. Kelompok usia muda produktif umumnya terlibat sebagai *anak buah* (buruh) kapal penangkap ikan, tenaga kerja pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan rumput laut, buruh tambak, maupun pekerja kebun. Keterlibatan ini sebagian besar terjadi melalui mekanisme pewarisan pekerjaan dalam lingkup keluarga, di mana anak-anak dan generasi muda mengikuti profesi orang tua atau kerabat dekat sebagai strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun tersebut membentuk sistem transfer pengetahuan dan keterampilan yang berkelanjutan antargenerasi. Dalam konteks kenelayanan, misalnya, generasi muda memperoleh pengetahuan praktis mengenai teknik penangkapan ikan tradisional, pemahaman terhadap pola angin dan arus laut, hingga pengetahuan lokal tentang musim dan kondisi ekologis perairan. Praktik ini tidak hanya memperkuat identitas sosial masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi mekanisme adaptasi ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian sumber daya alam. Sementara itu, kelompok usia lanjut cenderung mulai mengurangi intensitas kerja, meskipun dalam beberapa kasus masih terlibat secara terbatas dalam aktivitas ekonomi yang bersifat informal atau berbasis pengalaman.

Namun demikian, seiring dengan dinamika sosial dan perubahan struktur kesempatan kerja, mulai terlihat kecenderungan sebagian generasi muda untuk mencari alternatif mata pencaharian di luar sektor perikanan dan budidaya rumput laut. Kecenderungan ini terutama muncul pada generasi muda yang memiliki akses pendidikan yang relatif lebih baik, sehingga membuka peluang untuk terlibat dalam

sektor jasa, perdagangan, maupun usaha alternatif yang berkembang seiring dengan hadirnya pariwisata bahari di desa Mallasoro.

Komposisi usia produktif yang dominan ini memiliki implikasi signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Di satu sisi, tingginya proporsi penduduk usia produktif menciptakan potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi desa. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama terkait keterbatasan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan. Meskipun rasio ketergantungan relatif rendah, penduduk usia produktif khususnya yang telah berkeluarga tetap memikul beban ekonomi yang cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih berada pada usia sekolah. Dalam situasi tersebut, sebagian rumah tangga usia muda produktif memiliki peluang untuk mengalokasikan pendapatannya pada kegiatan investasi, seperti menabung atau meningkatkan kualitas hidup keluarga. Namun, dalam praktiknya, peluang ini masih sulit diwujudkan secara optimal karena keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kepastian pendapatan, serta tingginya kerentanan ekonomi yang bersumber dari sifat musiman sektor perikanan dan budidaya rumput laut. Akibatnya, sebagian besar rumah tangga pesisir masih berada pada kondisi ekonomi yang bersifat subsisten, di mana pendapatan yang diperoleh umumnya hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ditinjau dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, desa Mallasoro yang terdiri atas sembilan dusun merupakan kawasan permukiman pedesaan pesisir dengan karakter lanskap alam yang relatif asri. Berdasarkan data sensus terbaru tahun 2024-2025, jumlah penduduk desa Mallasoro tercatat sebanyak 5.112 jiwa yang tersebar dalam 1.560 kepala keluarga. Komposisi penduduk menunjukkan proporsi yang relatif seimbang, dengan penduduk laki-laki sebesar 51,92 persen dan perempuan sebesar 48,08 persen. Mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif, yakni rentang usia 15-60 tahun, yang mencakup sekitar 65 persen dari total populasi. Struktur usia produktif ini masih didominasi oleh laki-laki yang umumnya berperan sebagai kepala keluarga dan menjadi penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Dilihat dari persebaran penduduk di masing-masing dusun, tingkat hunian di desa Mallasoro dapat dikategorikan cukup padat. Terdapat sekitar 2.035 unit rumah yang tersebar di sembilan dusun, dengan rata-rata jumlah penghuni sebanyak empat hingga lima orang per rumah tangga. Pola hunian didominasi oleh rumah kayu sederhana berbentuk rumah panggung, yang mencerminkan ciri khas kultural masyarakat Makassar sekaligus merepresentasikan karakter masyarakat maritim pesisir. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pesisir merupakan warga asli desa Mallasoro yang masih mempertahankan bentuk hunian tradisional berbahan kayu. Sementara itu, bangunan semi permanen umumnya ditempati oleh penduduk pendatang atau warga yang memiliki ikatan perkawinan dengan masyarakat luar desa, khususnya mereka yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau anggota TNI. Hunian semi permanen ini relatif banyak dijumpai di Dusun Mallasoro I dan II, Dusun Kampung Beru, serta Dusun Bungung Pandang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya diferensiasi tingkat

ekonomi dalam masyarakat desa, di mana sebagian kecil penduduk berada pada kategori ekonomi menengah. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, fokus populasi kajian dibatasi pada masyarakat nelayan, petani rumput laut, dan pekerja tambak, sehingga kelompok pendatang dengan kondisi ekonomi yang relatif mapan tidak termasuk dalam unit analisis penelitian.

Struktur ekonomi masyarakat pesisir di desa Mallasoro, sebagaimana tercermin dalam data komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah ini masih didominasi oleh laki-laki, khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah relatif tinggi serta akses yang lebih besar terhadap sumber daya produktif. Laki-laki umumnya menguasai kegiatan penangkapan ikan di laut sebagai sumber pendapatan utama, termasuk kepemilikan armada penangkapan, alat tangkap, serta posisi-posisi strategis dalam komunitas nelayan dan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Data empiris memperlihatkan bahwa sekitar 80-90 persen aktivitas kerja produktif dan kepemilikan sarana produksi perikanan masih berada di tangan laki-laki, demikian pula dengan akses terhadap pasar tradisional dan jaringan distribusi yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Sebaliknya, keterlibatan perempuan dalam struktur ekonomi pesisir cenderung terpusat pada aktivitas ekonomi berskala kecil dan bersifat informal. Perempuan umumnya berperan dalam kegiatan pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga, penjualan hasil laut, pengelolaan warung kelontong, serta sebagai tenaga kerja pada industri pengolahan rumput laut dengan tingkat upah yang relatif rendah. Pola pembagian peran ekonomi berbasis gender ini berimplikasi pada terbentuknya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap sumber daya produktif dan peluang peningkatan kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menghambat optimalisasi kapasitas ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro secara keseluruhan.

Ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, kondisi masyarakat pesisir Desa Mallasoro masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Berdasarkan data yang tersedia, sekitar 45-50 persen penduduk memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 25-30 persen, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekitar 15-20 persen. Sementara itu, proporsi masyarakat yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, baik pada jenjang diploma maupun sarjana, relatif kecil, yakni hanya berkisar antara 3-5 persen dari total populasi. Selain itu, terdapat sekitar 5-8 persen penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan formal atau mengalami putus sekolah, terutama pada kelompok usia lanjut. Struktur pendidikan ini mencerminkan kondisi umum masyarakat pesisir desa Mallasoro yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses dan kualitas pendidikan.

Pola pendidikan di desa Mallasoro tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir. Keterbatasan ekonomi rumah tangga, lingkungan sosial, serta minimnya fasilitas pendidikan diduga menjadi faktor utama rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan

menengah dan tinggi. Sekolah Menengah Atas terdekat umumnya berada di wilayah kecamatan atau ibu kota kabupaten, sehingga akses terhadap pendidikan lanjutan memerlukan biaya operasional tambahan yang relatif tinggi. Dalam kondisi ekonomi rumah tangga yang terbatas, sebagian masyarakat lebih memilih mendorong anggota keluarga usia produktif, terutama anak laki-laki, untuk terjun langsung ke sektor kelautan guna menopang keberlangsungan ekonomi keluarga. Di sisi lain, terdapat pula konstruksi budaya yang menempatkan pengalaman praktis dan keterampilan yang berorientasi pada laut sebagai prioritas utama dibandingkan pendidikan formal. Anak laki-laki umumnya dilibatkan sejak usia remaja dalam aktivitas penangkapan ikan dan budidaya rumput laut dengan mengikuti jejak orang tua, sementara anak perempuan lebih diarahkan untuk membantu pekerjaan domestik, pengolahan hasil laut, atau terlibat dalam kegiatan budidaya rumput laut.

Tingkat pendidikan formal yang relatif rendah tersebut memberikan implikasi yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro. Keterbatasan pendidikan membatasi akses masyarakat terhadap informasi pasar, inovasi teknologi penangkapan dan budidaya yang lebih modern, serta peluang diversifikasi mata pencaharian. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengandalkan pengetahuan tradisional dan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi maupun dinamika pasar (Satria, 2015). Meskipun demikian, masyarakat pesisir desa Mallasoro memiliki kekayaan pengetahuan lokal dan keterampilan praktis yang bernilai tinggi, seperti kemampuan membaca kondisi cuaca dan laut, memahami pola migrasi ikan, menguasai teknik penangkapan ikan tradisional, serta praktik konservasi dalam budidaya rumput laut. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya integratif yang menyeimbangkan penguatan pendidikan formal dengan pelestarian dan pengembangan pengetahuan lokal, sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas adaptif dan daya saing ekonomi masyarakat pesisir, khususnya di wilayah desa Mallasoro.

Karakteristik sosial budaya masyarakat. Desa pesisir Mallasoro memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas sebagai komunitas yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya laut dan aktivitas kemaritiman. Secara umum, struktur sosial ekonomi masyarakat terbentuk dari beragam kelompok mata pencaharian, seperti nelayan tangkap, pembudidaya ikan dan rumput laut, pengolah hasil perikanan, serta pekerja pada sektor-sektor pendukung lainnya. Berbagai kelompok profesi tersebut membentuk suatu ekosistem ekonomi pesisir yang saling terkait dan saling bergantung satu sama lain dalam menopang kehidupan sehari-hari masyarakat. Struktur sosial masyarakat pesisir Mallasoro cenderung bersifat hierarkis, terutama jika ditinjau dari kepemilikan modal dan alat produksi. Pemilik kapal berukuran besar, juragan tambak, serta pedagang atau pengepul hasil perikanan menempati posisi sosial-ekonomi yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, nelayan buruh, pekerja budidaya rumput laut, dan buruh tambak berada pada lapisan sosial yang lebih rendah dan rentan secara ekonomi. Pola permukiman masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai nelayan, petani rumput laut, dan pembudidaya tambak ikan maupun udang, umumnya terkonsentrasi di wilayah pesisir. Rumah-rumah dibangun berdekatan dengan lokasi mata pencaharian untuk

memudahkan akses terhadap aktivitas produksi dan mengurangi biaya operasional. Kehidupan sosial masyarakat pesisir ini sangat dipengaruhi oleh siklus alam laut, seperti musim angin, pasang surut, serta pola migrasi ikan, yang secara langsung menentukan ritme kerja, fluktuasi pendapatan, dan dinamika kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut membentuk budaya masyarakat yang adaptif, tangguh, serta memiliki toleransi tinggi terhadap ketidakpastian dan risiko.

Meskipun masyarakat pesisir Mallasoro hidup di wilayah yang kaya akan sumber daya laut, keindahan alam, keragaman budaya maritim, dan kearifan lokal yang telah terbangun secara turun-temurun, mereka justru termasuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang relatif rendah. Potensi sumber daya laut yang melimpah, seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, terumbu karang, serta ekosistem pesisir yang produktif, secara teoritis merupakan modal besar bagi peningkatan kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar nelayan tradisional dan keluarga pesisir masih terjebak dalam kemiskinan struktural yang sulit diputus. Paradoks ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan modal dan teknologi penangkapan ikan, ketergantungan pada sistem bagi hasil yang kurang menguntungkan nelayan, dominasi tengkulak dan pedagang perantara dalam rantai distribusi yang menyerap sebagian besar nilai tambah, ketidakpastian hasil tangkapan akibat perubahan cuaca dan musim, keterbatasan akses pasar, serta degradasi lingkungan pesisir akibat pencemaran dan tekanan ekologis lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan hasil tangkapan nelayan cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Sebagian besar masyarakat pesisir Mallasoro menggantungkan kehidupan ekonomi rumah tangga pada satu jenis mata pencaharian utama, yakni penangkapan ikan atau budidaya laut, yang memiliki karakteristik pendapatan tidak menentu, bersifat musiman, dan sangat rentan terhadap faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali mereka. Nelayan tradisional dengan perahu kecil dan alat tangkap sederhana umumnya hanya mampu melaut di perairan sekitar pantai dengan hasil tangkapan yang terbatas. Pada saat musim paceklik, gelombang tinggi, atau cuaca buruk yang menghambat aktivitas melaut, keluarga nelayan kehilangan sumber penghasilan utama dan kerap bergantung pada pinjaman dari rentenir atau juragan dengan bunga tinggi, yang pada akhirnya semakin memperkuat jerat kemiskinan struktural.

Dalam menghadapi realitas ketidakpastian ekonomi dan kerentanan sosial tersebut, diversifikasi mata pencaharian menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat pesisir Mallasoro. Diversifikasi ekonomi pesisir dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu sektor mata pencaharian yang rentan. Berbagai alternatif usaha produktif berbasis potensi lokal dapat dikembangkan, antara lain pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat yang mengintegrasikan keindahan alam pantai, kearifan budaya maritim, serta kuliner lokal sebagai daya tarik wisata, serta pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah. Secara kasat mata, potensi sumber daya alam pesisir Mallasoro menyediakan peluang bagi pengembangan usaha alternatif yang memanfaatkan

keterampilan dan pengetahuan lokal masyarakat sebagai modal sosial dalam memperkuat ekonomi lokal.

Meskipun demikian, upaya diversifikasi mata pencaharian dan pengembangan usaha produktif tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, jaringan pasar, serta rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat menjadi kendala utama dalam proses implementasi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi alternatif di kawasan pesisir desa Mallasoro memerlukan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan dukungan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendorong transformasi sosial-ekonomi yang lebih merata.

Kearifan Lokal dan Pengetahuan Masyarakat Pesisir. Kearifan lokal masyarakat pesisir memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan sekaligus menopang sistem ekonomi komunitas yang hidup di wilayah pesisir. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelestarian ekosistem bahari, tetapi juga sebagai modal sosial yang memperkuat kohesi, solidaritas, dan kerja sama kolektif masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi berbasis sumber daya laut. Dalam konteks ini, praktik-praktik kearifan lokal menjadi fondasi penting bagi pengembangan sektor perikanan tangkap, budidaya laut, pengolahan hasil perikanan, hingga pariwisata bahari berbasis masyarakat.

Integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan potensi bahari memungkinkan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, seperti pemahaman terhadap musim, arus laut, dan siklus biologis sumber daya laut, berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi sekaligus ketahanan sosial masyarakat pesisir. Sejalan dengan pandangan Satria (2015), kearifan lokal dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan sosial-ekologis yang tidak hanya bernilai kultural, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dan ekologis yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Kearifan lokal masyarakat pesisir desa Mallasoro merupakan suatu sistem pengetahuan, nilai, norma, dan praktik tradisional yang terbentuk dan berkembang secara historis dalam mengelola sumber daya kelautan serta mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai komunitas yang mayoritas menggantungkan penghidupan pada laut, masyarakat Mallasoro telah mengembangkan berbagai bentuk kearifan lokal yang berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan kerja, pengelolaan sumber daya, dan interaksi sosial ekonomi.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini adalah sistem **pinggawa-sawi**, yakni pola hubungan kerja dalam aktivitas kenelayan yang mengatur relasi antara punggawa sebagai pemilik modal atau nahkoda dengan sawi sebagai nelayan buruh atau anak buah kapal. Sistem ini mencakup pembagian peran kerja, mekanisme bagi hasil, serta norma-norma sosial yang mengikat hubungan kerja agar tetap berjalan dalam kerangka kepercayaan, loyalitas, dan tanggung jawab

bersama. Dalam praktiknya, sistem punggawa–sawi tidak semata-mata berorientasi pada hubungan ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan kultural yang membentuk jaringan patronase dan solidaritas di antara anggota komunitas pesisir.

Selain itu, masyarakat pesisir Mallasoro juga mempraktikkan berbagai upacara adat dan ritual yang berkaitan dengan aktivitas kelautan, yang sarat dengan nilai-nilai simbolik sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap laut sebagai sumber kehidupan. Ritual-ritual tersebut merefleksikan pandangan kosmologis masyarakat pesisir yang memandang laut bukan sekadar ruang eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai entitas yang harus dijaga keseimbangannya. Pengetahuan lokal mengenai tanda-tanda alam, perubahan cuaca, dan kondisi laut juga menjadi bagian integral dari kearifan lokal yang diwariskan antar generasi dan berfungsi sebagai strategi adaptasi dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian lingkungan.

Secara keseluruhan, kearifan lokal masyarakat pesisir Mallasoro tidak hanya berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan, tetapi juga menjadi modal sosial yang potensial untuk dikembangkan sebagai basis penguatan ekonomi alternatif, termasuk dalam pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat. Namun demikian, dalam konteks perubahan sosial, tekanan ekonomi, dan dinamika modernisasi, keberlanjutan kearifan lokal ini menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan penguatan melalui pendekatan kebijakan dan pemberdayaan yang sensitif terhadap konteks sosial budaya masyarakat setempat.

Sistem Punggawa-Sawi sebagai Kearifan Lokal Nelayan. System punggawa sawi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Takalar dan Jeneponto, termasuk di desa Mallasoro. Sistem ini mengatur pola hubungan kerja antara punggawa sebagai pemilik modal dan sarana produksi dengan sawi sebagai nelayan buruh yang mengandalkan tenaga serta keterampilan dalam aktivitas penangkapan ikan. Punggawa umumnya berperan sebagai pemilik perahu atau nahkoda yang menyediakan berbagai kebutuhan melaut, seperti kapal, alat tangkap, bahan bakar, perbekalan, dan modal operasional lainnya. Sementara itu, sawi berperan sebagai anak buah kapal yang menjalankan aktivitas produksi di laut berdasarkan pembagian tugas yang telah disepakati.

Dalam kehidupan masyarakat pesisir Mallasoro, sistem punggawa-sawi telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari struktur sosial ekonomi nelayan. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek ekonomi melalui mekanisme bagi hasil, tetapi juga membentuk ikatan sosial yang kuat antara punggawa dan sawi. Hubungan tersebut sering kali melampaui relasi kerja formal dan berkembang menjadi hubungan kekeluargaan yang dilandasi oleh kepercayaan, loyalitas, serta tanggung jawab moral. Dalam praktiknya, punggawa tidak hanya berfungsi sebagai pemilik modal, tetapi juga memiliki kewajiban sosial untuk membantu sawi dalam memenuhi kebutuhan hidup tertentu, seperti biaya pendidikan anak, pengobatan, atau kebutuhan mendesak lainnya.

Secara ekonomi, sistem punggawa–sawi berfungsi sebagai mekanisme distribusi hasil yang relatif adil melalui pembagian hasil tangkapan berdasarkan

proporsi yang telah disepakati bersama, umumnya dilakukan setelah dikurangi biaya operasional. Skema ini memungkinkan nelayan kecil yang tidak memiliki modal untuk tetap terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan dan memperoleh penghidupan dari laut. Di samping itu, sistem ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap alam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam penggunaan alat tangkap tradisional yang relatif ramah lingkungan serta pemanfaatan pengetahuan lokal mengenai musim ikan, arah angin, dan kondisi laut yang diwariskan lintas generasi. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial ekonomi, sistem punggawa–sawi masih bertahan hingga saat ini sebagai identitas budaya sekaligus mekanisme pengelolaan sumber daya laut bagi masyarakat pesisir Sulawesi Selatan.

Upacara Pelepasan Perahu dan Pengetahuan Lokal. Upacara adat atau ritual pelepasan perahu merupakan salah satu praktik kearifan lokal yang masih dijalankan oleh masyarakat pesisir desa Mallasoro. Ritual ini dilakukan baik pada perahu yang baru selesai dibuat maupun perahu yang telah diperbaiki dan akan kembali dioperasikan untuk melaut. Bagi masyarakat nelayan Mallasoro, pelaksanaan upacara ini diyakini sebagai bentuk manifestasi rasa syukur serta penghormatan terhadap laut sebagai sumber kehidupan yang telah memberikan rezeki dan penghidupan bagi komunitas pesisir.

Berbagai bentuk ritual dan upacara tradisional dilaksanakan mengikuti siklus kehidupan melaut, seperti upacara sebelum melaut yang bertujuan memohon keselamatan, yang dikenal sebagai ritual di **Caru-carui** atau **Passili**, serta upacara **Accera Turungang** sebagai ungkapan syukur atas hasil tangkapan yang melimpah. Upacara Caru-carui atau Passili juga dimaknai sebagai ritual tolak bala, di mana masyarakat memanjatkan doa agar terhindar dari marabahaya selama melaut. Selain itu, terdapat pula tradisi sedekah laut yang biasanya dilakukan secara berkala sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Sang Pencipta dan penguasa laut.

Upacara-upacara tersebut tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan religius, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat pesisir. Melalui ritual adat, nilai-nilai budaya maritim dilestarikan dan etika lingkungan ditanamkan kepada para nelayan, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem laut. Dalam pelaksanaannya, upacara adat melibatkan berbagai unsur masyarakat dan dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh nelayan yang dihormati, disertai dengan doa-doa, sesaji, serta terkadang pertunjukan seni budaya lokal yang mencerminkan identitas maritim masyarakat Mallasoro.

Pengetahuan lokal masyarakat pesisir Mallasoro dalam aktivitas penangkapan ikan merupakan bagian dari sistem pengetahuan ekologis tradisional yang terakumulasi melalui pengalaman panjang dan proses adaptasi lintas generasi. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang pola musim angin dan ombak, migrasi ikan, karakteristik perairan, navigasi tradisional berbasis arah angin dan pergerakan bintang, serta teknik penangkapan ikan yang efektif dan relatif ramah lingkungan. Nelayan tradisional mampu membaca berbagai tanda alam, seperti perubahan warna air laut, pergerakan burung laut, formasi awan, dan fenomena alam

lainnya, untuk menentukan waktu dan lokasi melaut yang tepat serta mengantisipasi potensi bahaya. Selain itu, pengetahuan lokal juga meliputi klasifikasi jenis-jenis ikan, pemahaman tentang siklus reproduksi biota laut, dan praktik-praktik konservasi tradisional yang mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan.

Rumah Tradisional Masyarakat Nelayan. Rumah tradisional masyarakat nelayan desa Mallasoro memiliki karakteristik arsitektur yang khas dan sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang disesuaikan dengan kehidupan maritim. Konstruksi rumah panggung yang menggunakan material kayu dan bambu lokal merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan pesisir, terutama pasang surut air laut, sekaligus mencerminkan filosofi hidup masyarakat yang berupaya menjaga keselarasan dengan alam. Bagian kolong rumah yang terbuka umumnya dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya, sehingga memiliki fungsi ekonomi sekaligus simbolik. Tata ruang rumah yang sederhana namun fungsional, dengan serambi yang menghadap ke laut, sering digunakan sebagai ruang sosial untuk memperbaiki jaring, beristirahat setelah melaut, atau berkumpul bersama keluarga. Ornamen tradisional pada bentuk atap dan dinding rumah turut merepresentasikan identitas budaya serta kisah kehidupan masyarakat nelayan yang lekat dengan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan.

Proses pembangunan rumah tradisional masyarakat pesisir ini tidak hanya merupakan aktivitas teknis konstruksi, tetapi ada juga ritual sosial yang sarat makna simbolik dan memperkuat relasi sosial bagi masyarakat pesisir. Melalui serangkaian tahapan yang melibatkan partisipasi kolektif dan upacara adat dalam Pembangunan rumah tradisional memberikan makna lebih dalam dari sekadar fungsi praktisnya, menciptakan jaringan makna kultural yang mengikat individu dalam pemahaman bersama tentang nilai-nilai komunitas. Dalam konteks masyarakat pesisir Mallasoro umumnya pembangunan rumah dimulai dengan musyawarah yang melibatkan kepala keluarga, tetua adat, dan tokoh masyarakat untuk menentukan hari baik berdasarkan perhitungan tradisional. Pembangunan rumah tradisional ini umumnya dilakukan secara bergotong royong bahkan diantaranya ada yang disertai ritual atau upacara syukuran atau selamat dan mengundang seluruh warga yang terlibat dalam Pembangunan. solidaritas sosial dan itegrasi yang terjadi merupakan peristiwa kolektif yang tidak hanya menghasilkan struktur fisik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, mereproduksi nilai-nilai budaya, dan menegaskan kembali identitas komunitas pesisir sebagai kelompok yang saling bergantung dan mendukung dalam menghadapi tantangan kehidupan maritim.

Pengetahuan lokal masyarakat. Pengetahuan lokal yang umumnya dimiliki sebahagian besar masyarakat nelayan desa Mallasoro merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui interaksi panjang antara manusia dan lingkungan laut. Pengetahuan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam aktivitas kenelayan, tetapi juga mencerminkan relasi ekologis yang mendalam serta cara pandang masyarakat terhadap laut sebagai ruang hidup yang harus dijaga dan dihormati. Salah satu bentuk kearifan lokal yang menonjol adalah kemampuan nelayan tradisional dalam melakukan navigasi laut dan membaca tanda-tanda alam tanpa bergantung pada teknologi modern.

Nelayan desa Mallasoro memiliki pengetahuan navigasi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, seperti membaca posisi bintang, arah angin, pola arus laut, serta mengenali penanda alam berupa formasi pulau dan perbedaan warna air laut. Pengetahuan ini memungkinkan mereka menentukan arah pelayaran dan lokasi penangkapan ikan secara akurat, sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Selain itu, nelayan juga mampu memprediksi perubahan cuaca dengan mengamati perilaku biota laut, pergerakan awan, dan pola gelombang, yang sangat penting bagi keselamatan dan efektivitas aktivitas melaut.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan nelayan:

“Kalau mau melaut, kami lihat dulu tanda-tanda alam. Arah angin, posisi bintang, warna air laut, sampai gerak burung laut itu jadi petunjuk. Dari situ kami tahu kapan waktu yang aman dan di mana biasanya ikan berkumpul. Itu sudah diajarkan sejak kami ikut orang tua melaut”. (Wawancara, Annis dan Yusuf, 27/07/2025)

Selain navigasi tradisional, kearifan lokal masyarakat nelayan Mallasoro juga tercermin dalam penerapan metode penangkapan ikan yang relatif berkelanjutan. Nelayan menggunakan alat tangkap yang disesuaikan dengan kondisi perairan dan jenis ikan sasaran, seperti jaring dengan ukuran mata jaring tertentu untuk menghindari penangkapan ikan berukuran kecil, serta pancing yang bersifat selektif guna mengurangi tangkapan sampingan. Mereka juga menerapkan pola rotasi wilayah penangkapan agar populasi ikan memiliki waktu untuk pulih, serta menghormati musim pemijahan dengan mengurangi atau menghentikan aktivitas penangkapan pada periode tertentu. Praktik ini menunjukkan adanya etika konservasi yang secara kultural telah mengakar dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Di luar aktivitas kenelayanan, masyarakat desa Mallasoro juga memiliki pengetahuan lokal terkait pemanfaatan tanaman obat pesisir dan biota laut untuk kebutuhan pengobatan tradisional. Berbagai jenis tumbuhan pantai, bakau, dan rumput laut dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tertentu, seperti gangguan kulit, demam, hingga penyakit yang berkaitan dengan infeksi. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman empiris dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.

Salah satu informan menjelaskan:

“Dulu kalau sakit, kami jarang ke puskesmas. Rumput laut tertentu bisa dipakai untuk obat kulit, akar bakau direbus untuk obat malaria. Itu sudah biasa kami lakukan sejak dulu, karena bahan-bahannya ada di sekitar laut”. (Wawancara, Yusuf, 27/07/2025).

Pengetahuan lokal masyarakat pesisir Mallasoro juga mencakup keterampilan dalam pembuatan dan perbaikan alat tangkap serta perahu tradisional, mulai dari pemilihan bahan, teknik perakitan, hingga perawatan agar alat dan perahu tetap layak digunakan. Keseluruhan praktik tersebut mencerminkan pemahaman holistik masyarakat nelayan terhadap lingkungan pesisir, di mana laut tidak hanya dipandang sebagai sumber pangan dan penghidupan, tetapi juga sebagai ruang pengetahuan, sumber kesehatan alami, dan fondasi keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Mallasoro.

2) Kelembagaan Formal dan Informal

Kelembagaan formal dan informal dalam masyarakat pesisir memiliki peran strategis dalam mengatur akses terhadap sumber daya, distribusi manfaat ekonomi, serta pola produksi dan konsumsi masyarakat. Nikijuluw (2002) menegaskan bahwa kelembagaan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menentukan siapa yang memperoleh akses, kontrol, dan manfaat dari sumber daya pesisir. Sejalan dengan itu, Uphoff (1986) memandang kelembagaan lokal sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi masyarakat karena mampu menjembatani kepentingan individu dan kolektif dalam konteks sosial yang spesifik.

Secara konseptual, kelembagaan dalam masyarakat lokal dapat dibedakan ke dalam dua kategori utama. Pertama, **kelembagaan formal**, yaitu institusi yang memiliki struktur organisasi resmi, keanggotaan terdaftar, aturan tertulis, serta pengakuan legal dari pemerintah, seperti koperasi, asosiasi nelayan, dan lembaga keuangan mikro. Kedua, **kelembagaan informal**, yakni institusi yang tumbuh dan beroperasi berdasarkan norma sosial, tradisi, relasi kekerabatan, serta kesepakatan tidak tertulis yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi masyarakat pesisir, keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh keberadaan salah satu bentuk kelembagaan, melainkan oleh sejauh mana kelembagaan formal dan informal tersebut mampu bersinergi, saling memperkuat, serta mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kohesi sosial yang telah terbentuk secara historis.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan kelembagaan yang telah terbentuk di setiap wilayah desa di seluruh Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Proses pembentukan BUMDes Mallasoro dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok nelayan, serta perwakilan masyarakat dari berbagai dusun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UMKM Desa Mallasoro, selain amanah Undang-undang proses pendirian BUMDes berangkat dari kesadaran kolektif masyarakat akan perlunya sebuah lembaga ekonomi desa yang mampu mawadahi dan memperkuat aktivitas ekonomi pesisir, yang selama ini berjalan secara terpisah-pisah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Rosmina Dg. Baji sebagai berikut:

“Pembentukan BUMDes ini berawal dari kebutuhan masyarakat sendiri. Kami melihat bahwa ekonomi masyarakat Mallasoro sangat bergantung pada perikanan tangkap, budidaya rumput laut, pertanian, perkebunan, dan potensi wisata pantai. Karena itu, diperlukan satu lembaga yang bisa menyatukan dan mengelola potensi tersebut agar lebih terarah dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.” (Wawancara, 12 Juli 2025).

Lebih lanjut, proses pembentukan BUMDes Mallasoro diawali dengan penyusunan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes, penetapan modal dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta

pemilihan pengurus dan badan pengawas secara demokratis dan transparan. Model pembentukan ini bersifat **bottom-up**, di mana prakarsa dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan masyarakat desa melalui forum musyawarah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa BUMDes benar-benar merefleksikan kebutuhan spesifik masyarakat pesisir, khususnya dalam hal akses permodalan bagi nelayan, pengelolaan hasil laut, serta pengembangan pariwisata pantai yang berkelanjutan.

Secara kelembagaan, keanggotaan BUMDes Mallasoro dirancang tidak semata sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan kolektif masyarakat pesisir. Struktur organisasi BUMDes terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: (1) Pemerintah Desa sebagai penanam modal sekaligus pembina, (2) Pengurus yang meliputi ketua dan koordinator unit usaha yang dipilih dari dan oleh masyarakat melalui musyawarah desa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kepercayaan, serta (3) Badan Pengawas yang bertugas melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes. Namun demikian, struktur kepengurusan BUMDes saat ini masih relatif terbatas dan cenderung didominasi oleh unsur pemerintah desa, sehingga partisipasi masyarakat pesisir secara lebih luas masih perlu diperkuat.

Dalam dimensi ekonomi, BUMDes Mallasoro berfungsi sebagai penggerak kegiatan ekonomi pesisir dengan mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. BUMDes memiliki peluang untuk mengembangkan sejumlah unit usaha strategis, antara lain: (1) unit simpan pinjam khusus nelayan dengan skema permodalan yang lebih terjangkau, (2) unit pemasaran kolektif hasil tangkapan dan budidaya rumput laut untuk memperkuat posisi tawar nelayan, (3) unit pengadaan dan penyewaan alat tangkap bersama untuk meningkatkan efisiensi dan teknologi penangkapan, (4) unit pengolahan hasil laut guna meningkatkan nilai tambah produk, serta (5) unit pengelolaan pariwisata bahari berbasis masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, BUMDes Mallasoro berpotensi menjadi solusi struktural dalam upaya memutus rantai kemiskinan nelayan melalui penyediaan akses modal, teknologi, pasar, serta diversifikasi sumber penghidupan.

Selain berperan dalam dimensi ekonomi, BUMDes Mallasoro juga memiliki fungsi sosial yang penting, khususnya sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika kehidupan masyarakat pesisir desa Mallasoro.

Organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok Sadar Wisata merupakan bentuk kelembagaan masyarakat yang dibentuk sebagai wadah partisipasi warga dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*). Secara regulatif, pembentukan Pokdarwis mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Sadar Wisata. Keberadaan Pokdarwis dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi wisata lokal secara berkelanjutan.

Di desa Mallasoro, pembentukan Pokdarwis bersifat sukarela dan partisipatif, yang lahir dari inisiatif bersama antara masyarakat dan pemerintah desa. Organisasi

ini diamanahkan sebagai motor penggerak utama dalam mentransformasikan potensi alam pesisir dan kekayaan budaya lokal menjadi produk wisata yang bernilai ekonomi, sekaligus sebagai koordinator dalam mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai potensi wisata dalam rangka mendukung program pemerintah desa untuk menjadikan desa Mallasoro sebagai desa wisata yang sedang berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan Pembina pengurus Pokdarwis, dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ibu Lilis bahwa pembentukan organisasi ini sebagai respons atas kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi wisata secara lebih terarah dan terkoordinasi:

“Selama ini potensi pantai dan budaya lokal sudah ada, tetapi belum dikelola secara serius. Pokdarwis dibentuk supaya masyarakat bisa terlibat langsung, tidak hanya jadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam pengembangan wisata di Mallasoro.” (Lilis, Wawancara, Juli 2025).

Keberadaan Pokdarwis memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Pengembangan sektor pariwisata diyakini mampu menciptakan **multiplier effect ekonomi**, di mana tumbuhnya aktivitas wisata mendorong berkembangnya berbagai usaha pendukung, seperti warung makan, toko oleh-oleh, jasa transportasi lokal, serta penyewaan peralatan wisata bahari. Kondisi ini membuka peluang kerja baru, khususnya bagi generasi muda pesisir yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal.

Selain itu, Pokdarwis juga berperan strategis dalam membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti agen perjalanan, pelaku usaha perhotelan, pemerintah daerah, serta lembaga donor. Melalui jejaring ini, Pokdarwis berupaya mengakses dukungan pendanaan, promosi, serta pengembangan infrastruktur pariwisata yang dibutuhkan. Pokdarwis diharapkan mampu memfasilitasi pengembangan usaha pariwisata yang terintegrasi, menggabungkan berbagai atraksi dalam satu kawasan pesisir sehingga mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata oleh Pokdarwis diarahkan pada prinsip manajemen kolektif dan transparansi keuangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat, sekaligus mengalokasikan sebagian pendapatan untuk kegiatan konservasi lingkungan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Pokdarwis diharapkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan inklusif.

Organisasi Pemuda Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang dibentuk atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial generasi muda, dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, termasuk masyarakat pesisir desa Mallasoro. Pembentukan Karang Taruna secara normatif mengacu pada Peraturan Menteri Sosial dan umumnya diawali melalui musyawarah pemuda setempat yang kemudian membentuk struktur kepengurusan. Di desa Mallasoro, inisiatif pembentukan Karang Taruna muncul dari perangkat desa yang melihat

tingginya antusiasme remaja dan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, olahraga, serta perayaan hari besar nasional.

Pembentukan organisasi ini dimaksudkan untuk memwadahi potensi dan energi generasi muda agar terarah pada aktivitas-aktivitas yang positif dan produktif, sekaligus mendukung upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pembentukan Karang Taruna mendapat persetujuan resmi dari pemerintah desa dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Mallasoro bapak Andi Rusdi, dalam wawancara, Karang Taruna diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pembinaan generasi muda:

“Kami melihat potensi pemuda di Mallasoro cukup besar. Karena itu, Karang Taruna dibentuk supaya pemuda punya wadah resmi untuk berkreasi, berorganisasi, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan desa, terutama di bidang sosial dan ekonomi.” (Andi Rusdi, Wawancara, Juli 2025).

Keanggotaan Karang Taruna bersifat terbuka bagi seluruh pemuda dan pemudi di wilayah desa Mallasoro tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Struktur organisasi terdiri atas anggota biasa dan pengurus yang dipilih secara sukarela dari perwakilan setiap lingkungan. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengembangkan organisasi serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Secara fungsional, Karang Taruna diharapkan menjalankan beberapa peran utama, antara lain sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat, pelaksana pemberdayaan masyarakat khususnya generasi muda serta penggerak pengembangan jiwa kewirausahaan. Selain itu, Karang Taruna juga berfungsi sebagai ruang pembinaan kreativitas pemuda, peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial, serta sarana pencegahan berbagai masalah sosial di tingkat desa.

Dalam konteks ekonomi masyarakat pesisir, Karang Taruna memiliki peran strategis dalam mendorong motivasi dan partisipasi generasi muda melalui program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Organisasi ini diharapkan menjadi wadah bagi pemuda pesisir untuk mengembangkan ide-ide usaha inovatif, seperti pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah, pembuatan kerajinan tangan dari bahan laut, serta keterlibatan aktif dalam pengembangan usaha alternatif yang mendukung sektor pariwisata bahari. Keterlibatan Karang Taruna dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi dan budaya juga menjadi sarana penting dalam memperkuat identitas lokal sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi desa Mallasoro.

Kelompok Usaha Tani dan Nelayan. Kelompok Usaha Tani dan Nelayan di desa Mallasoro merupakan bentuk kelembagaan ekonomi lokal yang berfungsi sebagai organisasi usaha bersama (Kelompok Usaha Bersama/KUB) yang dibangun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial ekonomi, serta kesamaan komoditas usaha yang dikelola oleh anggotanya. Pembentukan kelompok ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, serta kesejahteraan ekonomi petani dan nelayan sebagai kelompok mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Proses pembentukan Kelompok Usaha Tani dan Nelayan diinisiasi oleh

pemerintah desa melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan perwakilan berbagai komunitas masyarakat. Dalam musyawarah tersebut disepakati tujuan bersama, struktur kepengurusan, serta bentuk kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah pesisir desa Mallasoro. Setelah terbentuk, kelompok ini didaftarkan secara resmi ke instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta lembaga penyuluhan setempat, guna memperoleh pembinaan, pendampingan, dan akses terhadap berbagai program pemberdayaan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengurus kelompok dalam wawancara lapangan:

“Kelompok tani dan nelayan ini dibentuk supaya kami bisa bergerak bersama. Kalau sendiri-sendiri susah, tapi kalau sudah berkelompok lebih mudah mengurus bantuan, pelatihan, dan akses modal.” (Basri. Wawancara, Juli 2025).

Secara kelembagaan, Kelompok Tani dan Nelayan di desa Mallasoro menyatukan berbagai pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan dalam satu wadah usaha bersama. Keanggotaan kelompok ini meliputi petani pemilik lahan, petani penggarap, buruh tani, pembudidaya rumput laut, pengelola tambak, serta nelayan tradisional yang memiliki kesamaan komoditas atau aktivitas usaha. Keanggotaan bersifat terbuka bagi seluruh warga desa Mallasoro yang berdomisili di wilayah desa dan bersedia terlibat aktif dalam kegiatan kelompok.

Fungsi utama Kelompok Usaha Tani dan Nelayan adalah sebagai **wadah belajar bersama**, yang memungkinkan anggota meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola usaha tani dan perikanan secara lebih produktif dan berkelanjutan. Selain itu, kelompok ini berfungsi sebagai **wahana kerja sama**, memperkuat solidaritas dan kolaborasi antaranggota dalam menghadapi berbagai tantangan usaha, seperti fluktuasi harga, perubahan musim, keterbatasan sarana produksi, serta risiko kegagalan panen atau penangkapan.

Kelompok ini juga berperan sebagai **unit produksi kolektif**, yang secara bersama-sama mengupayakan pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil, serta pemasaran produk pertanian dan perikanan. Melalui pengelolaan bersama, kelompok mampu meningkatkan skala ekonomi dan daya tawar (*bargaining position*) anggotanya di hadapan pedagang pengumpul maupun pembeli besar.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anggota kelompok nelayan:

“Kalau sudah lewat kelompok, kami bisa beli alat atau kebutuhan melaut secara bersama, harganya lebih murah. Waktu jual ikan juga bisa tawar harga lebih baik karena jumlahnya banyak.” (Wawancara, Yusuf, 27 Juli 2025).

Dalam konteks akses permodalan, Kelompok Usaha Tani dan Nelayan memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat pesisir dan lembaga keuangan maupun program pemerintah. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan pembudidaya rumput laut, kerap menghadapi kendala mengakses lembaga keuangan formal akibat ketiadaan agunan, pendapatan yang tidak stabil, dan sifat usaha yang musiman. Melalui kelembagaan kelompok, akses terhadap modal usaha menjadi lebih terbuka dan terorganisir.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang difasilitasi oleh pemerintah desa Mallasoro berfungsi memberikan pinjaman modal kerja dengan skema yang lebih lunak dan fleksibel, menyerupai mekanisme koperasi. Pinjaman tersebut umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti pembelian bahan bakar, es, peralatan melaut, bibit, dan sarana produksi lainnya, dengan sistem pengembalian yang disesuaikan dengan musim penangkapan atau panen. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu anggota kelompok:

“Pinjaman lewat kelompok lebih ringan, bunganya kecil dan bisa dibayar setelah musim ikan. Itu sangat membantu nelayan kecil seperti kami.” (Basri, Wawancara, 27 Juli 2025).

Selain mendukung mata pencaharian utama masyarakat pesisir, Kelompok Usaha Tani dan Nelayan juga berpotensi berperan dalam pengembangan diversifikasi ekonomi melalui pembentukan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, khususnya yang terkait dengan wisata bahari. Dengan demikian, keberadaan kelembagaan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi tradisional, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengembangan ekonomi pesisir yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di desa Mallasoro.

Kelembagaan Koperasi Informal. Kelembagaan koperasi dalam masyarakat pesisir secara normatif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat perekonomian masyarakat nelayan. Secara ideal, pembentukan koperasi nelayan diawali dengan rapat pendirian yang melibatkan calon anggota yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi di sektor perikanan dan kelautan. Proses tersebut mencakup penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pemilihan pengurus dan pengawas, penetapan modal awal, serta pendaftaran koperasi untuk memperoleh pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas terkait di tingkat daerah. Keanggotaan koperasi pada prinsipnya bersifat terbuka dan setara, meliputi nelayan pemilik kapal, nelayan buruh (ABK), pembudidaya, maupun pengolah hasil perikanan yang berdomisili di wilayah kerja koperasi.

Namun demikian, realitas kelembagaan ekonomi di desa Mallasoro menunjukkan bahwa koperasi nelayan yang berkembang dan berfungsi secara aktif justru didominasi oleh **koperasi bersifat informal**, yakni lembaga perkreditan usaha milik pribadi. Koperasi informal ini tidak memiliki struktur keanggotaan resmi sebagaimana koperasi formal, namun beroperasi sebagai lembaga ekonomi lokal yang melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan buruh, petani rumput laut, petani tambak, dan rumah tangga nelayan yang membutuhkan akses modal cepat dan fleksibel. Koperasi informal tersebut umumnya menyediakan pinjaman skala kecil hingga menengah untuk kebutuhan usaha produktif, seperti modal budidaya rumput laut, biaya operasional melaut, serta pinjaman tunai untuk kebutuhan rumah tangga yang bersifat mendesak. Mekanisme pinjaman didasarkan pada relasi kepercayaan, kedekatan sosial, serta pengetahuan lokal mengenai kondisi ekonomi peminjam, tanpa prosedur administratif yang rumit.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu warga nelayan:

“Kalau butuh modal cepat, biasanya kami ke koperasi pribadi atau ke pinggawa. Tidak pakai syarat macam-macam, yang penting saling percaya dan tahu kondisi kita.” (Wawancara, Yusuf Juli 2025).

Selain koperasi pribadi, lembaga keuangan informal lain yang memiliki fungsi serupa adalah jaringan permodalan yang dikelola oleh **punggawa kapal** atau **pedagang perantara**. Para punggawa dan pedagang ini memiliki modal relatif besar dan berperan sebagai penyedia pembiayaan sekaligus pembeli hasil tangkapan. Sistem kerja yang diterapkan umumnya berbasis bagi hasil atau ikatan pemasaran, di mana nelayan memperoleh modal operasional di awal dan berkewajiban menjual hasil tangkapannya kepada pemberi modal dengan harga yang telah disepakati.

Relasi ini, meskipun sering dipandang sebagai hubungan ekonomi yang timpang, pada praktiknya berfungsi sebagai **mekanisme jaminan sosial-ekonomi informal** bagi nelayan kecil yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Dalam konteks masyarakat pesisir Mallasoro, kelembagaan informal ini menjadi penopang utama keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

Koperasi Desa Merah Putih. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah telah menginisiasi pendirian **Koperasi Desa Merah Putih** sebagai bagian dari program strategis nasional. Menurut Ketua UMKM Desa Mallasoro, koperasi ini telah resmi didirikan namun belum beroperasi secara optimal karena keterbatasan sarana fisik, khususnya ketiadaan gedung kantor yang masih menunggu hibah lahan dari pemerintah desa.

“Koperasi Merah Putih sudah terbentuk, tapi memang belum jalan maksimal karena belum ada kantor. Kami masih menunggu lahan hibah dari desa.” (Dg. Baji, Wawancara, 27 Juli 2025).

Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pendirian lebih dari 80.000 unit koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat perekonomian pedesaan, meningkatkan kemakmuran masyarakat, membuka lapangan kerja baru, serta melindungi masyarakat dari praktik pinjaman berbunga tinggi. Melalui layanan simpan pinjam, penyediaan kebutuhan pokok, serta dukungan transformasi digital, koperasi ini diharapkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi desa berbasis semangat gotong royong.

Organisasi UMKM. Organisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Mallasoro mulai terbentuk sejak tahun 2023 sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya diversifikasi ekonomi dan penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah kolektif bagi para pelaku UMKM untuk berhimpun, berkolaborasi, dan memperjuangkan kepentingan bersama dalam mengembangkan usaha produktif.

Ketua UMKM Desa Mallasoro, St. Rosmina Dg. Baji, menjelaskan bahwa pembentukan organisasi ini berawal dari inisiatif pribadi yang kemudian berkembang menjadi gerakan kolektif:

“Awalnya saya mengajak beberapa teman yang sama-sama pernah ikut pelatihan UMKM. Dari situ muncul keinginan untuk punya wadah bersama supaya usaha kita bisa berkembang.” (Wawancara, Juli 2025).

Organisasi UMKM ini didukung oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta bersinergi dengan berbagai dinas teknis seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM. Tujuan utama pembentukannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, seperti pengolahan ikan, rumput laut, gula aren, serta kerajinan berbasis sumber daya pesisir.

Proses pembentukan organisasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan perangkat desa, pelaku usaha, dan BUMDes. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), disertai pemilihan pengurus dan pendaftaran organisasi ke instansi terkait. Legalitas organisasi diperkuat melalui akta notaris dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) agar dapat mengakses program pembinaan, bantuan modal, dan jejaring usaha dari pemerintah.

Keanggotaan Organisasi UMKM bersifat terbuka dan inklusif, mencakup pelaku usaha pengolahan hasil laut, perajin, serta pelaku usaha mikro dan kecil lainnya yang memenuhi kriteria sesuai Undang-Undang UMKM. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara, termasuk hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses pelatihan dan jaringan usaha, serta kewajiban menjaga komitmen dan nama baik organisasi.

Secara fungsional, Organisasi UMKM berperan sebagai:

1. Wadah advokasi, memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM;
2. Fasilitator jaringan bisnis, menghubungkan anggota dengan pasar, lembaga keuangan, dan mitra usaha;
3. Lembaga pemberdayaan, melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengembangan produk;
4. Mitra pemerintah, dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Dengan peran tersebut, Organisasi UMKM di desa Mallasoro menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi pesisir yang setara dan berkelanjutan.

2.7.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir Mallasoro

Bagian ini menyajikan temuan terkait kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci. Deskripsi kondisi ekonomi yang disajikan mencakup berbagai aspek seperti sumber-sumber mata pencaharian utama dan sampingan, pola dan tingkat pendapatan, sistem bagi hasil dalam hubungan punggawa-sawi, strategi bertahan hidup, akses terhadap modal dan sumber daya produktif, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui narasi para informan, akan mengungkap kompleksitas dan dinamika kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro yang menjadi landasan empiris untuk menganalisis potensi diversifikasi mata pencaharian dan pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan yang

berkelanjutan. Penyajian temuan ini mengikuti pendekatan emic perspective yang mengutamakan perspektif dan pengalaman hidup (*lived experience*) para informan dalam menggambarkan realitas ekonomi mereka, sehingga kondisi ekonomi tidak hanya dipahami melalui data statistik atau indikator kuantitatif semata, tetapi juga melalui narasi, interpretasi, dan makna yang diberikan oleh masyarakat secara kualitatif. Berikut hasil wawancara yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat:

Kondisi ekonomi masyarakat pesisir Mallasoro memperlihatkan karakteristik ekonomi yang khas karena masih sangat bergantung pada sumber daya laut dan bersifat musiman, serta rentan terhadap perubahan cuaca dan fluktuasi pasar. Aktivitas ekonomi utama masyarakat masih didominasi oleh sektor perikanan tangkap, budidaya rumput laut, dan pengelolaan tambak, yang menjadi tumpuan utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ketergantungan ini menjadikan stabilitas ekonomi rumah tangga pesisir sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali masyarakat, seperti musim angin, gelombang laut, serta harga komoditas hasil laut. Dari hasil wawancara :

Seorang nelayan tangkap menjelaskan bahwa pendapatan mereka tidak bersifat tetap dan sangat bergantung pada kondisi alam:

“Kalau cuaca bagus, bisa melaut hampir setiap hari dan hasilnya lumayan. Tapi kalau angin barat atau ombak besar, bisa berminggu-minggu tidak ke laut, otomatis penghasilan juga tidak ada”. (Anis, wawancara 27/7/2025).

Lanjut:

“Kalau memasuki musim barat kami kadang lama tidak melaut karena beresiko tinggi jadi kebanyakan buruhku pergi menjadi buruh bangunan atau tukang ojek”. (Anis, wawancara 27/7/2025).

Dari pernyataan nelayan tersebut menunjukkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat pesisir Mallasoro ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga mendorong rumah tangga pesisir untuk mengembangkan strategi ekonomi alternatif sebagai bentuk adaptasi terhadap risiko ekonomi dan ekologi.

Diversifikasi Mata Pencaharian sebagai Strategi Bertahan Hidup.

Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, diversifikasi mata pencaharian menjadi strategi penting yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Mallasoro. Selain melaut, sebagian masyarakat mengembangkan usaha budidaya rumput laut, bertani musiman, berdagang kecil, atau bekerja sebagai buruh harian, terutama pada periode paceklik. Seorang petani rumput laut sekaligus nelayan menyampaikan:

“Kalau rumput laut bagus, kami fokus di situ. Tapi kalau harganya turun atau kena penyakit, terpaksa cari kerja lain, kadang bantu di kebunnya mertua atau kerja bangunan bahkan saya pernah jadi tukang Urut di resort kalau banyak tamu bule”. (Rais Dg. jalling, wawancara 27/7/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa diversifikasi bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan kebutuhan struktural bagi rumah tangga pesisir dalam menjaga keberlangsungan hidup. Hal tersebut juga dipandang bahwa diversifikasi masyarakat di dorong oleh adanya tekanan (*distress-push diversification*) akibat penurunan pendapatan dari sektor utama. Ellis (2000)., Pola ini sejalan dengan pandangan

Satria (2015) yang menempatkan strategi penghidupan sebagai respons adaptif terhadap ketidakpastian ekonomi dan ekologis wilayah pesisir.

Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga Pesisir. Dalam struktur ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro perempuan memiliki peran yang signifikan dalam menopang ekonomi rumah tangga, meskipun sering kali tidak tercatat secara formal. Perempuan pesisir terlibat dalam aktivitas pengolahan hasil laut, perdagangan kecil, serta pengelolaan keuangan rumah tangga. Seorang istri nelayan yang juga pelaku UMKM mengungkapkan:

“Kalau suami tidak melaut, saya tetap jualan olahan ikan atau kue. Hasilnya memang tidak besar, tapi cukup untuk belanja harian.” (wawancara, Ibu Hartati Hamid, 27/7/2025).

Peran perempuan ini menunjukkan adanya pembagian kerja berbasis gender yang adaptif, di mana perempuan menjadi penyangga ekonomi rumah tangga pada saat pendapatan utama dari laut mengalami penurunan. Namun demikian, keterlibatan perempuan sering kali masih terbatas pada skala kecil dan menghadapi kendala akses modal, pengetahuan, dan pasar.

Tantangan Ekonomi Lokal Pemuda Pesisir. Pemuda pesisir Desa Mallasoro berada pada posisi yang dilematis antara melanjutkan mata pencaharian tradisional dan mencari peluang ekonomi di luar sektor kelautan. Sebagian pemuda memilih bekerja sebagai nelayan atau petani rumput laut, sementara lainnya berupaya mencari pekerjaan di sektor informal atau merantau ke daerah lain. Seorang pemuda pesisir menyatakan:

“Kalau hanya mengandalkan melaut, penghasilannya tidak menentu. Banyak teman-teman yang memilih kerja di kota, tapi kalau ada peluang usaha di desa, pasti kami mau.” (Pemuda pesisir, wawancara 28/7/2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan peluang ekonomi lokal menjadi faktor pendorong migrasi pemuda, sekaligus mengindikasikan pentingnya pengembangan ekonomi alternatif berbasis potensi lokal, seperti wisata bahari dan ekonomi kreatif, untuk mempertahankan sumber daya manusia produktif di desa.

Peran kelembagaan Ekonomi Lokal dan Akses Permodalan. Kelembagaan ekonomi lokal, seperti KUB (kelompok tani dan nelayan), koperasi formal dan informal, serta BUMDes, berperan penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Mallasoro. Namun, efektivitas kelembagaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait permodalan, manajemen. Pengelola kelembagaan desa dan kemitraan eksternal. Berikut pernyataan anggota kelompok tani dan nelayan Mallasoro:

“Sebenarnya kelompok usaha sudah ada, tapi modalnya terbatas. Sehingga banyak nelayan masih pinjam ke pinggawa karena prosesnya cepat, walaupun risiko bunga tinggi.” (Basri, wawancara 28/7/2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem punggawa–sawi masih menjadi mekanisme ekonomi dominan dalam memenuhi kebutuhan modal masyarakat pesisir, meskipun sering kali menempatkan nelayan dalam posisi tawar yang lemah. Hal ini sekaligus memperlihatkan keterbatasan peran kelembagaan formal dalam

menjawab kebutuhan riil masyarakat serta kurangnya inovasi dan kolaborasi terhadap lembaga permodalan yang lebih besar.

Implikasi terhadap Ketahanan dan Keberlanjutan Ekonomi Pesisir. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro mencerminkan dinamika ekonomi yang bersifat rentan namun adaptif. Ketahanan ekonomi rumah tangga dibangun melalui kombinasi mata pencaharian utama dan sampingan, keterlibatan anggota keluarga, serta pemanfaatan jaringan sosial dan kearifan lokal. Namun, keberlanjutan ekonomi jangka panjang masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya nilai tambah produk, dan ketergantungan pada sektor primer berbasis sumber daya alam.

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro memerlukan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan ekonomi lokal, diversifikasi penghidupan, serta integrasi potensi usaha alternatif berbasis lokal sebagai strategi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

2.7.3 Struktur mata pencaharian

a. Nelayan Tangkap Tradisional dan Kerentanan Ekonomi Pesisir.

Profesi sebagai nelayan penangkap ikan dengan metode tradisional merupakan sumber penghidupan utama yang paling dominan di kalangan masyarakat pesisir desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Aktivitas penangkapan ikan ini dijalankan terutama oleh nelayan skala kecil yang mengandalkan perahu kayu berkapasitas terbatas, umumnya di bawah 10 GT (gross tonnage), serta menggunakan alat tangkap konvensional seperti jala, pancing, dan perangkap bambu. Pola produksi ini mencerminkan karakter ekonomi pesisir yang masih berbasis subsistensi dan bergantung pada teknologi sederhana, dengan tingkat efisiensi dan produktivitas yang relatif rendah.

Berdasarkan temuan lapangan, sekitar 70% nelayan di wilayah pesisir Teluk Mallasoro tergolong sebagai nelayan skala kecil, sementara sekitar 10% lainnya masuk dalam kategori nelayan tangkap skala sedang. Dominasi nelayan skala kecil ini menunjukkan keterbatasan struktur ekonomi lokal dalam mendorong transformasi teknologi dan penguatan modal usaha perikanan. Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada rendahnya daya jelajah nelayan, sehingga potensi sumber daya ikan yang melimpah di perairan Teluk Mallasoro yang berhadapan langsung dengan Laut Flores dan berbatasan dengan Pulau Libukang belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Seorang nelayan tradisional menggambarkan keterbatasan ini sebagai berikut:

"Ikan di laut itu sebenarnya banyak, tapi perahu kecil tidak bisa jauh-jauh. Kalau ombak mulai besar, kami tidak berani keluar, jadi hanya tangkap di sekitar teluk saja". (Nelayan tangkap skala kecil, wawancara 27/7/2025)

Rutinitas melaut masyarakat nelayan Mallasoro berlangsung secara konsisten hampir setiap hari, dengan jadwal kerja yang sangat ditentukan oleh dinamika musim dan kondisi cuaca. Nelayan umumnya memulai aktivitas sejak subuh dan kembali ke daratan menjelang siang hari untuk menjual hasil tangkapan di pasar lokal atau

kepada pedagang pengumpul. Pola kerja ini memperlihatkan ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi alam, sehingga aktivitas ekonomi nelayan sangat rentan terhadap gangguan ekologis.

Fluktuasi Pendapatan dan Ketidakpastian Ekonomi Nelayan. Salah satu karakter utama ekonomi nelayan tangkap tradisional di desa Mallasoro adalah fluktuasi pendapatan yang sangat tajam. Pendapatan nelayan tidak bersifat tetap dan sangat bergantung pada jumlah tangkapan, harga ikan di pasar, serta besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap kali melaut. Hal ini diungkapkan secara jelas oleh salah satu nelayan tangkap skala sedang, Bapak Annis (Dg. Situju), berusia 57 tahun:

“Penghasilan saya tidak menentu. Sekali melaut kadang bisa dapat satu sampai tiga juta setelah semua biaya operasional dibayar dan dibagi dengan tim serta pemilik perahu. Tapi kalau cuaca tidak mendukung, kadang tidak dapat apa-apa, malah bisa dibilang rugi”. (Dg. Situju, nelayan tangkap skala sedang, wawancara 27/7/2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menangkap ikan, tetapi juga oleh sistem pembagian hasil dan struktur kepemilikan alat produksi. Nelayan yang tidak memiliki perahu sendiri harus berbagi hasil dengan pemilik perahu dan awak lainnya, sehingga pendapatan bersih yang diterima sering kali tidak sebanding dengan tenaga dan risiko yang mereka hadapi.

Lebih lanjut, ketidakpastian pendapatan ini memperkuat kerentanan ekonomi rumah tangga nelayan, terutama ketika musim buruk berlangsung dalam waktu lama. Dalam situasi seperti ini, nelayan sering kali terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun kebutuhan rumah tangga, baik kepada pedagang pengumpul maupun punggawa lokal.

Ketergantungan pada Alam dan Keterbatasan Teknologi: Meskipun wilayah perairan Teluk Mallasoro dikenal memiliki potensi sumber daya ikan yang relatif tinggi, nelayan tradisional belum mampu memaksimalkan potensi tersebut karena keterbatasan teknologi alat tangkap dan minimnya dukungan modal. Radius operasional yang sempit membuat nelayan hanya menjangkau wilayah perairan tertentu, sementara daerah tangkapan yang lebih potensial berada di luar jangkauan perahu kecil yang mereka gunakan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Nikijuluw (2002) yang menyatakan bahwa produktivitas nelayan tradisional sangat ditentukan oleh interaksi kompleks antara faktor ekologis (musim, cuaca, dan ketersediaan stok ikan) dan faktor sosial-ekonomi (teknologi, modal, dan kelembagaan). Dalam konteks desa Mallasoro, keterbatasan teknologi memperkuat ketergantungan nelayan pada kondisi alam, sehingga risiko ekonomi menjadi semakin tinggi.

Seorang nelayan lainnya menegaskan:

“Kalau alatnya masih sederhana, kita cuma berharap sama alam. Kalau ikan lagi tidak masuk, mau bagaimana lagi.” (Yusuf, wawancara 28/7/2025).

Implikasi terhadap Ketahanan Penghidupan Nelayan: Temuan ini menunjukkan bahwa profesi nelayan tangkap tradisional di Desa Mallasoro berada

dalam situasi paradoks: di satu sisi, wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah; di sisi lain, keterbatasan teknologi, modal, dan kelembagaan menyebabkan nelayan tidak mampu memanfaatkan potensi tersebut secara berkelanjutan. Akibatnya, ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan sangat rapuh dan bergantung pada strategi adaptasi jangka pendek, seperti pengurangan konsumsi, pemanfaatan tenaga kerja keluarga, atau diversifikasi mata pencaharian. Dengan demikian, kondisi ekonomi nelayan tangkap tradisional di Desa Mallasoro tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan kebijakan pembangunan pesisir. Analisis ini menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi pesisir berbasis wisata bahari dan penguatan kelembagaan lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam siklus tahunan ekonomi pesisir desa Mallasoro, **musim timur** dipersepsikan oleh masyarakat nelayan sebagai periode yang relatif menguntungkan karena bertepatan dengan musim panen ikan. Pada periode ini, kondisi laut cenderung lebih tenang dan wilayah tangkapan berada relatif dekat, khususnya di sekitar perairan Pulau Libukang. Jarak tempuh yang tidak terlalu jauh menyebabkan biaya operasional melaut seperti bahan bakar dan konsumsi menjadi lebih rendah dibandingkan musim lainnya. Namun demikian, keuntungan yang seharusnya diperoleh nelayan pada musim ini tidak sepenuhnya dapat dimaksimalkan.

Keterbatasan alat tangkap yang masih bersifat tradisional serta armada yang kecil membuat volume tangkapan nelayan tetap terbatas. Selain itu, ketiadaan fasilitas penyimpanan dan pendinginan (cold storage) di tingkat nelayan dan desa menyebabkan hasil tangkapan yang melimpah tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, nelayan berada dalam posisi terpaksa untuk segera menjual ikan pada saat pasokan melimpah, yang justru mendorong penurunan harga di tingkat nelayan.

Seorang nelayan kecil menggambarkan kondisi ini sebagai berikut:

"Kalau musim timur ikan memang banyak, tapi karena kita tidak punya tempat simpan, ikan harus cepat dijual. Harga jatuh, tapi tetap dijual karena kalau tidak, ikan busuk". (Nelayan tangkap skala kecil, Yusuf, wawancara 28/7/2025).

Situasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan nelayan. Posisi tawar nelayan yang lemah dalam rantai pemasaran menyebabkan keuntungan ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara, sementara nelayan sebagai produsen utama hanya menerima margin yang terbatas.

Musim Barat dan Krisis Penghidupan Nelayan: Berbanding terbalik dengan musim timur, **musim barat** yang berlangsung sekitar enam bulan umumnya dari Oktober hingga Maret merupakan periode yang paling berat bagi kehidupan ekonomi nelayan Mallasoro. Pada musim ini, gelombang laut tinggi, angin kencang, serta cuaca yang tidak menentu secara signifikan membatasi bahkan menghentikan aktivitas melaut. Kondisi alam yang berisiko tidak hanya mengancam keselamatan nelayan, tetapi juga menyebabkan penurunan drastis pendapatan rumah tangga nelayan. Sebagian nelayan bahkan sama sekali tidak dapat melaut selama sehari-

hari atau berminggu-minggu, sehingga pemasukan ekonomi nyaris tidak ada. Seorang nelayan mengungkapkan:

“Kalau musim barat, kita lebih banyak di rumah. Kadang satu minggu tidak melaut sama sekali. Penghasilan otomatis turun, sementara kebutuhan tetap jalan.” (Anis, wawancara 27/7/2025)

Ketidakstabilan pendapatan yang bersifat musiman ini telah menjadi pola berulang yang dialami nelayan Mallasoro setiap tahun. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh perubahan iklim yang membuat cuaca semakin sulit diprediksi. Ketidakpastian ini mendorong nelayan dan rumah tangga pesisir untuk mencari strategi penghidupan alternatif, meskipun pilihan yang tersedia sangat terbatas.

Hambatan Sistemik dan Keterbatasan Akses Permodalan: Menghadapi realitas ekonomi yang penuh ketidakpastian, nelayan tradisional Mallasoro terperangkap dalam berbagai hambatan struktural yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Hambatan paling mendasar adalah ketiadaan akses terhadap permodalan untuk meningkatkan kapasitas armada dan teknologi penangkapan ikan. Tanpa dukungan modal yang memadai, nelayan tidak mampu beralih dari alat tangkap tradisional menuju teknologi yang lebih produktif. Keterbatasan ini diperkuat oleh sulitnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Persyaratan agunan yang tinggi menjadi penghalang utama bagi nelayan kecil. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Annis (Dg. Situju):

“Untuk dapat kredit beli kapal itu sangat susah. Jaminan harus lebih besar dari modal. Saya dulu beli kapal 250 juta, sertifikat tanah dijadikan jaminan. Tidak semua nelayan punya itu.” (Dg. Situju, nelayan tangkap skala sedang, wawancara 27/7/2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hanya nelayan dengan aset tertentu yang memiliki peluang mengakses kredit formal, sementara mayoritas nelayan kecil dan buruh nelayan secara struktural tersingkir dari sistem pembiayaan formal.

Ketergantungan pada Koperasi Informal dan Pedagang Perantara: Ketidakmampuan mengakses kredit perbankan memaksa nelayan kecil untuk bergantung pada lembaga keuangan informal, seperti koperasi pribadi, pedagang ikan, atau punggawa lokal. Namun, koperasi informal yang beroperasi di Desa Mallasoro umumnya memiliki kapasitas modal yang sangat terbatas. Bantuan pinjaman yang diberikan sering kali tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan operasional melaut dalam skala yang lebih besar, seperti perjalanan melaut selama satu minggu.

Seorang buruh nelayan, Bapak Rais Dg. Jalling, menggambarkan kondisi tersebut:

“Saya tidak punya kerja tetap. Kadang ikut melaut, kadang kerja di rumput laut, berkebun, atau jadi tukang bangunan. Mau pinjam modal besar tidak bisa karena tidak ada jaminan.” (Rais Dg. Jalling, buruh nelayan, wawancara 27/7/2025).

Dalam kondisi ini, nelayan tidak memiliki pilihan selain bergantung pada pedagang perantara dengan skema pinjaman berbasis ikatan pemasaran. Sistem ini memang memberikan kemudahan jangka pendek, namun dalam jangka panjang memperkuat ketergantungan dan melemahkan posisi tawar nelayan. Harga jual ikan

sepenuhnya ditentukan oleh pedagang, sementara nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada pihak yang sama sebagai bentuk pelunasan utang. Sebagaimana ditegaskan Kusnadi (2009), keterbatasan akses terhadap modal usaha dari lembaga keuangan formal merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan struktural nelayan. Ketergantungan pada sistem patron-klien dengan punggawa dan tengkulak sering kali menempatkan nelayan dalam relasi yang timpang dan eksploitatif, sehingga sulit keluar dari lingkaran utang dan kemiskinan.

Keterbatasan Pendidikan dan Hambatan Diversifikasi Penghidupan:

Situasi ini semakin diperparah oleh rendahnya capaian pendidikan formal dan terbatasnya pengetahuan serta keterampilan non-perikanan di kalangan nelayan tradisional Mallasoro. Kondisi tersebut membatasi kemampuan nelayan dan anggota rumah tangganya untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian ke sektor-sektor alternatif yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Akibatnya, strategi bertahan hidup yang dilakukan cenderung bersifat jangka pendek dan reaktif, seperti bekerja serabutan atau memanfaatkan tenaga kerja keluarga.

Dengan demikian, **dinamika ekonomi nelayan Mallasoro menunjukkan** adanya kerentanan struktural yang bersumber dari kombinasi faktor alam, teknologi, permodalan, kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan produksi, melainkan membutuhkan intervensi kebijakan yang menyeluruh melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal, skema pembiayaan yang inklusif, serta pengembangan strategi diversifikasi penghidupan yang berkelanjutan.

Keterbatasan infrastruktur pendukung perikanan menjadi faktor struktural lain yang secara signifikan memengaruhi rendahnya kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Mallasoro. Sarana dan prasarana dasar seperti dermaga pendaratan ikan yang representatif, tempat pelelangan ikan (TPI), fasilitas pengolahan hasil tangkapan, hingga kualitas akses jalan menuju pusat-pusat pemasaran regional masih berada dalam kondisi yang belum memadai. Berdasarkan temuan lapangan, ketiadaan TPI yang berfungsi optimal menyebabkan seluruh mekanisme penjualan ikan berlangsung secara informal dan sangat bergantung pada pedagang perantara. Akibatnya, nelayan tidak memiliki ruang tawar untuk menentukan harga yang lebih adil atas hasil tangkapan mereka.

Kondisi ini diungkapkan oleh Bapak Annis Dg. Situju yang menyatakan bahwa:

“Kalau kami pulang melaut, tidak ada tempat lelang, langsung pedagang yang datang. Mau tidak mau dijual juga, karena ikan tidak bisa disimpan lama. Kalau ditahan, bisa busuk. Jadi harga ikut mereka.” (Wawancara, 27/7/2025).

Ketiadaan fasilitas penyimpanan dingin (*cold storage*) semakin memperlemah posisi nelayan, karena hasil tangkapan yang bersifat mudah rusak (*perishable goods*) harus segera dilepas ke pasar meskipun harga sedang rendah. Hal ini sejalan dengan pandangan Dahuri, Rais, Ginting, dan Sitepu (2004) yang menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur perikanan mulai dari akses jalan yang buruk, dermaga pendaratan ikan yang tidak memadai, TPI yang tidak berfungsi optimal, hingga

minimnya fasilitas pengolahan dan penyimpanan berkontribusi langsung terhadap lemahnya daya saing nelayan kecil dan menguatkan dominasi tengkulak dalam rantai distribusi perikanan.

Permasalahan ekonomi nelayan Mallasoro tidak berhenti pada hambatan struktural infrastruktur semata, tetapi juga diperparah oleh tingginya risiko usaha dan ketidakpastian pendapatan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrem, pergeseran musim angin, dan meningkatnya frekuensi gelombang tinggi telah mengganggu pola melaut tradisional yang selama ini berlandaskan pada pengetahuan lokal dan pengalaman turun-temurun. Beberapa nelayan mengungkapkan bahwa tanda-tanda alam yang dahulu menjadi pedoman waktu melaut kini semakin sulit dibaca.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang buruh nelayan:

“Dulu kita bisa lihat tanda angin sama arus, sekarang susah ditebak. Kadang pagi bagus, siang langsung ombak besar. Kalau begini, kami lebih banyak tidak melau”. (Rais Dg. Jalling. Wawancara, 27/7/2025).

Tingginya risiko keselamatan di laut, minimnya perlengkapan keselamatan, serta ketiadaan jaminan sosial dan asuransi kecelakaan kerja menjadikan profesi nelayan semakin tidak menarik bagi sebagian anggota komunitas pesisir, khususnya buruh nelayan yang tidak memiliki armada sendiri. Kondisi ini mendorong terjadinya pergeseran mata pencaharian, baik secara sementara maupun permanen, ke sektor-sektor informal lainnya seperti buruh bangunan, tukang ojek, pedagang kecil, atau tenaga kerja budidaya rumput laut. Aktivitas melaut pun cenderung dilakukan secara musiman, yakni hanya pada periode cuaca relatif aman dan musim ikan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap sektor perikanan tangkap telah menciptakan kerentanan ekonomi yang serius bagi masyarakat nelayan desa Mallasoro. Fluktuasi pendapatan yang tajam, biaya operasional yang terus meningkat, serta keterbatasan teknologi dan jangkauan wilayah tangkap membentuk suatu siklus ketidakpastian yang sulit diputus. Nelayan dengan modal terbatas semakin kesulitan meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga terjebak dalam kondisi pendapatan rendah dan tidak stabil.

Namun demikian, di balik berbagai keterbatasan tersebut, masyarakat nelayan pesisir Mallasoro sesungguhnya memiliki potensi sosial dan kultural yang dapat menjadi basis pengembangan strategi penghidupan alternatif. Pengetahuan lokal tentang kondisi laut, keterampilan navigasi tradisional, serta kepemilikan armada perahu kecil membuka peluang untuk diversifikasi usaha berbasis wisata bahari. Potensi ini mencakup aktivitas wisata memancing tradisional, perjalanan antar-pulau (island hopping) di sekitar Pulau Libukang, hingga wisata edukasi maritim yang menonjolkan pengalaman autentik kehidupan nelayan.

Temuan ini relevan dengan pandangan Ardiwidjaja (2019) yang menekankan bahwa masyarakat nelayan dengan modal sosial berupa pengetahuan lokal dan armada tradisional memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata bahari berbasis komunitas. Diversifikasi semacam ini tidak hanya berpotensi menambah sumber pendapatan, tetapi juga menawarkan mata pencaharian yang relatif lebih

aman dan berkelanjutan, tanpa harus menghilangkan identitas budaya maritim yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, kondisi masyarakat nelayan tradisional di desa Mallasoro memperlihatkan keterkaitan yang erat antara keterbatasan struktural, risiko lingkungan, dan strategi adaptasi ekonomi. Realitas ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang terintegrasi, tidak hanya pada aspek peningkatan kapasitas penangkapan, tetapi juga pada penguatan infrastruktur, akses pasar, perlindungan sosial nelayan, serta pengembangan alternatif penghidupan berbasis potensi lokal yang dimiliki komunitas pesisir.

2.7.4 Kegiatan budidaya rumput laut

Kegiatan budidaya rumput laut merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir desa Mallasoro. Aktivitas ini berkembang sebagai strategi adaptif masyarakat dalam merespons ketidakpastian pendapatan dari sektor perikanan tangkap, terutama pada periode cuaca buruk dan musim paceklik ikan. Budidaya rumput laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan tambahan, tetapi bagi sebagian rumah tangga nelayan telah menjadi mata pencaharian utama yang relatif lebih stabil dibandingkan penangkapan ikan tradisional.

Dalam praktiknya, budidaya rumput laut di desa Mallasoro memperlihatkan pembagian kerja berbasis gender yang cukup seimbang dan saling melengkapi. Kaum laki-laki umumnya berperan dominan pada tahap awal hingga proses pemanenan di laut. Aktivitas tersebut meliputi persiapan sarana budidaya seperti pemasangan tali panjang (*long line*) atau metode lepas dasar, pengikatan bibit rumput laut, pemasangan pelampung, serta pengangkutan bibit ke lokasi budidaya menggunakan perahu. Tahapan ini membutuhkan kekuatan fisik, keterampilan menyelam, serta pengetahuan navigasi laut untuk menentukan lokasi budidaya yang aman dan produktif dengan mempertimbangkan arus, kedalaman, dan kualitas perairan.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kalau tanam rumput laut, kita harus tahu arus sama kedalaman. Tidak bisa sembarang pasang tali, nanti hanyut atau rumput lautnya rusak. Itu biasanya kami laki-laki yang urus”. (Rais Dg. Jalling. Wawancara, 27/7/2025).

Selain penanaman, kaum laki-laki juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan rutin seperti membersihkan kotoran atau organisme pengganggu yang menempel pada rumput laut serta memperbaiki tali dan pelampung yang rusak akibat gelombang atau arus kuat. Proses pemanenan yang dilakukan setelah masa tanam sekitar 45-60 hari juga didominasi oleh laki-laki karena memerlukan tenaga ekstra untuk mengangkat rumput laut yang telah menyerap air dan memiliki bobot cukup berat dari laut ke perahu.

Di sisi lain, peran perempuan menjadi sangat krusial pada tahap pascapanen, khususnya dalam menentukan kualitas akhir produk rumput laut. Setelah hasil panen dibawa ke darat, kaum perempuan terlibat secara intensif dalam proses pemilahan, pembersihan, pengeringan, hingga pengemasan rumput laut. Mereka dengan teliti

memisahkan rumput laut yang berkualitas baik dari yang rusak atau terkontaminasi, membersihkannya dari pasir, kerang kecil, dan sisa-sisa organisme laut lain yang menempel.

Seorang ibu rumah tangga sekaligus petani rumput laut, Ibu Nurlia (45 tahun), menjelaskan bahwa:

“Kalau pengeringan tidak bagus, harga langsung turun. Jadi harus betul-betul kering, tapi tidak boleh terlalu panas. Kami biasanya bolak-balik rumput laut tiap hari”. (Wawancara, 28/7/2025).

Proses pengeringan menjadi keahlian tersendiri yang menuntut ketelitian dan kesabaran. Perempuan mengatur rumput laut di atas para-para bambu atau terpal dengan teknik tertentu agar mendapatkan sinar matahari secara merata dan tidak terlalu terpapar panas berlebih yang dapat merusak tekstur dan warna. Pengawasan kadar kekeringan dilakukan secara manual dengan meraba tekstur rumput laut, sebuah praktik berbasis pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun. Kualitas pengeringan yang baik terbukti berkontribusi terhadap peningkatan nilai jual rumput laut, bahkan dapat menaikkan harga hingga 30-40 persen dibandingkan produk yang dikeringkan secara asal-asalan.

Keterlibatan perempuan dalam budidaya rumput laut tidak hanya memperkuat ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga mencerminkan bentuk kontribusi nyata perempuan pesisir dalam menjaga keberlanjutan penghidupan keluarga. Aktivitas ini memungkinkan perempuan tetap produktif secara ekonomi tanpa harus meninggalkan ruang domestik sepenuhnya, sehingga menciptakan keseimbangan antara peran ekonomi dan sosial dalam rumah tangga nelayan.

Lebih jauh, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petani rumput laut di desa Mallasoro mulai dari teknik penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga penanganan pascapanen merupakan modal sosial yang sangat bernilai untuk pengembangan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kontekstual, karena berakar pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik perairan setempat, siklus musim, serta dinamika ekosistem pesisir.

Modal sosial tersebut membuka peluang untuk pengembangan usaha turunan seperti wisata edukasi budidaya rumput laut, pelatihan pengolahan pascapanen, hingga produk olahan berbasis rumput laut yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan penguatan kelembagaan, akses pasar, dan dukungan kebijakan yang tepat, budidaya rumput laut tidak hanya berfungsi sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*), tetapi juga berpotensi menjadi basis penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir desa Mallasoro.

Distribusi pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai petani rumput laut di desa Mallasoro sangat ditentukan oleh faktor-faktor produksi, terutama skala usaha, kepemilikan modal, akses terhadap sarana produksi, serta posisi petani dalam rantai pemasaran. Secara umum, petani rumput laut di wilayah ini didominasi oleh petani skala kecil yang masih mengandalkan metode budidaya tradisional dengan menggunakan rakit sederhana dan sampan atau perahu kecil. Keterbatasan ini

berdampak langsung pada rendahnya volume produksi, tingginya risiko kegagalan panen, serta lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga jual.

Sebagian besar petani kecil menghadapi kendala permodalan yang kronis sehingga tidak mampu memperluas jumlah bentangan atau meningkatkan kualitas sarana budidaya. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses pasar, di mana petani rumput laut hanya bergantung pada pengepul lokal sebagai saluran utama pemasaran. Dalam situasi demikian, fluktuasi harga yang ditentukan sepihak oleh pengepul seringkali merugikan petani kecil, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi rendah dan tidak stabil sepanjang tahun.

Sebaliknya, petani rumput laut berskala besar yang memiliki modal relatif kuat, jumlah rakit yang lebih banyak, serta akses terhadap teknologi budidaya yang lebih baik cenderung memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi. Mereka juga memiliki jaringan pemasaran yang lebih luas dan fleksibel, sehingga mampu menunda penjualan ketika harga rendah dan memilih waktu yang lebih menguntungkan untuk menjual hasil panen. Ketimpangan ini menunjukkan adanya diferensiasi sosial-ekonomi yang cukup tajam di antara pelaku budidaya rumput laut di desa Mallasoro. Lebih jauh, struktur ketenagakerjaan dalam budidaya rumput laut di wilayah ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir belum berada pada kategori petani mandiri. Banyak di antara mereka berposisi sebagai buruh harian yang menjual tenaga kerja kepada pemilik modal atau pemilik rakit. Pola kerja ini tercermin dari sistem upah berbasis jumlah bentangan yang diselesaikan. Pada tahap penanaman, upah buruh umumnya hanya sekitar Rp5.000 per bentangan, dengan kapasitas kerja harian rata-rata 10-15 bentangan, sehingga pendapatan harian yang diperoleh berkisar antara Rp50.000-Rp75.000. Pada masa panen, pendapatan buruh dapat meningkat hingga sekitar Rp100.000 per hari, namun sangat bergantung pada kualitas hasil panen dan harga jual rumput laut di pasaran.

Kondisi ini diungkapkan secara gamblang oleh Rais Dg. Jalling, seorang buruh petani rumput laut yang beroperasi di kawasan pesisir Bungung Pandang:

"Boska kadang tong rugiki punna kodii sedeng kualitasna rumput lautka katte tena tong nanggappa bonus". (Artinya: Kadang kami juga rugi, apalagi kalau kualitas rumput laut jelek, kami tidak dapat bonus apa-apa). (Wawancara, 12/4/2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa buruh tani rumput laut berada pada posisi yang sangat rentan terhadap risiko produksi. Ketika kualitas rumput laut menurun akibat faktor lingkungan atau teknis, tidak hanya pemilik modal yang terdampak, tetapi buruh juga kehilangan kesempatan memperoleh tambahan pendapatan atau bonus. Bahkan, dalam kondisi tertentu, buruh sama sekali tidak memperoleh pekerjaan karena instalasi budidaya rusak atau tanaman gagal tumbuh. Kerentanan ini semakin diperparah oleh karakteristik ekologis wilayah pesisir Mallasoro. Kondisi perairan dengan dasar berpasir hingga kedalaman sekitar 10 meter menyebabkan instalasi budidaya rentan terhadap gangguan gelombang dan arus bawah laut. Pada periode tertentu, terutama saat memasuki musim barat, ombak tinggi dan arus kuat sering menyebabkan bibit rumput laut terlepas atau hanyut, sehingga tingkat kehilangan tanaman menjadi cukup tinggi.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan petani:

“Kalau ombak besar, banyak tali putus dan bibit hanyut. Kita tanam ulang lagi, tapi modalnya sudah berkurang”. (Wawancara, 13/4/2025).

Perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem seperti peningkatan intensitas gelombang, angin kencang, serta fluktuasi suhu air laut turut memperbesar risiko kegagalan budidaya. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan rumput laut yang mengalami stres fisiologis, sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen menurun. Hal ini sejalan dengan temuan Hurtado et al. (2015) yang menyatakan bahwa perubahan suhu dan dinamika perairan laut dapat secara signifikan memengaruhi produktivitas budidaya rumput laut, khususnya pada sistem budidaya tradisional yang minim adaptasi teknologi.

Selain faktor alam, ancaman lain yang dihadapi petani rumput laut di Desa Mallasoro adalah pencemaran perairan akibat sampah kiriman dari laut lepas maupun limbah domestik dari daratan. Sampah plastik dan material lainnya kerap tersangkut pada tali budidaya, menghambat pertumbuhan rumput laut dan meningkatkan risiko penyakit tanaman. Serangan hama dan penyakit juga menjadi masalah laten yang belum sepenuhnya dapat diatasi oleh petani karena keterbatasan pengetahuan teknis dan akses terhadap sarana pengendalian yang memadai.

Dengan demikian, distribusi pendapatan petani rumput laut di Desa Mallasoro tidak hanya mencerminkan perbedaan skala usaha, tetapi juga menggambarkan struktur ketimpangan yang bersumber dari akses modal, teknologi, dan sumber daya produksi, serta tingginya kerentanan ekologis dan ekonomi. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan posisi petani kecil dan buruh tani dalam rantai nilai budidaya rumput laut agar tercipta distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi dan sosial, profesi sebagai petani rumput laut di Desa Mallasoro tidak hanya dihadapkan pada persoalan teknis produksi, tetapi juga pada kendala struktural yang bersumber dari keterbatasan modal usaha, akses lahan budidaya, serta dinamika sosial akibat kontestasi pemanfaatan ruang pesisir. Keterbatasan modal menjadi faktor utama yang menghambat petani dan buruh rumput laut untuk memperluas skala usaha. Dengan kebutuhan biaya produksi berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 per siklus tanam, sebagian besar petani kecil tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengembangkan jumlah bentangan atau meningkatkan kualitas sarana budidaya secara mandiri.

Selain persoalan modal, ketersediaan dan kepastian lahan budidaya juga menjadi masalah krusial. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah pesisir Pantai Mallasoro, khususnya kawasan Bungung Pandang, mulai berkembang sebagai destinasi wisata bahari, terutama olahraga air kitesurfing. Perkembangan ini memicu konflik kepentingan antara petani rumput laut yang memanfaatkan perairan dangkal untuk budidaya dan pengembang pariwisata yang membutuhkan ruang perairan terbuka untuk aktivitas wisata.

Konflik tersebut bersifat sosial-ekologis, karena menyangkut hak akses terhadap ruang pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Namun demikian, konflik ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka

berkepanjangan, karena adanya mekanisme dialog dan musyawarah melalui forum komunitas nelayan, pengembang pariwisata, dan pemerintah desa. Hasil dari proses tersebut adalah kesepakatan pembagian zonasi pemanfaatan ruang pesisir, di mana wilayah bibir pantai ditetapkan sebagai zona aktivitas wisata olahraga air, sementara kawasan budidaya rumput laut dialihkan ke perairan dengan kedalaman sekitar 10 meter.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hadi, pengelola Resort Bitikite dan penanggung jawab olahraga kitesurfing di Pantai Mallasoro:

“Solusinya kita duduk bersama, nelayan, pemerintah desa, dan pengelola wisata. Disepakati area pantai untuk wisata, dan rumput laut dipindahkan ke agak ke tengah. Tapi ada catatan, biaya pemindahan bibit dan instalasi itu kami tanggung sebagai bentuk kompensasi”. (Wawancara, 14/2/2025).

Kesepakatan ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara kepentingan ekonomi masyarakat lokal dan pengembangan pariwisata. Namun demikian, persoalan tidak sepenuhnya selesai, terutama terkait pembagian waktu atau musim aktivitas. Budidaya rumput laut idealnya dilakukan pada periode April-Oktober ketika cuaca relatif stabil dan salinitas air laut konsisten, sementara pada periode yang sama olahraga kitesurfing justru memasuki musim puncak karena angin tenggara (trade winds) bertiup stabil dengan kecepatan 15-25 knot. Tumpang tindih musim ini menyulitkan tercapainya kesepakatan pembagian waktu pemanfaatan ruang, sehingga potensi gesekan sosial tetap terbuka.

Situasi ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui budidaya rumput laut dan pengembangan pariwisata bahari di Desa Mallasoro membutuhkan desain kebijakan dan tata kelola ruang pesisir yang integratif agar kedua sektor dapat tumbuh secara simultan tanpa saling merugikan. Diversifikasi ekonomi berbasis pemanfaatan ruang secara adaptif menjadi solusi paling realistis dalam konteks ini. Dalam praktik budidaya rumput laut, keterbatasan akses permodalan formal mendorong petani untuk mencari alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan pemodal individu. Pola kerja sama ini umumnya berbentuk pinjaman modal dengan skema bagi hasil atau pembayaran secara mencicil setelah panen. Karena koperasi nelayan dan lembaga keuangan lokal belum mampu menyediakan pinjaman dengan nominal yang dibutuhkan, relasi permodalan informal menjadi pilihan utama.

Namun, relasi ini bersifat selektif dan berbasis kepercayaan. Tidak semua petani dapat mengakses modal, kecuali mereka memiliki hubungan kekerabatan, rekam jejak kerja sebagai buruh, atau relasi jangka panjang dengan pemodal yang sering kali juga berperan sebagai pedagang perantara hasil panen. Dalam kondisi seperti ini, petani berada pada posisi tawar yang lemah, terutama dalam menentukan harga jual rumput laut. Prihandoko et al. (2018) menjelaskan bahwa pola pembiayaan informal dalam sektor perikanan dan kelautan cenderung menciptakan ketergantungan struktural, di mana pemodal memiliki kontrol terhadap harga dan distribusi hasil produksi. Kondisi ini juga ditemukan di desa Mallasoro, meskipun sebagian petani memandang sistem tersebut sebagai solusi praktis.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rais:

“Kalau dari segi untung besar memang tidak, tapi setidaknya kita tidak repot cari pembeli. Mereka yang datang langsung ke rumah, jadi hasil panen cepat terjual.” (Wawancara, 12/4/2025).

Pernyataan ini menunjukkan adanya ambivalensi dalam relasi permodalan dan pemasaran. Di satu sisi, sistem ini memberikan kemudahan dan kepastian penjualan; di sisi lain, sistem tersebut membatasi peluang petani untuk memperoleh keuntungan yang lebih optimal dan menyulitkan perencanaan keuangan jangka panjang. Kewajiban membayar cicilan modal, ditambah kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari, membuat pendapatan petani bersifat “habis pakai” dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

Kekhawatiran pemberi modal juga menjadi faktor yang memengaruhi akses pembiayaan. Risiko kegagalan panen akibat cuaca ekstrem, perubahan kualitas perairan, dan konflik pemanfaatan lahan membuat pemodal bersikap sangat selektif. Hal ini mempersempit ruang gerak petani kecil untuk berkembang dan memperkuat ketimpangan dalam struktur ekonomi budidaya rumput laut.

Struktur rantai nilai dalam industri rumput laut di desa Mallasoro memperlihatkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Petani sebagai produsen primer berada pada posisi paling bawah dalam rantai nilai dan hanya menerima bagian terkecil dari nilai jual akhir produk. Sebaliknya, pedagang pengumpul, eksportir, dan industri pengolahan memperoleh margin keuntungan yang jauh lebih besar. Dominasi pedagang perantara dalam sistem pemasaran semakin memperlemah posisi petani, terutama ketika mereka membutuhkan uang tunai secara cepat atau tidak memiliki fasilitas penyimpanan untuk menunda penjualan. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperbaiki distribusi nilai dalam sektor budidaya rumput laut. Pembentukan koperasi nelayan yang dikelola secara profesional, penguatan akses kredit mikro berbunga rendah, serta pembangunan infrastruktur pemasaran yang menghubungkan petani langsung dengan industri pengolahan atau pasar ekspor merupakan langkah strategis yang mendesak. Namun demikian, upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil rumput laut masih menghadapi keterbatasan. Sebagaimana disampaikan oleh Dg. Baji, Ketua UMKM setempat:

“Pengolahan rumput laut masih sangat terbatas, pelakunya sedikit. Kalau ini bisa dikembangkan, petani tidak hanya menjual bahan mentah, tapi sudah ada nilai tambah”. (Wawancara, 12/7/2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM pengolahan hasil laut memiliki potensi besar untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Tanpa penguatan pada sisi hilir, petani rumput laut akan terus berada dalam posisi rentan dan bergantung pada mekanisme pasar yang tidak berpihak.

2.7.5 Budidaya Tambak Ikan dan Udang sebagai Aktivitas Ekonomi Masyarakat Desa Mallasoro

Budidaya tambak ikan dan udang merupakan salah satu aktivitas ekonomi penting yang digeluti oleh sebagian masyarakat Desa Mallasoro. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki dewasa, mengingat karakter pekerjaan yang

menuntut kemampuan fisik, ketelitian, serta pengalaman teknis dalam pengelolaan tambak. Aktivitas budidaya tambak tidak bersifat instan, melainkan melalui tahapan yang relatif panjang dan berisiko, mulai dari persiapan lahan, penebaran benih, pengelolaan kualitas air, pemberian pakan secara terjadwal, hingga pemantauan intensif terhadap kesehatan ikan dan udang.

Seorang petambak penggarap (*Ramli*) menjelaskan bahwa:

“Mengelola tambak itu tidak bisa sembarang, Pak. Dari awal tebar benih sampai panen, kita harus terus pantau air, pakan, dan penyakit. Kalau lengah sedikit saja, bisa gagal panen”. (Wawancara, 12/7/2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budidaya tambak menuntut komitmen kerja yang tinggi, namun tidak selalu diikuti dengan jaminan pendapatan yang memadai. Hal ini berkaitan erat dengan struktur kepemilikan dan sistem pengelolaan tambak yang berlaku di desa Mallasoro.

Distribusi pendapatan dalam usaha tambak umumnya tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh skala usaha, sistem bagi hasil, serta kepemilikan modal. Sebagaimana dikemukakan oleh Primyastanto et al. (2010), dalam sistem bagi hasil tradisional tambak, pemilik lahan atau pemilik modal cenderung memperoleh porsi keuntungan yang lebih besar dibandingkan petambak penggarap maupun buruh tambak. Pola pembagian hasil seperti sistem *maro* (50:50), *mertelu* (66:34), atau bentuk kesepakatan lain memang secara formal terlihat adil, namun dalam praktiknya sering menempatkan petambak penggarap pada posisi yang kurang menguntungkan karena beban risiko produksi lebih banyak ditanggung oleh mereka.

Kondisi tersebut diakui oleh salah seorang petambak penggarap yang menyatakan bahwa:

“Biasanya kami dapat bagian sekitar 30 sampai 40 persen setelah dipotong biaya. Kalau panen bagus, masih bisa bertahan. Tapi kalau gagal, kami tidak dapat apa-apa, malah kadang masih punya utang”. (Wawancara, Ilham 12/7/2025).

Di desa Mallasoro, mayoritas pelaku usaha tambak merupakan petambak penggarap dan buruh tambak, sementara kepemilikan lahan dan modal berada pada segelintir pihak. Petambak penggarap mengelola tambak milik orang lain dengan sistem bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh sangat fluktuatif dan bergantung pada keberhasilan panen serta harga pasar. Setelah dikurangi biaya operasional seperti pakan, benih, dan perawatan tambak, bagian yang diterima petambak penggarap seringkali berada pada tingkat yang relatif rendah.

Sementara itu, buruh tambak berada pada posisi yang lebih rentan. Mereka bekerja sebagai tenaga harian atau musiman dengan upah berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, tergantung pada jenis pekerjaan dan kebutuhan tambak. Namun, tidak adanya kepastian kerja membuat pendapatan buruh tambak menjadi sangat tidak stabil.

Seorang buruh tambak menggambarkan situasi tersebut sebagai berikut:

“Kalau ada kerja di tambak, kami datang. Tapi kalau tidak musimnya, ya menganggur. Upah juga tergantung kerja apa, tidak tentu setiap hari.” (Wawancara, Ilham 12/7/2025).

Ketidastabilan pendapatan ini semakin diperparah oleh risiko kegagalan panen akibat penyakit, perubahan cuaca ekstrem, maupun kondisi lingkungan tambak yang kurang produktif. Dalam situasi tertentu, kegagalan panen dapat menyebabkan petambak penggarap dan buruh tambak kehilangan sumber penghidupan sama sekali, tanpa adanya sistem jaminan sosial yang memadai. Kondisi ini menempatkan mereka sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi dalam struktur usaha tambak di wilayah pesisir.

Seiring dengan menurunnya produktivitas tambak dalam beberapa tahun terakhir, jumlah petambak penggarap di Desa Mallasoro juga mengalami penurunan. Beberapa informan menyebutkan bahwa sebagian petambak memilih meninggalkan usaha tambak dan beralih ke pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan atau memiliki risiko lebih kecil.

Menanggapi kondisi tersebut, diversifikasi usaha tambak menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir. Diversifikasi dapat dilakukan melalui penerapan sistem polikultur, yakni membudidayakan beberapa jenis komoditas secara bersamaan dalam satu petak tambak, seperti kombinasi udang dengan ikan bandeng atau kepiting. Pola ini dinilai mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan tambak dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Selain diversifikasi horizontal dalam kegiatan budidaya, diversifikasi vertikal melalui pengolahan hasil tambak juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah. Pengolahan produk seperti udang beku, bandeng presto, abon ikan, atau kerupuk udang tidak hanya memperluas sumber pendapatan petambak, tetapi juga membuka peluang keterlibatan kelompok perempuan dan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi produktif.

Kabid Destinasi Wisata Dinas Pariwisata menyampaikan pandangannya bahwa:

“Kalau hasil tambak bisa diolah di desa, nilainya pasti lebih tinggi. Apalagi kalau dikaitkan dengan wisata kuliner, ini bisa jadi ciri khas Desa Mallasoro sebagai desa wisata.” (Wawancara, 27/7/2025).

Dengan demikian, pengembangan diversifikasi usaha tambak tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi petambak, tetapi juga mendukung agenda pembangunan desa berbasis potensi lokal dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Diversifikasi usaha tambak merupakan salah satu strategi adaptif yang semakin relevan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan ekologis yang dialami oleh petambak di desa Mallasoro. Menurut Anna (2019), penerapan diversifikasi usaha tambak terbukti mampu meningkatkan pendapatan petambak hingga 40–60 persen dibandingkan dengan sistem monokultur tradisional. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya bersumber dari naiknya produktivitas per satuan luas tambak, tetapi juga dari bertambahnya sumber pendapatan melalui pengelolaan berbagai komoditas secara simultan.

Temuan tersebut sejalan dengan pengalaman empiris sebagian petambak di Desa Mallasoro yang mulai mencoba sistem polikultur, meskipun masih dalam skala terbatas. Seorang petambak penggarap (Ramli) mengungkapkan bahwa:

“Kalau hanya satu jenis saja, risikonya besar. Sekarang kami coba campur udang dengan bandeng. Memang lebih repot, tapi kalau salah satu gagal, yang lain masih bisa menutupi”. (Wawancara, 12/7/2025).

Pola polikultur ini memungkinkan petambak memaksimalkan fungsi tambak secara lebih efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu komoditas utama yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan serangan penyakit. Selain itu, diversifikasi juga membuka peluang pemanfaatan waktu yang lebih optimal, terutama di luar musim panen utama. Pada periode tersebut, petambak dapat melakukan aktivitas pengolahan hasil tambak atau mengembangkan usaha sampingan yang masih berkaitan dengan sektor perikanan.

Seorang informan yang terlibat dalam pengolahan hasil tambak menyatakan:

“Kalau nunggu panen saja, waktunya panjang. Tapi kalau ada olahan seperti ikan asap atau abon ikan, bisa tetap ada pemasukan walaupun belum panen”. (Wawancara, Ramli 12/7/2025).

Lebih jauh, diversifikasi usaha tambak tidak hanya terbatas pada aspek produksi perikanan, tetapi juga dapat dikembangkan ke arah diversifikasi non-perikanan. Integrasi tambak dengan kegiatan wisata edukasi atau agrowisata mulai dipandang sebagai alternatif pengembangan ekonomi desa. Tambak tidak hanya berfungsi sebagai ruang produksi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan atraksi wisata, khususnya bagi pengunjung yang ingin mengenal praktik budidaya perikanan secara langsung.

Pegawai Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa:

“Tambak ini sebenarnya bisa jadi tempat edukasi. Anak sekolah atau wisatawan bisa lihat langsung proses budidaya. Kalau dikelola baik, bisa menambah pendapatan desa dan petambak”. (Wawancara, Suaib 27/7/2025).

Meskipun demikian, keberhasilan diversifikasi usaha tambak sangat bergantung pada sejumlah faktor pendukung. Pengetahuan dan keterampilan petambak dalam mengelola sistem budidaya terpadu, akses terhadap teknologi dan modal, serta dukungan kelembagaan menjadi prasyarat utama agar diversifikasi tidak justru menambah beban risiko. Tanpa pendampingan yang memadai, diversifikasi berpotensi gagal dan memperburuk kondisi ekonomi petambak kecil.

Dalam konteks tersebut, intervensi kebijakan dan penguatan kelembagaan menjadi sangat penting untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pembentukan kelompok petambak atau koperasi dinilai dapat memperkuat posisi tawar petambak dalam mengakses permodalan, pengadaan sarana produksi, serta pemasaran hasil tambak. Kelembagaan kolektif juga berperan sebagai ruang belajar bersama dan mekanisme perlindungan sosial bagi anggotanya. Seorang pengurus kelompok petambak menuturkan bahwa:

“Kalau kami bergerak sendiri-sendiri, sulit. Tapi kalau dalam kelompok, lebih mudah dapat bantuan, pelatihan, dan juga akses modal”. (Wawancara, 12/7/2025).

Selain penguatan kelembagaan, program pendampingan dan pelatihan teknis perlu diarahkan pada penguasaan sistem budidaya terpadu, manajemen usaha tambak, serta pengolahan hasil yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah. Kebijakan yang mendorong kemitraan yang lebih setara antara petambak kecil

dengan perusahaan besar atau pelaku usaha pengolahan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa manfaat diversifikasi dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan pendekatan yang komprehensif menggabungkan diversifikasi usaha, penguatan kapasitas petambak, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan usaha tambak di desa Mallasoro memiliki potensi untuk berkembang tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

2.7.6 Mata Pencaharian Sampingan sebagai Strategi Adaptasi Ekonomi Rumah Tangga

Dalam upaya menambah dan menstabilkan penghasilan keluarga, masyarakat desa Mallasoro mengembangkan berbagai bentuk mata pencaharian sampingan. Aktivitas ini mencakup berkebun dengan memanfaatkan halaman rumah, membuka usaha kuliner atau warung makan, serta menjalankan usaha mikro lainnya. Selain itu, sebagian warga juga bekerja sebagai tukang ojek, tukang kayu, dan buruh bangunan. Secara geografis, keterbatasan akses transportasi lokal dan meningkatnya kebutuhan akan hunian yang layak menjadikan pekerjaan-pekerjaan tersebut sebagai alternatif rasional yang dapat dijalankan tanpa memerlukan modal besar maupun keahlian formal yang tinggi.

Mata pencaharian sampingan ini berfungsi sebagai strategi ekonomi penting bagi masyarakat pesisir, terutama bagi rumah tangga yang menggantungkan pekerjaan utamanya pada sektor perikanan tangkap dan budidaya rumput laut yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan musim. Ketergantungan pada satu sumber penghasilan dinilai berisiko tinggi, sehingga diversifikasi melalui pekerjaan sampingan menjadi pilihan yang relatif aman untuk menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Kepala Desa Mallasoro, Andi Rusdi, menjelaskan bahwa:

“Hampir tidak ada rumah tangga nelayan yang hanya mengandalkan satu pekerjaan. Pasti ada tambahan, entah itu jualan kecil-kecilan, berkebun, jadi tukang ojek, atau kerja bangunan”. (Wawancara, 10/3/2025).

Dari sektor pertanian atau perkebunan, meskipun dilakukan dalam skala kecil akibat keterbatasan lahan dan kondisi geografis pesisir, aktivitas ini tetap dijalankan oleh warga yang memiliki akses lahan sempit. Umumnya, hasil pertanian berupa tanaman pangan dan sayuran dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga dan sebagian dijual di pasar lokal. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber tambahan pendapatan, tetapi juga sebagai strategi penghematan pengeluaran keluarga.

Seorang warga yang memanfaatkan pekarangan rumahnya mengungkapkan:

“Tidak besar hasilnya, tapi paling tidak sayur tidak perlu beli lagi. Kalau lebih, bisa dijual ke tetangga.” (Wawancara, 12/7/2025).

Pola mata pencaharian sampingan ini juga sangat dipengaruhi oleh siklus musiman dan ketersediaan waktu luang. Pada musim paceklik atau ketika cuaca buruk membatasi aktivitas melaut, intensitas pekerjaan alternatif cenderung meningkat secara signifikan. Banyak nelayan yang beralih sementara menjadi buruh bangunan, tukang ojek, atau pedagang kecil pada periode tersebut. Sementara itu,

sebagian warga yang memiliki modal atau tabungan mencoba mengembangkan usaha pengolahan makanan, meskipun masih terbatas jumlahnya.

Seorang nelayan menuturkan:

“Kalau ombak besar, kami tidak bisa ke laut. Biasanya saya ikut kerja bangunan atau narik ojek, supaya tetap ada uang masuk.” (Wawancara, 27/7/2025)

Fenomena migrasi kerja musiman juga ditemukan dalam konteks ini. Sekitar 10–15 persen laki-laki usia produktif bekerja di luar desa selama musim paceklik, kemudian kembali pada musim penangkapan. Perpindahan kerja ini umumnya memanfaatkan jaringan sosial dan kekerabatan untuk memperoleh akses pekerjaan di wilayah lain. Dalam beberapa kasus, migrasi yang awalnya bersifat sementara berkembang menjadi permanen ketika peluang ekonomi di luar desa dinilai lebih menjanjikan.

Selain pekerjaan fisik, aktivitas ekonomi skala kecil seperti penjualan pulsa elektronik dan bensin eceran juga mulai berkembang di desa Mallasoro. Meskipun masih terbatas karena kebutuhan lokal yang relatif kecil dan keterbatasan modal, usaha-usaha ini menunjukkan adanya adaptasi masyarakat terhadap perubahan pola konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Kontribusi mata pencaharian alternatif dan sampingan terhadap ekonomi rumah tangga di desa Mallasoro tergolong signifikan, khususnya pada musim paceklik. Pada periode tersebut, pendapatan dari pekerjaan sampingan mampu menutupi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga berfungsi sebagai *safety net* ekonomi yang memperpanjang keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Meskipun karakteristik pendapatannya relatif kecil dan tidak menentu, mata pencaharian sampingan ini berperan penting sebagai penyangga kehidupan ketika aktivitas melaut tidak dapat dilakukan.

Namun demikian, pengembangan mata pencaharian sampingan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, serta persaingan dengan pelaku usaha dari luar desa. Tanpa dukungan kelembagaan dan akses permodalan yang memadai, mata pencaharian alternatif ini cenderung stagnan dan sulit berkembang menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

2.7.7 Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Sumber Daya Laut

Tingkat ketergantungan masyarakat desa Mallasoro terhadap sumber daya laut hingga saat ini masih tergolong sangat tinggi. Kondisi ini tercermin jelas dalam aktivitas keseharian masyarakat, di mana mayoritas mata pencaharian utama—baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. Ketergantungan tersebut tidak hanya terbatas pada aktivitas penangkapan ikan, budidaya rumput laut, dan usaha tambak ikan maupun udang, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai ekonomi kelautan, mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil laut, distribusi dan perdagangan, hingga jasa-jasa pendukung seperti transportasi laut dan jasa penyeberangan antarpulau.

Berdasarkan data Pemerintah desa Mallasoro, sekitar 70-75 persen total pendapatan masyarakat bersumber dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan laut. Sumber pendapatan tersebut meliputi hasil tangkapan nelayan, budidaya dan

pengolahan rumput laut, perdagangan ikan segar dan olahan, serta jasa transportasi laut skala lokal. Tingginya ketergantungan ini diperkuat oleh minimnya alternatif sumber daya alam lainnya di wilayah pesisir, kondisi tanah yang kurang produktif untuk pertanian intensif, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap sektor ekonomi non-kelautan.

Kepala desa Mallasoro mengungkapkan bahwa:

“Kalau laut terganggu, hampir semua ikut terganggu. Karena sebagian besar warga hidupnya memang dari laut, langsung atau tidak langsung.” (Andi Rusdi. Wawancara, 10/3/2025).

Fenomena ini membentuk pola ekonomi yang cenderung bersifat monokultur kelautan, yang meskipun efisien dalam konteks pemanfaatan sumber daya lokal, namun sangat rentan terhadap fluktuasi kondisi lingkungan dan faktor eksternal yang mempengaruhi ekosistem laut.

Ketergantungan terhadap sumber daya laut di desa Mallasoro bersifat multisektoral dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari aspek pangan, sekitar 60–70 persen lauk pauk yang dikonsumsi rumah tangga berasal dari hasil laut, baik dalam bentuk ikan segar maupun produk olahan seperti ikan asin, abon ikan, kerupuk ikan, dan olahan berbahan dasar rumput laut. Produk-produk ini tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga menjadi bahan baku utama bagi usaha mikro dan UMKM lokal.

Dari sisi mata pencaharian, ketergantungan terhadap laut tidak hanya dialami oleh nelayan, tetapi juga oleh pedagang ikan, pengolah hasil laut, tukang perahu, pembuat jaring, hingga buruh angkut dan pekerja tambak. Bahkan profesi-profesi pendukung ini tetap bergantung pada keberlangsungan aktivitas utama di sektor kelautan.

Seorang pedagang ikan menyampaikan: *“Kalau nelayan tidak melaut, kami juga tidak bisa jualan. Semua saling terkait.”* (Wawancara, 12/7/2025). Ketergantungan tersebut juga terlihat dalam dimensi sosial budaya. Berbagai ritual, tradisi, dan sistem pengetahuan lokal masyarakat desa Mallasoro berkembang seiring dengan siklus alam laut, musim angin, dan pasang surut air laut. Pengetahuan tentang waktu melaut, masa tanam rumput laut, hingga pantangan tertentu diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas masyarakat pesisir. Dari aspek spasial, pola permukiman dan pembangunan infrastruktur desa pun cenderung berorientasi ke laut sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial.

Tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya laut ini membawa konsekuensi ekonomi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan keunggulan komparatif berupa penguasaan teknologi tradisional, pengetahuan lokal yang mendalam tentang ekosistem laut, serta solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi tantangan bersama. Namun di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan menciptakan kerentanan ekonomi yang signifikan terhadap risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrem, pemanasan global, pencemaran laut, serta fluktuasi harga komoditas kelautan seperti ikan, rumput laut, dan garam.

Seorang petani rumput laut menuturkan: *“Kalau cuaca tidak bagus, rumput laut stress, hasil turun, semua ikut susah”*. (Wawancara, Rais 12/7/2025). Ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan, kualitas rumput laut menurun, terhenti akibat cuaca buruk yang berkepanjangan, hampir seluruh aktivitas ekonomi desa terdampak secara bersamaan. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya kapasitas adaptasi masyarakat untuk beralih ke sektor ekonomi lain, akibat keterbatasan keterampilan, modal, serta akses terhadap peluang usaha alternatif.

Meskipun demikian, mulai terlihat adanya variasi mata pencaharian di kalangan masyarakat desa Mallasoro, terutama di antara warga yang memiliki tingkat pendidikan relatif lebih tinggi. Selain sebagai petani rumput laut, nelayan tradisional, dan buruh tambak yang secara ekonomi cenderung termarginalkan, sebagian kecil warga telah berprofesi sebagai guru paruh waktu, anggota TNI, perawat, dan tenaga kontrak di instansi pemerintah.

Salah satu informan kunci, St. Rosmina Dg. Baji selaku Ketua UMKM Desa Mallasoro, menjelaskan bahwa:

“Sebagai tenaga P3K, penghasilan saja tidak cukup. Makanya saya juga kelola usaha olahan rumput laut dan gula aren.” (Wawancara, 12/7/2025).

Usaha kreatif kuliner yang dikelola informan tersebut memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah diperoleh, seperti rumput laut dan gula aren. Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan, tetapi juga menjadi contoh konkret diversifikasi mata pencaharian berbasis sumber daya lokal. Praktik ini memiliki potensi menjadi motor penggerak ekonomi alternatif, khususnya bagi istri-istri nelayan dan remaja desa yang memiliki kreativitas namun keterbatasan akses pekerjaan formal.

Namun demikian, kondisi ekonomi tenaga honorer dan pegawai paruh waktu di wilayah pesisir seperti desa Mallasoro masih tergolong rentan. Meskipun memiliki kualifikasi pendidikan yang setara dengan pegawai negeri, mereka seringkali hanya menerima honorarium yang jauh di bawah standar upah minimum, bahkan dalam beberapa kasus hanya sekitar Rp200.000-Rp500.000 per bulan sebagai tenaga sukarela. Ketidakpastian kontrak kerja dan rendahnya pendapatan ini memaksa mereka untuk mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Kondisi tersebut menciptakan paradoks sosial, di mana individu yang berperan penting dalam pelayanan publik justru menghadapi kesulitan ekonomi yang dapat berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Situasi ini semakin menegaskan bahwa ketergantungan terhadap sumber daya laut tidak hanya dialami oleh nelayan dan petani pesisir, tetapi juga oleh kelompok masyarakat lain yang secara tidak langsung terdampak oleh struktur ekonomi lokal yang terbatas.

Oleh karena itu, upaya memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro memerlukan pendekatan yang komprehensif. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pengembangan pasar, serta peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam mendorong diversifikasi mata pencaharian. Program pemberdayaan masyarakat pesisir perlu diarahkan pada pengembangan wisata bahari, diversifikasi budidaya

rumput laut, serta penguatan industri pengolahan hasil laut agar ketergantungan pada satu sektor dapat dikurangi, sekaligus menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.7.8 Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Pesisir Desa Mallasoro

Permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir desa Mallasoro dalam upaya peningkatan ekonomi merupakan isu sentral dalam kajian disertasi ini. Meskipun persoalan ekonomi bersifat multidimensional, penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada faktor-faktor penghambat pengembangan ekonomi masyarakat pesisir yang berkelindan dengan relasi sosial, struktur kelembagaan, dan pemanfaatan modal sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana potensi ekonomi yang tersedia belum mampu ditransformasikan menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Wilayah pesisir desa Mallasoro sesungguhnya memiliki potensi sumber daya bahari yang sangat besar, didukung oleh kearifan lokal, pengetahuan tradisional, serta lanskap pesisir yang berpeluang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Namun demikian, potensi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, petani rumput laut, dan pengelola tambak skala kecil. Sebaliknya, masyarakat masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural, dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tertinggal dibandingkan dengan komunitas pesisir di wilayah lain (Kusnadi, 2009; Satria, 2015). Salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir Desa Mallasoro adalah fluktuasi pendapatan yang sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi cuaca. Ketergantungan yang tinggi terhadap aktivitas kelautan menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Pada musim angin kencang, gelombang tinggi, atau perubahan suhu air laut, aktivitas melaut, budidaya rumput laut, dan usaha tambak seringkali terhenti atau mengalami penurunan produktivitas secara drastis.

Seorang nelayan tradisional mengungkapkan:

“Kalau cuaca bagus, kita bisa dapat. Tapi kalau angin kuat, bisa seminggu tidak turun ke laut. Tidak ada pemasukan sama sekali.” (Wawancara, Yusuf 27/7/2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber penghidupan masyarakat pesisir sangat rentan terhadap faktor alam, sementara mekanisme penyangga ekonomi (buffer) dalam bentuk tabungan, asuransi, atau usaha alternatif masih sangat terbatas.

Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha dan teknologi produksi. Sebagian besar nelayan dan petani rumput laut di desa Mallasoro beroperasi pada skala kecil dengan peralatan tradisional. Keterbatasan modal membuat mereka sulit meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, atau mengadopsi teknologi yang lebih efisien.

Petani rumput laut menyatakan:

“Kalau mau tambah bentangan, butuh modal besar. Sementara koperasi tidak sanggup, bank juga susah.” (Wawancara, Rais 12/4/2025).

Ketergantungan pada pemodal informal atau pedagang perantara menjadi pilihan utama, namun pola ini justru memperlemah posisi tawar petani dalam penentuan harga jual. Relasi ekonomi yang terbangun seringkali bersifat patron-klien, yang meskipun dilandasi kepercayaan sosial, namun secara struktural menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan.

Struktur rantai pemasaran hasil laut dan rumput laut di desa Mallasoro masih didominasi oleh pedagang pengumpul dan perantara. Petani dan nelayan sebagai produsen primer umumnya hanya menerima bagian terkecil dari nilai jual akhir produk. Ketergantungan pada pembeli tertentu, terutama ketika membutuhkan uang tunai secara cepat, membuat masyarakat sulit menentukan harga secara mandiri.

Seorang buruh petani rumput laut (Rais Dg. Jalling) menjelaskan:

“Kalau sudah butuh uang, harga berapapun kita terima. Yang penting ada yang beli”. (Wawancara, 12/4/2025).

Kondisi ini mencerminkan lemahnya kelembagaan ekonomi lokal yang seharusnya dapat memperkuat posisi tawar masyarakat, seperti koperasi nelayan yang aktif dan profesional.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek pendidikan, keterampilan manajerial, dan kewirausahaan. Sebagian besar masyarakat pesisir hanya mengandalkan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun, tanpa didukung oleh pelatihan teknis yang memadai.

Ketua UMKM Desa Mallasoro menyampaikan:

“Banyak ibu-ibu bisa olah rumput laut, tapi tidak tahu cara kemas, branding, dan pasarnya ke mana”. (Wawancara, Dg. Baji 12/7/2025).

Rendahannya literasi usaha dan pemasaran ini menjadi kendala serius dalam upaya diversifikasi ekonomi berbasis pengolahan hasil laut dan pariwisata bahari.

Degradasi lingkungan pesisir akibat pencemaran, sampah kiriman, dan perubahan ekosistem laut juga menjadi tantangan besar. Selain itu, konflik pemanfaatan ruang pesisir antara aktivitas budidaya, penangkapan ikan, dan pengembangan pariwisata turut memperumit upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Pengelola wisata kitesurfing (Hadi) menjelaskan:

“Awalnya memang ada konflik lahan, tapi akhirnya disepakati pembagian zona dengan kompensasi”. (Wawancara, 14/2/2025)

Meskipun konflik dapat diselesaikan melalui musyawarah, kasus ini menunjukkan belum adanya regulasi dan perencanaan tata ruang pesisir yang jelas dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

Minimnya infrastruktur pendukung seperti akses jalan, fasilitas penyimpanan hasil laut, sarana pengolahan, serta dukungan kelembagaan yang efektif turut membatasi pengembangan ekonomi lokal. Program pemberdayaan yang ada seringkali bersifat sporadis, tidak berkelanjutan, dan kurang melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Kepala desa Mallasoro menegaskan: *“Program datang dan pergi, tapi pendampingan jarang berlanjut”.* (Wawancara, 12/7/2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Nikijuluw (2002) yang menekankan bahwa pembangunan pesisir tanpa penguatan

kelembagaan dan partisipasi masyarakat hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat sementara.

Berdasarkan identifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk struktur hambatan yang kompleks. Ketergantungan pada sumber daya alam, keterbatasan modal dan teknologi, lemahnya posisi tawar, rendahnya kualitas SDM, degradasi lingkungan, serta lemahnya kelembagaan lokal merupakan faktor-faktor kunci yang menghambat transformasi potensi pesisir menjadi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi berbasis wisata bahari sebagaimana dikemukakan Rahman dan Prasetyo (2024) harus dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berbasis modal sosial. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya pesisir menjadi prasyarat utama agar pengembangan ekonomi lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kemandirian dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro.

2.7.9 Permasalahan Ekonomi yang di hadapi oleh Nelayan Tangkap Tradisional, Budidaya rumput laut dan pengelolah tambak ikan dan Udang adalah :

Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh nelayan tangkap tradisional, pembudidaya rumput laut, serta pengelola tambak ikan dan udang di desa Mallasoro menunjukkan karakter yang kompleks dan saling terkait. Secara umum, permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek struktural, sosial, kelembagaan, dan kebijakan pembangunan pesisir.

Pertama, kemiskinan struktural menjadi kondisi dominan yang dialami oleh rumah tangga nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil. Tingkat pendapatan dari mata pencaharian utama relatif rendah dan sangat fluktuatif karena bergantung pada musim, cuaca, serta kondisi perairan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam ini menyebabkan kerentanan ekonomi yang signifikan, di mana pada periode cuaca buruk atau musim paceklik, sebagian besar rumah tangga kehilangan sumber pendapatan secara total atau mengalami penurunan drastis.

Kedua, keterbatasan akses terhadap modal usaha merupakan hambatan mendasar dalam upaya peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi. Keterbatasan modal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, sebagian besar nelayan dan pembudidaya dikategorikan sebagai debitur berisiko tinggi (*high risk*) oleh lembaga keuangan formal, sehingga dianggap tidak layak kredit. Kedua, kapasitas lembaga keuangan informal seperti koperasi desa masih sangat terbatas, sehingga tidak mampu menopang kebutuhan modal untuk diversifikasi usaha atau peningkatan skala produksi. Ketiga, akses terhadap lembaga perkreditan formal hampir tidak tersedia karena proses administrasi yang rumit, waktu pencairan yang lama, serta persyaratan jaminan dan pendapatan tetap yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat pesisir.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan formal, keterampilan teknis, dan pengetahuan kewirausahaan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan usaha yang lebih produktif. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pesisir cenderung bertahan pada pola usaha tradisional dan sulit mengembangkan diversifikasi ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi. Keterbatasan tersebut semakin diperparah oleh fakta bahwa program pendidikan dan pelatihan keterampilan belum secara optimal menjangkau masyarakat di wilayah pesisir, baik dari segi frekuensi, materi, maupun keberlanjutan pendampingannya.

Keempat, minimnya infrastruktur pendukung turut memperkuat ketertinggalan ekonomi masyarakat pesisir. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas seperti tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga yang layak, akses jalan yang rusak, serta teknologi pendingin dan penyimpanan hasil perikanan menyebabkan tingginya biaya transaksi dan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing hasil perikanan dan posisi tawar masyarakat dalam rantai pemasaran.

Kelima, keterbatasan jaringan kelembagaan dengan lembaga keuangan yang lebih besar serta lemahnya manajemen kelembagaan desa menjadi kendala serius dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelembagaan desa dan kelompok usaha yang ada belum dikelola secara profesional, sehingga tingkat kepercayaan anggota relatif rendah dan kapasitas kelembagaan dalam mengakses sumber pendanaan eksternal menjadi sangat terbatas. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat intervensi kebijakan pembiayaan yang dirancang secara khusus untuk menjawab karakteristik dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Keenam, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dihadapkan pada risiko usaha yang tinggi dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Risiko tersebut meliputi kegagalan panen akibat penyakit, cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan, baik pada usaha penangkapan ikan, budidaya rumput laut, maupun tambak ikan dan udang yang relatif kurang produktif. Kondisi ini semakin diperburuk oleh tidak adanya jaminan sosial atau skema asuransi yang dapat melindungi nelayan dan pembudidaya ketika terjadi kecelakaan kerja atau kegagalan usaha.

Ketujuh, keterbatasan lahan dan modal usaha menjadi kendala spesifik dalam pengembangan budidaya rumput laut, sementara pada sektor tambak, produktivitas yang rendah dan biaya pemeliharaan yang tinggi seringkali tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, muncul konflik pemanfaatan ruang pesisir, khususnya konflik jalur lalu lintas dan zona aktivitas antara nelayan tangkap, petani rumput laut, dan pengelola wisata bahari, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha masing-masing sektor.

Kedelapan, praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif seperti sistem ijon masih banyak dijumpai dan terikat kuat dengan pola pemasaran hasil perikanan. Sistem ini menciptakan ketergantungan jangka panjang antara pelaku usaha kecil dengan tengkulak, yang pada akhirnya melemahkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Kesembilan, kelembagaan masyarakat yang ada belum bekerja secara optimal dalam mendorong pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan. Lemahnya sinergi antar-kelembagaan desa dengan komunitas lokal serta rendahnya partisipasi angkatan kerja muda, khususnya remaja, dalam pengembangan sektor pariwisata bahari menunjukkan belum terintegrasinya potensi sumber daya manusia lokal dalam strategi pembangunan ekonomi desa.

Temuan-temuan permasalahan tersebut diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan berbagai informan kunci, dan sejalan dengan pandangan Dahuri et al. (2021) yang menegaskan bahwa ekonomi masyarakat pesisir dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor ekologi, sosial-ekonomi, dan kelembagaan. Permasalahan ekonomi masyarakat pesisir Desa Mallasoro bersifat multidimensional dan saling berkaitan, dimulai dari ketergantungan tinggi terhadap sektor perikanan sebagai sumber pendapatan utama yang menciptakan kerentanan ekonomi, diperparah oleh fluktuasi pendapatan akibat faktor musiman dan cuaca, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan infrastruktur, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menghambat upaya diversifikasi mata pencaharian secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menegaskan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir Desa Mallasoro merupakan bentuk kemiskinan struktural yang bersifat multidimensional. Kemiskinan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan individu, melainkan oleh konfigurasi struktur ekonomi, sosial, kelembagaan, dan ekologis yang saling berkelindan dan membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kusnadi (2009) yang menempatkan kemiskinan nelayan sebagai akibat dari ketimpangan akses terhadap sumber daya produksi, pasar, dan kebijakan pembangunan yang belum berpihak pada nelayan kecil.

Ketergantungan masyarakat Mallasoro pada sektor perikanan tangkap tradisional, budidaya rumput laut, dan tambak skala kecil menciptakan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Fluktuasi musim, cuaca, dan kondisi lingkungan laut menyebabkan pendapatan rumah tangga bersifat tidak stabil dan sulit diprediksi. Dalam perspektif Chambers (1983), kondisi ini mencerminkan *vicious cycle of poverty*, di mana kerentanan struktural memperkuat ketidakmampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Mallasoro masih bersifat monosektor, dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut sebagai sumber pendapatan utama. Kondisi ini sesuai dengan kerangka *livelihood vulnerability* yang dikemukakan oleh Allison dan Ellis (2001), bahwa rumah tangga pesisir yang bergantung pada satu sumber penghidupan memiliki risiko ekonomi yang lebih besar ketika terjadi guncangan eksternal.

Upaya diversifikasi penghidupan memang telah dilakukan, seperti melalui budidaya rumput laut, kerja informal, dan usaha sampingan. Namun, diversifikasi tersebut masih bersifat terbatas, berpendapatan rendah, dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Dalam kerangka Scoones (1998), diversifikasi yang berkembang di Mallasoro lebih merupakan strategi bertahan hidup (*coping strategy*) dibandingkan strategi transformasi ekonomi jangka panjang.

Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan modal merupakan faktor kunci yang menghambat peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi masyarakat

pesisir. Pendapatan yang rendah dan fluktuatif menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan akumulasi modal, baik untuk peningkatan teknologi alat tangkap maupun pengembangan usaha alternatif. Kondisi ini menciptakan *capital trap* yang memperkuat kemiskinan struktural.

Eksklusi finansial menjadi masalah serius, ditandai dengan sulitnya akses terhadap lembaga keuangan formal karena status sebagai debitur berisiko tinggi, ketiadaan jaminan, dan prosedur administratif yang kompleks. Akibatnya, masyarakat bergantung pada sistem pembiayaan informal seperti ijon, yang dalam perspektif Scott (1972) mencerminkan relasi patron–klien yang timpang dan eksploitatif. Sistem ini memang memberikan jaminan jangka pendek, tetapi pada saat yang sama melemahkan posisi tawar dan memperpanjang ketergantungan ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat pesisir Mallasoro menjadi hambatan struktural dalam pengembangan ekonomi lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia berimplikasi langsung pada rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi alternatif, termasuk sektor pariwisata bahari.

Minimnya akses terhadap program pendidikan dan pelatihan memperkuat reproduksi kemiskinan antargenerasi. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, kondisi ini menunjukkan absennya mekanisme *capacity building* yang efektif, sehingga transformasi struktural ekonomi lokal sulit terwujud (Ellis, 2000; Satria, 2015).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan infrastruktur pendukung seperti tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga, akses jalan, dan teknologi pendingin ikan berdampak signifikan terhadap efisiensi ekonomi masyarakat pesisir. Minimnya infrastruktur menyebabkan biaya transaksi tinggi, mempercepat kerusakan hasil tangkapan, serta membatasi akses ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, kondisi tambak yang kurang produktif dan keterbatasan lahan budidaya rumput laut mempersempit pilihan mata pencaharian alternatif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pembangunan infrastruktur pesisir merupakan prasyarat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (Dahuri et al., 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa kelembagaan ekonomi lokal belum berfungsi optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lemahnya manajemen kelembagaan, rendahnya tingkat kepercayaan anggota, serta minimnya sinergi antar kelembagaan desa menunjukkan rapuhnya modal sosial kelembagaan.

Dalam perspektif Putnam (1993), modal sosial yang lemah menghambat kemampuan kolektif masyarakat untuk membangun kerjasama, melakukan negosiasi, dan mengakses sumber daya eksternal. Konflik horizontal antara nelayan, petani rumput laut, dan pengelola wisata mencerminkan belum berkembangnya *bridging social capital* yang mampu menjembatani kepentingan antar kelompok.

Pengembangan wisata bahari di desa Mallasoro membuka peluang diversifikasi ekonomi di luar sektor perikanan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata juga menjadi arena kontestasi pemanfaatan ruang pesisir antara

berbagai aktor lokal. Konflik jalur lalu lintas dan zonasi ruang mencerminkan dinamika politik sumber daya yang kompleks.

Dalam perspektif *political ecology* (Bryant & Bailey, 1997), konflik tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata pesisir perlu didukung oleh tata kelola yang partisipatif dan berkeadilan agar tidak memarginalkan masyarakat lokal.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat pendekatan struktural–institusional dalam memahami kemiskinan masyarakat pesisir. Integrasi teori kemiskinan struktural, *livelihood framework*, modal sosial, dan *political ecology* memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro.

Hal ini menegaskan bahwa strategi pengembangan ekonomi pesisir tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi harus mencakup penguatan kelembagaan, akses pembiayaan inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, serta tata kelola ruang pesisir yang adil dan partisipatif. Dengan demikian, transformasi potensi sumber daya bahari menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat pesisir dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

2.8 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro menunjukkan karakter kemiskinan struktural multidimensional yang tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, melainkan oleh interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan kebijakan. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya laut sebagai basis utama mata pencaharian nelayan tangkap tradisional, petani rumput laut, serta pengelola tambak ikan dan udang menempatkan masyarakat dalam posisi rentan terhadap fluktuasi musim, cuaca, dan dinamika pasar.

Pertama, dari sisi ekonomi, pendapatan masyarakat pesisir bersifat rendah, tidak stabil, dan berisiko tinggi, sehingga tidak memungkinkan terjadinya akumulasi modal yang memadai. Keterbatasan akses terhadap permodalan formal, ketiadaan skema pembiayaan khusus bagi sektor pesisir, serta kuatnya praktik sistem ijon memperkuat jebakan kemiskinan (*capital trap*) yang bersifat struktural. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit meningkatkan skala usaha, mengadopsi teknologi yang lebih produktif, maupun melakukan diversifikasi mata pencaharian secara berkelanjutan.

Kedua, dari aspek sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat pesisir menjadi penghambat utama dalam upaya transformasi ekonomi. Minimnya program pelatihan dan pendampingan yang menjangkau wilayah pesisir menyebabkan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan ekonomi dan peluang usaha alternatif termasuk pariwisata bahari dan pengolahan hasil laut masih sangat terbatas. Situasi ini berpotensi mereproduksi kemiskinan secara antargenerasi.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur fisik dan ekonomi seperti ketiadaan tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga yang memadai, akses jalan yang rusak, serta fasilitas penyimpanan dan pendinginan hasil perikanan menyebabkan isolasi ekonomi dan rendahnya daya saing produk masyarakat pesisir. Infrastruktur yang tidak mendukung juga berdampak pada tingginya biaya transaksi dan rendahnya nilai tambah yang dapat dinikmati oleh pelaku usaha skala kecil.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa modal sosial dan kelembagaan masyarakat pesisir belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Lemahnya manajemen kelembagaan desa, rendahnya tingkat kepercayaan anggota, minimnya sinergi antar-lembaga, serta adanya konflik horizontal antar kelompok pemanfaat sumber daya pesisir menghambat terbentuknya aksi kolektif yang kuat. Padahal, secara teoritis, modal sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi tawar, memperluas jaringan ekonomi, dan mengurangi risiko usaha melalui mekanisme gotong royong dan solidaritas sosial.

Kelima, tingginya ketidakpastian usaha dan ketiadaan sistem perlindungan sosial seperti asuransi nelayan, jaminan kecelakaan kerja, dan skema mitigasi risiko menyebabkan masyarakat pesisir sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Satu kali kegagalan panen, kecelakaan kerja, atau cuaca ekstrem dapat langsung mendorong rumah tangga nelayan ke kondisi kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat pesisir desa Mallasoro tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral dan teknokratis semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif dengan menempatkan modal sosial sebagai fondasi utama, yang diintegrasikan dengan penguatan kelembagaan lokal, diversifikasi mata pencaharian berbasis potensi pesisir (termasuk wisata bahari), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan infrastruktur yang berpihak pada masyarakat pesisir skala kecil. Dengan demikian, potensi sumber daya kelautan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa Mallasoro dapat ditransformasikan secara berkelanjutan menjadi peningkatan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

2.9 Daftar Pustaka

- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). *The livelihoods approach and management of small-scale fisheries*. Marine Policy
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.
- Chambers, R. (1987). *Poverty and Vulnerability: Concepts and Measures*. IDS Working Paper.
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century* (IDS Discussion Paper 296). Institute of Development Studies.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahuri, R. (2003). *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*. Jakarta: Mizan.

- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2004). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradnya Paramita
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.
- Granovetter, M. (1985). *Economic action and social structure: The problem of embeddedness*. American Journal of Sociology.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar. (Edisi asli diterbitkan 2006)
- Kurniawan, A., & Salim, A. (2018). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berbasis kelompok*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2).
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications
- Nikijuluw, V. P. H. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. PT Pustaka Cidesindo
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone*. Simon & Schuster.
- Raharjo. (2011). *Akses Permodalan dan Kesejahteraan Nelayan Kecil*. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*.
- Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scott, J. C. (1972). *Patron-client politics and political change in Southeast Asia*. American Political Science Review.
- Scoones, I. (1998). *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*. IDS Working Paper.
- Uphoff, N. (1992). *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. London: IIED.